

I. 7.9.4.

SERI

PAPUA AKTUAL

No. 8

“Tutup Tahun dengan Kecemasan”

(Oktober-Desember 2006)



Sekilas Informasi

OLEH

SEKRETARIAT KEADILAN & PERDAMAIAN
KEUSKUPAN JAYAPURA

www.hampapua.org

Jayapura

Desember 2009

DAFTAR ISI

Bagian I : Lintasan Peristiwa Oktober-Desember 2006

- I. Hak-hak Sipil dan Politik
 - a. Kebebasan Warga
 - b. Pertahanan dan Keamanan
 - c. Penyelenggaraan Pemerintahan
 - d. Penanganan Konflik
 - e. Aspirasi 'M'
 - f. Pemekaran vs Otsus

- II. Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya
 1. Hak atas Pendidikan
 2. Hak atas Kesehatan
 3. Kesejahteraan Umum
 4. Pengelolaan Sumber Daya Alam

Bagian II : Analisis Peristiwa



BAGIAN I

LINTASAN PERISTIWA HAK ASASI MANUSIA OKTOBER – DESEMBER 2006

A. HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK

A.1 KEBEBASAN WARGA

4 Oktober

Sem Wandik (22) dituntut 5 tahun penjara potong tahanan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Jayapura, terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 214 KUHP yakni melakukan perlawanan terhadap aparat negara yang sedang melaksanakan tugas. "Sesuai dengan fakta di dalam persidangan, berupa keterangan dari 4 saksi, serta bukti-bukti petunjuk, maka kami menuntut terdakwa dengan tuntutan lima tahun penjara," kata Jaksa Penuntut Umum, Putu Soerjono, SH dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jayapura.

5 Oktober

Ibu Emy Berotabui orang tua Yahya Echo Berotabui yang menjadi korban kasus Abepura, didampingi pengacara PBHI Johnson Panjaitan, dan Wakil Ketua Sinode Gereja Kristen Injili di Tanah Papua Yemima Mirino Krey, mengadakan perkara Abepura 16 Maret 2006 ke Komnas HAM, Jakarta, didampingi oleh Tim Koalisi B 16 M yang terdiri dari SKP Jayapura dan KPKC GKI di Tanah Papua.

12 Oktober

JPU menuntut tujuh orang pelaku pembunuhan terhadap dua orang guru Amerika dan satu guru Indonesia di daerah pertambangan PT Freeport Indonesia. Ketegangan antara Indonesia dan Amerika Serikat akibat kejadian ini mereda setelah mereka setuju untuk bekerjasama dalam penyelesaian kasus ini, yang awalnya disinyalir ada indikasi keterlibatan militer Indonesia. JPU menghendaki pengadilan menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara untuk pemimpin pembunuhan, Antonius Wamang yang merekrut anggotanya untuk melakukan penyerangan yang menyebabkan jatuhnya korban. "Ia terbukti melakukan penembakan dengan menggunakan senjata M-16... tiga orang terbunuh di tempat kejadian itu", demikian tegas jaksa Anita Asterida.

19 Oktober

Para tahanan terkait Kasus Bentrok 16 Maret lalu tetap dipantau oleh tokoh-tokoh agama yang tergabung dalam PGGP (Persatuan Gereja-Gereja di Papua). Menurut laporan dari PGGP ke Komnas HAM Papua bahwa 15 orang terdakwa Kasus Bentrok 16 Maret sedang sakit. Ketua Komnas HAM Papua, Albert Rumbekwan membenarkan kalau ke-15 tahanan itu rata-rata sakit karena kesehatan mereka kurang diperhatikan sehingga kesehatan mereka menurun dan dikategorikan pelanggaran HAM. Akan tetapi, hal itu dibantah oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Abepura, Johan Yarangga. Menurutnya semua tahanan termasuk para terdakwa dan kasus Bentrok 16 Maret di Abepura diperhatikan kesehatannya, namun kendalanya adalah kurangnya fasilitas kesehatan di LP Abepura.

22 Oktober

Ketua Komda HAM Papua, Albert Rumbekwan SH, menolak pemanggilan dirinya menjadi saksi kasus kerusuhan Abepura Berdarah oleh tim pengacara kerusuhan itu yang beranggotakan Direktur LBH Jayapura, Paskalis Letsoin, Koordinator KONTRAS Papua, Pieter Ell dan beberapa anggota lainnya seperti Latifah Anum Siregar, Adolof Waramory, Iwan K. Niode, Rahman Ramli, Johannes H. Maturbongs dan Sihar Tobing. "Saya tidak akan memenuhi pemanggilan polisi atas pelaporan sesama tim pengacara Abepura karena harus meminta izin dari Komnas HAM Pusat. Kalau sudah ada izin, saya akan datang ke Polda menjadi saksi atas pengaduan sesama pengacara dalam kasus ini, tetapi kalau belum ada, maka saya tolak menjadi saksi," tegas Rumbekwan.

9 November

DPR Papua dinilai kurang bijak dan tidak cepat menanggapi aspirasi massa rakyat Papua Barat yang kurang lebih satu tahun melakukan demonstrasi menuntut penutupan PT Freeport. Hal ini dikemukakan oleh mantan Sekjen Front Pepera Papua Barat Kota Numbay, Selpius Bobi didampingi Yusak Pakage dan kelima belas napi kasus Bentrok 16 Maret lalu dalam konferensi pers di Aula Lapas Abepura.

10 November

Hari HAM Papua yang dikenal sebagai Hari Kejahatan Kemanusiaan di Tanah Papua akan dilaksanakan pada 11 November. Sekretaris Dewan Adat Papua Sayid Fadhal Alhamid didampingi Ketua Pemerintahan Dewan Adat Papua, Forkorus Yoboisembut, SPd mengatakan acara ini akan dihadiri oleh mantan Presiden RI K.H Abdurahman Wahid. Acara akan berlangsung di GOR Jayapura pada 13-14 November. "DAP menghadirkan mantan Presiden Gus Dur karena ia telah memberikan sumbangsih dan pembangunan kesadaran demokrasi di Tanah Papua", kata Sayid Fadal Alhamid.

Komnas HAM akan menyerahkan hasil penyelidikan pelanggaran HAM berat, penghilangan paksa pada 1997-1998 kepada Presiden dan Jaksa Agung. Ketua Komnas HAM, Abdul Hakim Garuda mengatakan laporan lengkap hasil penyelidikan akan kami serahkan minggu depan. Menurutnya laporan Komnas HAM menyebutkan 13 orang telah menjadi korban penghilangan paksa, dan 11 aktivis prodemokrasi yang kemudian dilepaskan, satu di antaranya meninggal di Sarangan, Magetan Jawa Timur. Lebih lanjut ia menjelaskan kendala yang dihadapi tim Ad Hoc antara lain keengganan saksi korban untuk memberikan keterangan, tertundanya pemeriksaan purnawiranan POLRI, penolakan TNI, penolakan Kejaksaan Agung dan tidak dipenuhinya permintaan penyelidikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menghadirkan saksi secara paksa.

14 November

Di GOR Cenderawasih, Jayapura, Tom Beanal selaku Ketua DAP menyerahkan penghargaan Papua kepada Gus Dur atas jasanya melindungi orang Papua. "Hanya Gus Dur yang telah memandang kita dengan hati nurani...hanya dialah yang menangkap dan mendengarkan suara orang Papua". Penghargaan tersebut berupa prasasti berukuran 30 x 45 cm yang bertuliskan: 'Damai Sejahtera kau bawa kepada kami. Tanah Papua menjadi milik kami Kyai Haji Abdurrachman Wahid. Demokrasi menjadi hak milik Papua'. Mantan Presiden RI ke-4 KH. Abdurrahman Wahid (Gusdur) mengatakan ia berjuang supaya almarhum Theys Hiyo Eluay menjadi salah seorang pahlawan nasional. "Dia sudah mengorbankan seluruh hidupnya bagi semua orang yang ada di Tanah Papua", kata Gusdur. Menanggapi hal ini, sekretaris Dewan Adat Papua (DAP) Leo Imbiri menyambut baik upaya yang dilakukan Gusdur. Menurut Leo hal ini akan dibicarakan dalam pertemuan yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Sementara itu, Ketua MRP Drs. Agus Alue Alua mendesak agar Pemerintah Provinsi Papua memberikan dukungan penuh atas rencana ini. "Saya secara pribadi dan MRP akan mendukung perjuangan tersebut", kata Agus Alua.

15 November

Sebanyak 140 kepala keluarga (KK) pengungsi asal RI ke PNG kembali ke kampung halaman mereka di Kampung Yabanda, Distrik Senggi, Kabupaten Keerom. Albert Meho, salah seorang pengungsi mengatakan, "Kami kembali karena setelah sekian lama berada di sana, kami tidak mendapat perhatian, bahkan kami dilarang berkebun dan berburu karena tidak ada hak-hak adat dan hak ulayat".

16 November

Isu tentang status Bendera Bintang Kejora mendapat tanggapan serius dari salah seorang anggota DPR Papua, Weynand Watori. Ia mengatakan Bintang Kejora sudah dijadikan sebagai lambang daerah. Itu sudah diakui dalam UU Otsus No. 21 Tahun 2001 Bab 2 ayat 2,3 di mana Papua memiliki lambang daerah sebagai simbol jati diri orang Papua dan Bendera Bintang Kejora merupakan salah

satu simbol daerah. Oleh karena itu, bagi orang Papua Bendera Bintang Kejora sebagai identitas diri Papua, sulit dipisahkan dengan orang Papua.

20 November

Direktur Lembaga Pencegahan dan Perlindungan Perempuan dan Anak (LP3A) Selfiana Sanggenafa mengatakan berdasarkan data yang dihimpun oleh lembaganya menunjukkan bahwa tingkat kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dan anak dalam kurun waktu tiga bulan terakhir cukup tinggi. Karena itu, persoalan ini perlu disikapi dan diakomodir dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Jayapura untuk mengatasi kekerasan pada ibu dan anak. Menyikapi hal ini Ketua DPRD Kota Jayapura Drs. Theopilus Bonay, MM mengatakan pihak Dewan sangat responsif terhadap persoalan ini dan akan diperjuangkan pada Tahun Anggaran (TA) 2007 mendatang.

21 November

Wakil Gubernur Provinsi Papua, Alex Hesegem, SE membuka Konggres Nasional Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) XXV dan Sidang Majelis Pertimbangan Anggota (MPA) XXIV di GOR Cenderawasih Jayapura. Ia berpesan agar seluruh anggota PMKRI berpartisipasi aktif dalam tugas dan tanggung jawab sebagai mahasiswa dan melaksanakan panji-panji organisasi sesuai Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART). Sementara itu, Ketua Presidium PMKRI Pusat, E. Emanuel Tullar mengatakan ada beberapa agenda yang akan dibahas dalam Konggres, antara lain persoalan Freeport, kasus Abepura, dan implementasi Otsus Papua. Tema yang diangkat dalam Konggres kali ini adalah "Membangun Indonesia yang berkeadilan Sosial". Turut memberikan sambutan pada acara pembukaan Uskup keuskupan Jayapura Mgr. Dr. Leo Laba Ladjar OFM dan senior PMKRI Cabang Jayapura St. Efrem, Vitalis Jumte.

22 November

Steven Wandik, salah seorang terdakwa kasus Bentrok 16 Maret di Abepura divonis 5 tahun penjara oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, Moris Ginting, SH didampingi Hakim Anggota A. Lakoni, SH dan Denny Sumadi, SH. Menanggapi putusan ini Penasehat Hukum (PH) terdakwa Johnson Panjaitan tidak menerima dan langsung mendaftarkan banding. Sementara itu Direktur ELSHAM Papua yang juga salah satu anggota Penasehat Hukum (PH) terdakwa, Aloysius Renwarin, SH mengatakan tuntutan yang diberikan berlebihan, dan penerapan sistem keadilan di Tanah Papua lebih khusus terhadap para terdakwa di meja hijau belum merata, bahkan jauh dari harapan.

30 November

Kepala Lapas Abepura, Johan Yarangga, menjelaskan bahwa sesuai surat keterangan pemulangan dari RSUD Dok II Jayapura tertanggal 5 Oktober 2008, Filep Karma, sudah diizinkan keluar dari rumah sakit dan selanjutnya menjalani fisioterapi. Filep Karma dirawat di RSUD Dok II sejak 13 Januari 2006 karena percobaan bunuh diri di Lapas Abepura. Karena itu petugas Lapas sudah membawanya kembali ke Lapas Abepura.

9 Desember

Kepala Pemberdayaan Perempuan Kota Jayapura, Betty Pui, SE mengatakan sampai saat ini kaum perempuan belum mendapatkan perlindungan secara baik pada hal UUD 1945 menegaskan bahwa negara menjamin persamaan hak dan kewajiban setiap warga negara yang juga dipertegas dalam amandemen UUD 1945 serta UU No. 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia termasuk perlindungan bagi kaum perempuan. Dikatakan belum adanya perlindungan secara baik menyebabkan terjadinya permasalahan sosial yang menimpa kaum perempuan seperti ketidakadilan dalam rumah, tindak kekerasan dalam rumah tangga, jual beli kaum perempuan untuk dijadikan pekerja seks komersial maupun terjerumus dalam pekerja seks jalanan dan sebagainya. Tindak kekerasan terhadap perempuan sangat jelas melanggar hak hidup seseorang, jika dikaitkan dengan produk hukum yang berlaku dan bila dilihat dari sudut pandang agama, setiap bentuk eksploitasi dan diskriminasi yang mana tidak lain sebagai bentuk pencurian dan perampasan hak-hak manusia yang melekat pada setiap insan hal ini dikatakannya dalam workshop tentang masalah prioritas dan

kebijakan dalam perlindungan perempuan.

10 Desember

Di Jayapura Hari Hak Asasi Manusia (HAM) diperingati dengan kunjungan ke makam Korban Abepura 7 Desember 2000 di kompleks Pekuburan Kristen Tanah Hitam. Selain itu dilakukan bagi-bagi bunga di jalan raya kepada setiap pengendara yang lewat di wilayah Kotaraja dan Abepura, kemudian dilakukan ibadah bersama di Aula STT I.S. Kijne Abepura. Ketua Komunitas Survivor Abepura (KSA) Papua, Peneas Lokbere, mengatakan, "Saya atas nama korban meminta keadilan yang seadil-adilnya, kami menilai sidang pertama tentang pelanggaran HAM yang terjadi di Papua, yakni tentang Abepura berdarah belum ada keadilan sama sekali walaupun masih ada kasasi. Hak-hak korban Kompensasi, Rehabilitasi, dan Restitusi merupakan sebuah kewajiban".

Kelompok yang mengatasnamakan dirinya Koalisi Perjuangan Hak-hak Asasi Rakyat Sipil Papua mengadakan demo damai di Lingkaran Abepura. Penanggung jawab aksi Oktovianus Pekey mengatakan aksi yang dilakukan tersebut merupakan bagian dari kegiatan-kegiatan sebelumnya dalam rangka memperingati hari HAM se-dunia. Pernyataan yang dikeluarkan: menolak cara-cara kekerasan, peradilan yang adil dan bermartabat, para tahanan bentrokan Abepura 16 Maret 2006 segera dibebaskan karena mereka adalah korban.

11 Desember

WaliKota Jayapura M.R. Kambu mengatakan untuk mencegah seringnya terjadi kasus tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), agama harus diperkuat dalam basis keluarga. Walupun sudah ada Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT namun kekerasan tetap saja terjadi. Dikatakan bahwa dengan iman yang kuat akan muncul ketaatan dan saling memahami, maka lebih dari itu akan saling memaafkan di antara satu anggota keluarga dengan anggota keluarga yang lain karena adanya sikap kasih itu.

12 Desember

Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto meminta masyarakat mewaspadai Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) yang mengatas namakan penegakan HAM di Papua untuk kepentingan yang tidak jelas, apalagi jika dipakai untuk melindungi aksi garis keras OPM yang bergerak di bumi Cendrawasih. Katanya bahwa waspadai yang jualan isu HAM di Papua. Saat ini Mabes TNI masih menggunakan pendekatan persuasif terhadap gerakan separatis di Papua namun terbuka kemungkinan untuk melakukan tindakan yang lebih tegas. Panglima juga menuturkan pemahaman terhadap isu HAM harus ditempatkan secara proporsional bukan untuk mendekonstruksi kesatuan wilayah Republik Indonesia TNI akan tetap konsisten untuk berada di sana kami tidak takut dibilang melanggar HAM karena memang ancaman itu benar-benar ada.

13 Desember

Menyangkut soal jual isu HAM di Papua untuk kepentingan tertentu ditanggapi Perwakilan Komnas HAM Papua Ketua Divisi Bidang Ekosob Komnas HAM Papua Frits Ramandey menilai pernyataan itu bukanlah hal yang baru, ia mengatakan bukan hanya di Papua tetapi di daerah lain juga, karena itu jika negara mempunyai data tentang LSM mana saja yang mengusung tema penegakan HAM untuk kepentingan tertentu, harus dapat disebutkan bukan hanya menuding.

15 Desember

Puluhan perempuan yang tergabung dalam jaringan perempuan yang berasal dari berbagai organisasi perempuan serta LSM yang ada di Kabupaten Biak Numfor melakukan konvoi kendaraan bermotor dengan membawa beberapa poster dan pamflet yang berisi himbauan untuk tidak melakukan kekerasan. Kegiatan ini dipelopori oleh Panitia Peringatan Anti Kekerasan Terhadap Perempuan yang diketuai oleh Agustina Klorway Kbarek. Pihaknya mengatakan bahwa kekerasan sering terjadi terhadap perempuan dan anak selalu tidak tampak di permukaan apalagi dilaporkan kepada pihak berwajib karena korban selama ini merasa takut.

16 Desember

Pelaku kekerasan dalam rumah tangga menjadi perhatian dari Asisten III, H. Djabar A Kadir. Menurutnya seluruh masyarakat Papua perlu merapatkan barisan untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak. Hal itu disampaikan saat melepaskan konvoi kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap perempuan di halaman kantor gubernur. Ketua Panitia Lien Tamnge mengatakan kampanye ini merupakan kampanye Internasional untuk mendorong upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan di seluruh dunia.

18 Desember

Para terdakwa kasus penembakan di Lapangan Maskura Kimaam Merauke 2001 yang menewaskan 2 masyarakat sipil yang disebut 3 buta divonis bebas oleh pengadilan Negeri Merauke. Terdakwa 1 Untung P, terdakwa 2 Marjono terdakwa 3 Harbi M, terdakwa 4 Andi Nur, terdakwa 5 DH Mansoben, terdakwa 6 John S, terdakwa 7 Isral dan terdakwa 8 Adria MP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana yang didakwakan.

A.2 PERTAHANAN DAN KEAMANAN

5 Oktober

Dalam rangka merayakan HUT ke 61 TNI di Papua, Pangdam XVII/Trikora Mayor Jenderal TNI Zamroni mengatakan untuk mengatasi kelompok-kelompok separatis (TPN/OPM), TNI mengedepankan pendekatan kemanusiaan. Karena bagaimanapun mereka juga warga negara Indonesia yang perlu mendapat pembinaan secara berkesinambungan. Sementara WNI (Papua) yang meminta suaka politik di PNG, menurut Pangdam, hal itu sudah merupakan masalah antar negara (Indonesia dan Australia).

Panglima TNI, Marsekal Djoko Suyanto mengatakan pihak asing akan berusaha mengancam kepentingan nasional, antara lain; dalam bentuk upaya penguasaan wilayah-wilayah terluar, *illegal logging*, *illegal fishing*, teror/cara lain untuk menguasai bidang ekonomi, politik, dan sosial budaya.

17 Oktober

Konselor Delegasi Australia Bidang Ekonomi, Bernhard Lynch, mengatakan terhitung sejak Januari sampai sekarang sekitar 250 kapal penangkap ikan asal Indonesia (Indonesia Timur) ditangkap oleh Pemerintahan Australia, terkait *illegal fishing* di wilayah perairan Australia. Dari 250 kapal nelayan tersebut, sekitar 2000 Anak Buah Kapal (ABK) telah diamankan. Salah satu ikan yang diburu oleh nelayan-nelayan ini adalah sirip ikan Hiu. Untuk itu Parlemen Australia pada bulan Juni 2006 mengeluarkan suatu UU yang mana terjadi *illegal fishing* oleh nelayan akan dikenakan pidana 2-3 tahun, sedangkan kapal akan dirampas dan dikenakan denda sebesar RP. 5,7 miliar.

19 Oktober

Pemerintah Australia dengan Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Papua akan bekerja sama untuk memberantas *illegal fishing*, dimana banyaknya nelayan Indonesia (Papua) yang tertangkap di perairan Australia. Niat baik pemerintah Australia ini disampaikan oleh Sekda Drs. H. Andi Baso Baseleng. Kerja sama itu akan dimuat dalam suatu MoU (*Memorandum of Understanding*). Di perbatasan perairan Australia tercatat sekitar 200 orang nelayan yang tertangkap di Australia: mayoritas orang Papua dan lebih khusus lagi adalah nelayan dari Kabupaten Merauke.

KSAU Marsekal Herman Suyitno mengatakan bahwa TNI AU akan menambah radar di berbagai tempat di Indonesia untuk memantau pesawat-pesawat yang melintas di wilayah Indonesia. "Tahun depan, kami akan menempatkan radar baru di Merauke dan mengganti radar tua di Tanjung Pinang".

30 November

Kapolresta Jayapura, AKBP Roberth Djoenso, mengatakan bahwa sebelum 1 Desember semua pihak

yang berkompeten telah sepakat dan berkomitmen untuk tidak melakukan kegiatan yang bertentangan dengan undang-undang. Untuk itu dia berharap tidak ada kegiatan masyarakat yang melanggar undang-undang sebab pihaknya akan mengambil tindakan tegas.

5 Desember

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Jayapura, Giri Hariyanto, menjelaskan bahwa keinginan 52 Warga asal Pegunungan Tengah Papua yang tergabung dalam suatu grup tari yang akan tampil pada pentas budaya Internasional di Australia tertunda karena belum mempunyai dana untuk pengurusan paspor. "Pergi ke luar negeri adalah hak setiap orang. Asalkan persyaratannya memenuhi, maka paspor akan kita buat. Jumlah mereka 70 orang berarti bisa satu kapal, bila mereka berangkat seperti kasus Fera Kambu (salah satu 52 orang yang minta suaka) maka bisa menjadi masalah. Apakah mereka seperti itu kita tidak mengerti".

6 Desember

Rencana peningkatan status pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Merauke menjadi Pangkalan Utama (Lantamal) XI Merauke yang akan diresmikan 15 Januari 2007 mendapat dukungan penuh dari DPR Papua karena dinilai sebagai langkah maju dari pemerintah dalam meningkatkan sistem pertahanan dan keamanan di daerah ini sebagai bagian integral dari NKRI. "Kami di DPRP tentunya akan sangat mendukung peningkatan status pangkalan TNI Angkatan Laut di Lanal menjadi Lantamal," jelas ketua Komisi A (membidangi pertahanan dan keamanan) DPRP Yance Kayame.

9 Desember

Dua aparat menjadi korban mereka adalah Serda Joko Susanto dari Kopasus dan Tobias Sirken (Purnawirawan) TNI-AD Koramil Mulia keduanya tewas di lereng gunung Pomo Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya. Saat penembakan terjadi pencalonan atau pendeklarasian Lukas Enembe dan Hanock Ibo sebagai bakal calon (Balon) Bupati dan Wakil Bupati 2007 – 2012 oleh Koalisi Pembaruan Puncak Jaya. Bunyi tembakan itu terjadi kira-kira jarak 3 Km dari tempatnya pendeklarasian calon ini.

10 Desember

Jajaran Kodam XVII/Trikora menduga pembunuh Serda Joko Susanto (anggota Satgas Kopassus) dan Tobias Sirken (Purnawirawan) TNI-AD Koramil Mulia Kabupaten Puncak Jaya dilakukan oleh TPN/OPM pimpinan Goliat Tabuni. Hal itu dikatakan Kepala Penerangan Kodam Kapedam) XVII/ Trikora Letkol Inf. Imam Santosa. Dengan peristiwa ini pihaknya akan melakukan penyelidikan mendalam serta melakukan pengejaran terhadap anggota separatis yang telah berani menyerang aparat tersebut. Dari polda Papua Direktur Reserse dan Kriminal Polda Papua Kombes Polisi Paulus Waterpauw mengatakan untuk membantu proses penyelidikan pihaknya akan mengirim tim untuk *memback up* Polres Puncak Jaya. Bahkan untuk mengantisipasi perkembangan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) pihak Polda Papua akan mengirim tambahan Pasukan ke Mulia seperti yang diperintahkan Kapolda.

11 Desember

Komandan Korem 173/PVB Kolonel Inf Herman Terdez mengatakan saat ini Muspida Kabupaten Puncak Jaya dan sejumlah tokoh masyarakat tengah melakukan negosiasi dengan kelompok Goliat Tabuni yang diduga sebagai pelaku pembunuhan satu anggota Kopasus dan pensiunan TNI-AD. Danrem mengatakan meskipun dalam insiden ini mengakibatkan tewasnya anggota TNI namun penanganan kasus ini diserahkan sepenuhnya kepada Kepolisian dalam hal ini Polres Puncak Jaya. Katanya antara korban dan pelaku sudah kenal baik namun ia tidak secara pasti penyebab terjadinya insiden ini. "Mengenai senjata yang digunakan kami juga belum dapat memastikannya namun mungkin senjata yang digunakan cukup lama".

13 Desember

Anggota Brimob bernama Briptu Yosafat yang sedang patroli malam diserang dan senjata apinya dirampas dan dilarikan oleh 2 orang penyerang. Kapolres Puncak Jaya AKBP Yacobus M mengatakan, "Ciri-ciri para pelaku itu berwajah brewokan. Ini menandakan mereka berasal dari gunung dan saya langsung memimpin pengejaran terhadap kedua pelaku bersama ketiga temannya itu dengan mengerahkan semua kekuatan yang ada, baik dari polres maupun dari satuan TNI". Atas kejadian itu Briptu Yosafat langsung dilarikan ke RSUD Mulia untuk diberikan pertolongan pertama atas luka di kepalanya. Korban mendapat 5 jahitan dan masih menjalani perawatan intensif. Situasi dan kondisi Kota Mulia dilaporkan aman pada siang hari dan kondusif, warga dapat melakukan aktivitas seperti biasa, tetapi pada malam hari aparat petugas melakukan patroli untuk melakukan pengamanan juga karena akan ada pemilihan bakal calon dan Wakil Bupati Puncak Jaya 2007-2012.

Kasus yang terjadi di Mulia Kabupaten Puncak Jaya mendapat perhatian dari Gubernur Papua Barnabas Suebu yang mengatakan bahwa selain menyesalkan peristiwa itu, pihaknya juga telah mengambil langkah-langkah untuk menindak lanjuti dengan melakukan pendekatan yang melibatkan unsur-unsur terkait dan mencoba mendekati pihak-pihak di daerah itu, khususnya yang terlibat agar tidak terus terlibat dalam gerakan separatis dan ingin mengajak mereka untuk bersama-sama membangun Papua. Tetapi, ia menegaskan pelaku yang menyerang akan ditindak lanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku.

TNI yang bertugas di Korem 174 Anim Tiwaninggap yang meliputi Merauke, Boven Digoel, Mappi dan Asmat tetap diminta untuk waspada terhadap gerakan separatis yang mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini ditegaskan oleh Danrem 174 Kolonel CZI Nenga Widana. Pihaknya menjelaskan bahwa merupakan tugas TNI dan seluruh masyarakat untuk menjaga keutuhan Negara RI dari Sabang sampai Merauke. Katanya tidak ada peningkatan pengamanan khusus yang dilakukan TNI AD, tetapi yang dilakukan merupakan pengawasan rutin. Danrem mengatakan juga bahwa TNI tidak termakan dengan perayaan 1 Desember, 10 Desember dan 14 Desember, tapi yang dilakukan TNI adalah dengan terus melakukan pendekatan dan pembinaan masyarakat dan pembinaan wilayah.

Jajaran Polresta Jayawijaya menggelar acara pisah sambut mantan Kapolres Jayawijaya AKBP Fritz Kaiway dengan yang baru AKBP Marolop Manik acara ini dilakukan di Aula Markas Komando (Mako) Polres. Acara ini dihadiri oleh Asisten II Benyamin A, Dan Yon 756 WMS Letkol Inf Agus Setiawan, Kasdim 1702 Mayor Viktor Tampubolon para perwira dan bintanga jajaran Polres Jayawijaya, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat serta ibu-ibu Bhayangkari.

14 Desember

Pejabat Bupati Puncak Jaya Frans Kristantus mengatakan sejalan dengan proses pendekatan secara persuasif, diharapkan agar tidak ada penambahan pasukan baik dari TNI maupun Polri. Sejak kemarin pihaknya telah melakukan koordinasi dengan institusi terkait, yakni TNI dan Polri agar sepakat untuk melakukan pendekatan secara persuasif. Pejabat Bupati Frans khawatir jika nanti ada penambahan pasukan baik itu TNI maupun Polri ke Puncak Jaya, masyarakat akan menjadi khawatir dan takut akan ada perang. Bupati mengakui bahwa aparat di Mulia mulai dari Pemerintah, TNI dan Polri saat ini masih melakukan *sweeping* KTP pada setiap penduduk. "Jangan sampai ada orang luar yang tidak punya identitas atau penyusupan dari luar".

Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Papua Brigjen Polisi Max Donald Aer dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi namun karena kejadiannya pagi-pagi yaitu sekitar pukul 5.30 wit hingga kini masih kesulitan mencari saksi-saksi yang melihat kejadian ini, mungkin ada masyarakat yang melihat kejadian ini, tetapi enggan untuk memberikan keterangan, dalam kasus ini anggota Brimob yang menjadi korban akan tetap di periksa sebagai saksi. Saat ditanya apakah pelaku yang brewokan itu adalah TPN/OPM pihaknya belum bisa memastikan. Dikatakan "orang brewokan itu belum tentu ia TPN/OPM, sebab sebagian besar masyarakat di Puncak Jaya adalah brewokan. Ini yang membuat kesulitan.

Pernyataan Maskal TNI Djoko Suyanto agar Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Papua diwaspadai karena ada pihak-pihak tertentu yang menjual isu HAM untuk kepentingan tertentu ditanggapi oleh Direktur Kontras Papua Pieter Ell. Pihaknya menegaskan jika panglima punya data LSM yang terindikasi berlandung di balik penegakan HAM sebaiknya disebutkan saja namanya. Dengan demikian LSM yang bersangkutan bisa memberikan klarifikasi. LSM merupakan suatu komponen masyarakat yang biasa bergerak dibidang HAM tentunya berharap supaya kasus-kasus yang ada diselesaikan secara tuntas. "Kami harapkan supaya masyarakat mendapat keadilan, sebab sampai saat ini masih banyak pelanggaran HAM yang belum diselesaikan secara tuntas".

15 Desember

Kapolres Puncak Jaya AKBP Yakobus Marjuki mengatakan meski situasi kondusif, tetapi malam hari kelompok TPN/OPM yang berada di gunung saling mengeluarkan kode cahaya dengan senter. Terkait dengan perampasan senjata terhadap seorang anggota Brimob Briptu Yosafat pihaknya masih terus berupaya melakukan komunikasi dengan kelompok TPN/OPM yang diduga merampas senjata. Tim negosiasi mudah-mudahan bisa berkomunikasi dengan kelompok yang diduga melakukan perampasan, sehingga diharapkan mereka mau mengembalikan senjata yang dirampas.

Kasus Mulia ini mendapat tanggapan dari Mahasiswa Puncak Jaya Se-Jawa Bali (Ipmapuja). Ipmapuja mengatakan peristiwa itu berkaitan dengan kepentingan politik lokal yang dimainkan menjelang pilkada. Katanya bukan tuduhan, tetapi karena sejak lahirnya Kabupaten Puncak Jaya terjadi seperti ini. Juga mereka berharap untuk tidak ada tudingan atau membenarkan permasalahan membuat masyarakat ketakutan berkepanjangan. Untuk perang yang kedua adalah tanda untuk perdamaian. Kata Kapolres bahwa meski bersifat simbol kita belum melakukan komunikasi langsung dengan kelompok itu yang jelas kita akan melakukan pendekatan persuasive agar perdamaian itu bisa terwujud.

17 Desember

Terjadinya dua kasus di Mulia akan dilaporkan Ke Menkokesra Aburizal Bakri, karena masalah di Mulia bukan hanya masalah keamanan, tetapi juga masalah kesejahteraan. Hal itu diungkapkan pejabat Bupati Puncak Jaya Frans Kristantus menanggapi belum tuntasnya penanganan kasus Puncak Jaya. Karena itu, dirinya berjanji akan membawa permasalahan ini ke Menkokesra. Katanya masalah kasus Puncak Jaya bukan masalah daerah, tetapi juga masalah pemerintah Pusat sebab masalah tersebut tidak terlepas dari Kesejahteraan masyarakat di daerah pegunungan

19 Desember

Perkembangan kasus yang terjadi di Mulia membuat banyak pihak harus berspekulasi tentang kejadian pembunuhan seorang kopasus dan seorang purnawirawan TNI – AD maupun kasus perampasan senjata milik Anggota Brimob. Perkembangan baru yang terjadi bahwa terjadi pemasangan simbol-simbol berupa pohon keladi muda dan pohon pisang muda di jembatan yang letaknya di pinggir gunung tidak jauh dari kota Mulia, Ibukota Puncak Jaya. Hal tersebut diungkapkan oleh Kapolres Puncak Jaya AKBP Yakobus Marjuki bahwa simbol itu diketahui oleh warga sekitar pukul 06.00 Wit saat warga hendak pergi ke kebun. Untuk itu, saya sudah meminta pendapat orang yang intinya ada dua versi: dari tokoh adat bahwa hal itu adalah tanda.

Ketua DPRD Puncak Jaya, Timotius Murib meminta Polri dan TNI serius menangani kasus yang terjadi di Puncak Jaya, mulai dari kerusuhan dan pembakaran kantor DPRD serta sejumlah kantor Pemerintah lainnya pasalnya pasca kerusuhan dan pembunuhan anggota TNI ini membuat pelayanan masyarakat di Kabupaten Puncak Jaya tidak berjalan dengan normal. Harapannya bahwa pihak TNI dan Polri tidak membiarkan hal ini berlarut-larut karena berbagai kasus di Puncak Jaya yang telah menelan korban ini sebenarnya sudah ada indikasi kalau didalangi oleh aktor intelektual yang mungkin sudah diketahui oleh TNI dan Polri. Ia juga menegaskan bahwa semua warga negara tidak ada yang kebal hukum.

21 Desember

Pengamanan diperketat di bandara Mulia, demikian diungkapkan oleh AKBP Yakobus Marjuki. Secara umum Kota Mulia aman, kami lebih memperketat pengamanan di bandara Mulia sebagai tempat masuk keluarnya pesawat yang membawa penumpang dan barang di bandara. Kami menempatkan personil yang ada, bahkan saya yang pimpin langsung ke lokasi. Kewaspadaan dilakukan di bandara antara lain melakukan pemeriksaan bagi setiap penumpang yang datang, setiap pesawat datang, kami periksa baik itu orang maupun barang bawaannya. Selain itu, Gubernur Papua Barnabas Suebu mengatakan bahwa ketegangan itu tak berlarut-larut tapi sebaliknya harus segera diakhiri. Juga gubernur mengatakan bahwa sebagai pemerintah daerah kita bekerja sama dengan aparat keamanan teorinya menarik menarik benang dari tepung. Ini penting benang itu adalah mereka yang mengacau, tepung itu rakyat tidak bersalah. Jadi jangan benangnya tidak ditarik lalu tepungnya yang dirusak. Artinya rakyat yang tidak bersalah justru menjadi sasaran.

23 Desember

Meski Kota Mulia dikatakan aman, ketakutan masih menghantui aparat dan masyarakat di sana. Kapolres Puncak Jaya AKBP Yakobus Marjuki tak membantah kondisi keamanan di wilayahnya itu. Menurutnya kondisi keamanan sangat kondusif namun juga diakui bahwa ada beberapa orang yang diduga sebagai TPN/OPM sengaja menakut-nakuti dengan sengaja mengacung-acungkan senjata di atas gunung. Menurut Kapolres tindakan TPN/OPM sudah melewati batas sebab selain mengganggu sistem keamanan yang selama ini terbina dengan baik, juga mengganggu sistem penerbangan secara nasional. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan tersebut Kapolres selalu mengingatkan kepada pilot pesawat agar saat terbang atau mendarat lewat celah gunung tersebut segera menambah ketinggian, ini untuk menghindari jarak tembakan yang dilakukan oleh TPN/OPM. Hal lain yang telah dilakukan Polres yaitu dengan menutup kota dan menempatkan personil dari unsur TNI dan Polri di pos-pos penjagaan.

Wakapolda Papua Brigjen Pol.Drs. Max Donald Aer mengatakan Selasa siang di Mulia masih terdengar bunyi tembakan dari bawah yang seolah-olah tembakan tersebut diarahkan ke Pesawat Trigana yang saat itu dalam posisi terbang dari Bandara Mulia, katanya ada peluru yang nyaris kena ke pesawat itu. Artinya bahwa kelompok TPN/OPM masih berada di lokasi dan tidak jauh dari Kota Mulia, Puncak Jaya. Kami tidak bisa menyergap kelompok itu, karena ada bersama masyarakat sehingga masyarakat akan menjadi korban. Penjelasan juga bahwa sekitar pukul 05.00 WIB ada yang diduga sebagai Kelompok TPN/OPM yang pura-pura turun, lalu mereka naik lagi ke gunung

26 Desember

Situasi di Mulia mulai tampak kondusif. Menurut Kapolres Puncak Jaya pengibaran bendera yang dilakukan oleh TPN/OPM kali ini disertai tembakan dan teriakan yel-yel untuk menantang aparat. Mereka sengaja melakukan penembakan untuk menakuti masyarakat dan memancing aparat TNI dan Polri. Sejak Senin kemarin tidak segencar saat mereka membunuh 1 anggota pensiunan TNI dan 1 anggota kopassus.

Pengamanan PAM obyek vital nasional PT Freeport Indonesia resmi dilakukan satuan tugas pengamanan (Satgaspam) Amole II, merupakan pasukan organik yang ada di Papua yang terdiri dari Brimob, Polisi dari Polres Mimika dan TNI. Mereka menggantikan 600 personil Satgaspam Amole I yang beranggotakan Brimob asal Markas Besar Kelapa Dua Kendung Haling Jakarta Pusat. Serah terima di cargodog Low Land PT FI Timika. Penggantian ini sesuai dengan keputusan Kapolri melalui surat perintah Kapolda Papua Irjen Pol Tommy T Jacobus. Satgaspam Amole II akan dipimpin oleh AKBP Wira Wibawa dan Watgasatgasnya AKBP Irianto. Pengamanan Obvitnas PT FI selanjutnya akan ditangani oleh tiga Satuan Setingkat Kompi (SSK) yang terdiri dari 300 Personil Brimob Papua dari Detasemen A Jayapura dan Detasemen B Timika ditambah dua SSK personil Polres Mimika termasuk personil organik satuan TNI di bawah Kodam XVII/Trikora serta 200 personil Batalion Infantri Eme Neme Kangasi (ENK) 754 Timika. Kata Kapolda Papua Tommy T. Jacobus dilanjutkan

operasi Amole I ke Amole II berdasarkan hasil evaluasi pengamanan PT FI masih membutuhkan bantuan pengamanan dari Polri. Dari evaluasi Amole I ada beberapa penempatan pos-pos perlu pengaturan ulang, jumlah personil Brimob pada Amole I 1098 personil; 600 personil Brimob dari Jakarta sisanya TNI, maka Brimob yang menggantikan dari Polda Papua hanya 300 personil (3 SSK), 2 SSK dari Polres Mimika dan untuk TNI hanya 200 personil.

27 Desember

Menurut Kapolres Puncak Jaya AKBP Yakobus Marjuki terkaitnya dugaan tertembaknya dua orang anggota TPN/OPM, pihak TNI masih melakukan pengejaran terhadap kelompok TPN/OPM yang saat ini masih bersembunyi di hutan. Kata Kapolres Kepolisian sendiri masih tetap melakukan pengamanan di Kota Mulia dan tetap waspada bila sewaktu-waktu terjadi gejolak atas insiden berdarah itu. Meski demikian situasi dan kondisi Kota Mulia masih aman dan kondusif. Sejak perayaan Natal 25 Desember tidak terjadi gejolak sedikit pun. Masyarakat di Kota Mulia mendukung sepenuhnya tindakan aparat untuk memulihkan Kota Mulia seperti semula. TNI terus berupaya melakukan pengejaran terhadap kelompok TPN/OPM, namun sampai saat ini belum membuahkan hasil. Kata Kapolres, sehari sebelum perayaan Natal 24 Desember aparat dengan terpaksa harus menembak kerumunan massa yang diduga anggota TPN/OPM. Mereka terpaksa ditembak aparat, karena dianggap mengganggu ketenteraman masyarakat dengan mengibarkan bendera Bintang Kejora sambil mengeluarkan tembakan, aparat pun merasa ditantang, sehingga melakukan pengejaran dan diduga kuat sedikitnya ada 2 atau 4 dari kelompok tertembak.

Kasus penembakan di Mulia dibantah oleh Komandan Korem (Danrem) 173/Praja Vira Braja, Kolonel Inf. Herman Tedez. Ia menjelaskan bahwa sekelompok orang diduga sebagai kelompok sipil bersenjata mengibarkan Bintang Kejora, namun tidak lama kemudian mereka menurunkan kembali, sehingga sangat tidak mungkin kalau TNI melakukan pengejaran, apalagi menembak. Katanya tidak ada penembakan dan sampai saat ini TNI yang bertugas di Mulia tidak melakukan pengejaran apalagi menembak. Danrem mengatakan penyerangan yang dilakukan bukan dari kelompok Goliat Tabuni tetapi dari kelompok dari luar yang datang mengacaukan keadaan di Mulia. Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/Trikora Letkol. Inf Imam Santosa belum bisa memastikan itu sebelum adanya identifikasi, posisi TNI hanya siap *back-up* Polisi, jika dibutuhkan, menurutnya dalam kondisi ini ada pada situasi Tertib Sipil sehingga kami lebih menyerahkan kepada kepolisian. Ia menjelaskan bahwa peristiwa yang dilakukan oleh gerombolan TPN/OPM ini adalah kelanjutan dari peristiwa sebelumnya yang menewaskan anggota TNI sehingga menurutnya dengan sengaja anggota TPN/OPM melakukan aksi untuk mencari masalah dengan anggota TNI/Polri.

Direktur ELSHAM Papua Drs. Aloysius Renwarin mengatakan kondisi di Puncak Jaya saat ini perlu mendapat perhatian dari semua pihak, terutama pemerintah Provinsi Papua sehingga terhindar dari potensi pelanggaran HAM akibat kasus tersebut saat mulai pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT), pengibaran Bintang Kejora, penembakan dua aparat TNI dan penembakan TPN/OPM. Ini diungkapkan saat konferensi pers yang digelar di Kantor ELSHAM Papua. Hal ini sangat penting supaya tidak terjadi korban pada masyarakat sipil yang tidak terlibat pada kasus tersebut.

A.3 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

3 Oktober

Gubernur Papua Barnabas Suebu SH, berkomitmen untuk membersihkan tubuh Pemerintahan Provinsi Papua, khususnya menyangkut penyelewengan uang negara. Untuk itu Gubernur menugaskan BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan) Papua untuk melakukan pemeriksaan di beberapa instansi. Hasil sementara penyidikan itu menunjukkan adanya dugaan penyelewengan dana Otsus sebesar 640 miliar yang tidak diakomodir di dalam RASK APBD 2006.

4 Oktober

Kepala Dinas Perindustrian dan Koperasi Manokwari, Stefanus Selang melarang keras Minuman keras (Miras) dan minuman lokal (Milo) yang beralkohol di Manokwari. Batas 30 November 2006 merupakan batas akhir penjualan Miras dan Milo, dan pada 01 Desember 2006 Miras dan Milo dihentikan untuk beredar sesuai keputusan Bupati Manokwari No. 13 Tahun 2006.

10 Oktober

Direktur Eksekutif ICS Papua, Budi Setyanto, SH menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua tidak transparan mengenai dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Tahun Anggaran (TA) 2006 sebesar Rp. 4,2 triliun. Untuk itu Direktur Eksekutif *Institute Civil Society* (ICS) Budi Setyanto, SH berencana untuk menggugat Pemprov Papua, karena dokumen APBD adalah dokumen publik yang seharusnya disosialisasikan kepada masyarakat.

Bupati Yahukimo Ones Pahabol, SE MM melantik 42 kepala distrik. Ke 43 kepala distrik yang akan dilantik tersebut sebagai berikut:

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 5. Kepala Distrik Mugi | 22. Kepala Distrik Musaek |
| 6. Kepala Distrik Tangma | 23. Kepala Distrik Musama |
| 7. Kepala Distrik Yogosem | 24. Kepala Distrik Kayo |
| 8. Kepala Distrik Werima | 25. Kepala Distrik Soba |
| 9. Kepala Distrik Uka | 26. Kepala Distrik Ninia |
| 10. Kepala Distrik Pasema | 27. Kepala Distrik Sopaham |
| 11. Kepala Distrik Obio | 28. Kepala Distrik Pilipuk |
| 12. Kepala Distrik Silimo | 29. Kepala Distrik Holuwon |
| 13. Kepala Distrik Amungma | 30. Kepala Distrik Silimo |
| 14. Kepala Distrik Dekai | 31. Kepala Distrik Kwimka |
| 15. Kepala Distrik Lolak | 32. Kepala Distrik Uldama |
| 16. Kepala Distrik Kabianggama | 33. Kepala Distrik Edomeh |
| 17. Kepala Distrik Soloikma | 34. Kepala Distrik Kosarek |
| 18. Kepala Distrik Koropun | 35. Kepala Distrik Yahuliambut |
| 19. Kepala Distrik Sela | 36. Kepala Distrik Obalesi |
| 20. Kepala Distrik Olamdua | 37. Kepala Distrik Seriebini |
| 21. Kepala Distrik Womela | 38. Kepala Distrik Obahag |
| 22. Kepala Distrik Lamda | 39. Kepala Distrik Walma |
| 23. Kepala Distrik Suntamon | 40. Kepala Distrik Panggema |
| 24. Kepala Distrik Niksan | 41. Kepala Distrik Nalca, dan |
| 25. Kepala Distrik Lelambu | 42. Kepala Distrik Samenage |

Gubernur Papua Barnabas Suebu, SH ingin menyelesaikan masalah Suru-suru dengan damai dengan memanggil Bupati Kabupaten Yahukimo Ones Pahabol, SE MM dan Bupati Kabupaten Asmat Yuven Biakai dan DPRD-nya untuk memberikan arahan agar menyelesaikan persoalan ini dengan kepala dingin tanpa kekerasan apalagi konflik.

21 Oktober

Gubernur Barnabas Suebu, SH berharap dalam waktu dekat atau paling lama bulan Desember Bupati Kabupaten Mappi yang definitif sudah bisa dilantik dan masyarakat sudah memiliki pemerintahan yang definitif, karena sudah ada keputusan MA.

30 Oktober

Demo Damai dilakukan oleh ratusan warga dan mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Papua Selatan di lapangan Pemda Merauke, Jln. Brawijaya. Mereka mendukung pasangan calon Bupati Mappi, Feri Kamkopimu dari 4 kabupaten yakni; Kabupaten Merauke, Mappi, Asmat, dan Boven Digul. Seluruh warga dan mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Papua Selatan itu mendukung penuh Keputusan Pleno KPUD Kabupaten Mappi tertanggal 15 Juli 2005 dan menolak tegas keputusan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 Agustus 2005.

Terdapat 8 poin termuat dalam pernyataan sikap yang dibacakan oleh Katerina Yermogoin antara lain mendukung hasil keputusan KPUD Kabupaten Mappi pada 15 Juli 2005 tentang penetapan Bupati dan Wakil Bupati Mappi periode 2005-2010. Pernyataan sikap lain adalah orang yang menjadi Bupati Mappi adalah orang asli Mappi dari 6 distrik. Selain itu mereka juga meminta peninjauan kembali hasil keputusan Pengadilan Tinggi Jayapura tertanggal 11 Agustus 2005 dan keputusan Mahkamah Agung Nomor 03/PK/Pilkada 2005 tanggal 26 Januari yang menurut masyarakat dan mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Papua Selatan ini menilai tidak memperhatikan aspirasi masyarakat secara baik dan benar serta sangat bertentangan dengan azas Luber Pemilu.

9 November

Audit Badan Pemeriksa Keuangan Daerah (BPKP) Papua memasuki tahap akhir pemeriksaan keuangan daerah tahun 2006. Gubernur Provinsi Papua Barnabas Suebu mengatakan, "Sejak menjabat sebagai Gubernur, saya telah meminta BPKP melakukan audit penggunaan dana APBD tahun 2006. Audit ini penting untuk mengetahui perencanaan, penggunaan, supervisi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan".

10 November

Gubernur Provinsi Papua, Barnabas Suebu melakukan perjalanan ke luar negeri mendapat tanggapan serius dari Dewan Adat Papua. Ketua Pemerintahan Adat Papua (DAP) Forkorus Yaboisembut, SPd, mengatakan, "Kunjungan ke luar negeri hanya memboroskan anggaran dan membuang-buang waktu. Lebih baik Gubernur tinggal di Papua dan mengunjungi masyarakat di kampung-kampung".

Situasi politik di Puncak Jaya memanas menjelang pelaksanaan Pilkada Kabupaten Puncak Jaya. Menyikapi hal ini DPRD Kabupaten Puncak Jaya membentuk Panitia Khusus (Pansus) Pilkada sebagai pelaksana dan menetapkan satu syarat khusus yakni calon harus putera daerah. Ketua DPRD Kabupaten Puncak Jaya Timotius Murib mengatakan Pilkada Puncak Jaya merupakan Pilkada pertama yang berdasarkan UU No. 21 Tahun 2001, pasal 20 ayat 1, huruf s. Meski belum ada Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) dan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) yang mengatur tentang putera asli dalam pencalonan Bupati dan Wakil Bupati, namun hal ini sudah mendapat rekomendasi Majelis Rakyat Papua (MRP). Sementara itu, salah seorang bakal calon yang tidak menerima kriteria yang ditetapkan DPRD Kabupaten Puncak Jaya, Drs. Elly Renmaur dan Drs. Baharudin Wakerkwa sangat menyesalkan sikap DPRD Puncak Jaya yang dinilai melakukan intervensi terhadap KPUD Puncak Jaya.

Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi Erry Ryana Hardjapamekas, menyatakan siap membantu Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program Reformasi (UKP3R) dalam mengatasi berbagai hambatan. Dikatakannya UKP3R lahir karena usul KPK untuk merformasi birokrasi sebagai bagian penting upaya pencegahan korupsi.

12 November

Pilkada Kabupaten Paniai yang dimenangkan pasangan Naftali Yogi-Derek Pakage dinilai oleh pasangan yang kalah belum final. Karena itu mereka menggugat putusan pleno KPU, tetapi, Ketua Himpunan Mahasiswa Paniai se-Indonesia, Laurensius Kadepa mengatakan Pilkada langsung yang pertama kali dilakukan sudah berjalan dengan baik, jadi diharapkan proses pelantikan Bupati berjalan sesuai rencana. Hal senada juga diungkapkan oleh Forum Pemantau Independen dari kalangan mahasiswa, Naftali Koroba dan Samuel TY. Yogi bahwa Pilkada sudah berjalan dengan baik maka pelantikan harus berjalan sesuai rencana.

16 November

Menanggapi demo yang dilakukan oleh Gerakan Mahasiswa dan Masyarakat Paniai (GEMMPUR) yang menuntut Gubernur Provinsi Papua untuk melantik Bupati terpilih Naftali Yogi – Derek Pakage, Ketua Dewan Adat Paniai, John Gobay mengatakan semua pihak harus bersabar sebab Pilkada

Paniai berada dalam sengketa. Dan apa pun yang diputuskan pengadilan nantinya harus dihargai sebab mengikat dan bersifat tetap.

17 November

Lima komisi DPR Papua menilai kinerja eksekutif belum maksimal bahkan minus, hal ini dikemukakan saat menanggapi LKPJ Gubernur Provinsi Papua Tahun Anggaran 2006/2007. Sementara itu, Wakil Gubernur Papua Alex Hesegem, SE mengatakan bahwa apa yang dinilai oleh anggota dewan adalah wajar karena waktu penetapan anggaran dan pelaksanaannya hanya beda empat bulan sehingga pekerjaan fisik tidak terlaksana semuanya.

20 November

Koalisi Pembaharuan Puncak Jaya (KPPJ) terdiri dari Partai Golkar, PKB, PBB, PDS, PDK, PSI, PBSD, PKPI dan Partai Demokrat yang mengusung pasangan Lukas Enembe, SIP-Drs. Henock Ibo menunda pendaftaran calon Bupati karena kecelakaan pesawat Trigana Air Service di Pegunungan Puncak Jaya. "Penundaan dilakukan sebagai wujud penghormatan kepada para korban kecelakaan", kata Lukas Enembe, SIP.

23 November

Fraksi Partai Damai Sejahtera dan Fraksi Gabungan menolak Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2006. Fraksi Partai Damai Sejahtera melalui pelapor Y. Rumbairussy, S.Sos mengatakan pihaknya tidak menerima rencana Perdasi APBD Perubahan 2006 untuk membiayai kegiatan senilai Rp. 192.582.748.000 yang diusulkan oleh pihak eksekutif untuk menjadi Perdasi APBD 2006 dan meminta dana tersebut dimasukkan sebagai saldo awal APBD Provinsi Papua 2007. Sementara pelapor Fraksi Gabungan Arnold Walilo, S.Pd mengatakan menolak pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2006, karena pihak eksekutif belum memberikan data tentang penggunaan APBD Perubahan 2006 serta daftar evaluasi kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan pada tahun 2006 untuk dialihkan pada Tahun Anggaran 2007.

28 November

Setelah gugatan 2 pasangan calon bupati (Cabub) dan calon wakil bupati (Cawabub) Kabupaten Paniai (pemohon) terhadap hasil rekapitulasi penghitungan suara 31 Oktober lalu terhadap Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Paniai (termohon) di Pengadilan Tinggi (PT) Jayapura, memutuskan KPUD sebagai termohon tidak terbukti bersalah. Dengan demikian, rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan KPUD sebelumnya, di mana pasangan Naftali Yogi/Derek Pakage sebagai peraih suara terbanyak tetap dinyatakan sah.

30 November

Mantan Bupati Kabupaten Puncak Jaya Drs. Elieser Ranmaur gerah dengan kebijakan KPUD dan DPRD, yang memberikan kesempatan atau menunggu hasil verifikasi DPRD Puncak Jaya terhadap bakal calon bupati dan wakil bupati. Ia melihat hal ini untuk menghalangi dirinya yang hendak maju sebagai salah satu kandidat dalam pilkada di daerah tersebut. Ia akan menempuh jalur hukum terhadap kedua lembaga itu yang telah menyalahi aturan. "Yang pasti bahwa upaya hukum sudah siap dan tinggal kami ajukan dalam waktu dekat ini. Hal ini kami tempuh karena pihak KPUD tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan PP No. 6 Tahun 2006 dan UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah" kata Ketua Tim Kuasa Hukum Elieser Renmaur, Pieter Ell. Pihaknya juga meminta supaya KPUD Provinsi Papua mengambil sikap tegas terhadap keputusan yang diambil oleh KPUD Kabupaten Puncak Jaya bahkan dilihat dari pelanggaranannya, tepat dikatakan kalau KPUD dibubarkan saja. Terkait dengan itu juga Pieter Ell meminta agar ada perhatian serius dari Gubernur Provinsi Papua Barnabas Suebu untuk memberikan himbauan pasalnya dikhawatirkan jika kebijakan yang diambil KPUD dan DPRD itu dapat menimbulkan konflik antara masyarakat sendiri.

Bupati Paniai terpilih, Naftali Yogi, mengajak empat kandidat lain untuk bersama-sama membangun Paniai setelah pada tgl. 28 November 2008, Pengadilan Tinggi Papua memutuskan bahwa KPUD

Paniai tidak bersalah sehingga keputusan perhitungan suara tetap dimenangkan pasangan Naftali Yogi dan Derek Package.

Kabag Pemerintahan Kabupaten Asmat, menyayangkan ketidakhadiran Kabag Pemerintahan Kabupaten Yahukimo dalam Rakor Penataan Kawasan Perbatasan dan Identifikasi serta Verifikasi Data Geografis Daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Papua karena dalam rakor inilah sengketa Suru-suru dibahas. Karena itu pihaknya mendesak Kasubdin Tata Pemerintahan Provinsi Papua, Arles Manik, agar Pemprov Papua membuat konsep yang tegas mengenai keberadaan wilayah Suru-suru sehingga tidak terjadi polemik bahkan menjadi konflik horizontal yang berkelanjutan.

1 Desember

Hasil pemeriksaan (audit) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Provinsi Papua yang terkesan lambat diumumkan. Hal ini mendapat tanggapan dari Sekretaris Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Papua R Ham Pagawak bahwa sudah saatnya BPK segera mengumumkan hasil pemeriksaan yang dilakukan kepada publik melalui media masa, sebab saat ini adalah era transparan. Ada penilaian bahwa selama ini BPK terkesan menutupi hasil auditnya terhadap sejumlah pejabat. Lebih baik menghukum satu orang pejabat dari pada mengorbankan banyak rakyat.

4 Desember

Ketua Panitia Angket DPRD Kabupaten Yapen Waropen, Klemens Waromi, mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil audit tersebut, ditemukan penyimpangan dana sebesar Rp. 10 milyar oleh Bupati Yapen Waropen, Soleman Daud Betawi. Temuan ini didasarkan pada setoran ke rekening pribadi atas nama bupati sebesar Rp. 9,2 milyar di rekening Bank Mandiri dari jumlah setoran Rp. 29 milyar dari Kas Daerah dan Rp. 1,330 milyar di Rekening BRI Cabang Serui dari jumlah sebesar Rp. 3,370 milyar dari bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Temuan ini telah diserahkan kepada Gubernur Papua dan KPK untuk ditindaklanjuti.

Di Gedung Negara, Jayapura, Gubernur Papua, Barnabas Suebu, melantik dua penjabat bupati, yakni Robert Frans Kristantus sebagai Penjabat Bupati Puncak Jaya dan Zubeir D. Hussein sebagai Penjabat Bupati Paniai.

Pieter Ell SH selaku kuasa hukum bakal calon bupati Puncak Jaya Elieser Renmaur, telah menyerahkan surat gugatan terhadap KPUD Puncak Jaya kepada PTUN Jayapura. Dalam surat tersebut pihaknya masih memberikan waktu tiga hari agar KPUD merevisi SK No. 01 sehingga sesuai dengan PP No. 6/2005 dan UU No. 32/ 2004.

5 Desember

Forum Solidaritas Masyarakat Papua Jakarta dipimpin Ketuanya, Yan Piet Sada, berunjuk rasa di depan kantor KPK di Jakarta dan meminta agar KPK menyelidiki dugaan korupsi Dana Otsus, ABT, dan DAU Bupati dan Wakil Bupati Paniai Periode 2001-2006. Pihaknya menduga dana yang dikorupsi mencapai Rp. 190 milyar.

8 Desember

Pasangan Enembe dan Ibo berkampanye di Kampung Kulume, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya dalam orasi di depan ribuan massa, Enembe mengatakan sudah saatnya orang pegunungan tampil menjadi pemimpin rakyatnya di daerahnya sendiri. Dalam orasinya Enembe mengatakan bahwa antara pemimpin dan rakyat harus bersatu dan membangun kebersamaan, menjalin persatuan dan kesatuan bangsa sebagai awal dari tujuan yang diinginkan yakni mencapai hidup yang sejahtera.

DAFTAR NAMA KANDIDAT CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PUNCAK JAYA PERIODE 2007-2012

NO.	NAMA PASANGAN
1.	Elvis Tabuni dan Pdt. Paul Tabuni

2.	Yakob Yikwa dan Drs. Jason Muabuay
3.	Lukas Enembe, S.IP dan Drs. Henock Ibo
4.	Elieser Renmaur dan Drs. Baharudin Wakerkwa

11 Desember

Giliran Pasangan Renmaur dan Wakerkwa yang mendaftar. Pasangan calon bupati dan wakil bupati periode 2007-2012 diarak ribuan massa pendukungnya dari Kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Puncak Jaya menuju Kantor KPUD yang jaraknya sekitar 1 km. Arak-arakan ini mendapat pengawalan dari pihak Kepolisian setempat yang dipimpin langsung Kapolres Puncak Jaya AKBP Yakobus Marjuki. Berita acara ini langsung ditandatangani oleh ketua DPC PDI Perjuangan Puncak Jaya, Alus UK Murib. Kata Renmaur, masyarakat jangan terprovokasi dengan berbagai isu yang selama ini mau menggagalkan kami untuk tidak bisa maju, dengan pendaftaran ini ada tekad kami untuk membangun Puncak Jaya. Kami juga melakukan pendaftaran ini untuk menjawab keraguan masyarakat yang masih ragu kami maju, dan dukungan masyarakat memang luar biasa sekali. Sepanjang jalan mereka keluar, semua keluar dari rumah di setiap mata jalan dan berkerumun untuk mendengarkan orasi politik. Kami berani mencalonkan diri menjadi calon bupati bukan karena ambisi, namun desakan dari komponen masyarakat Puncak Jaya.

14 Desember

Pasangan terpilih Bupati dan Wakil Bupati Mappi, Aminadap dan Stevanus Kaisma resmi dilantik oleh Gubernur Papua Barnabas Suebu. Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Mappi periode 2006-2011 berlangsung dalam sidang Paripurna Istimewa DPRD di gedung DPRD Mappi Jalan Irian. Pelantikan berlangsung sekitar pukul 13.00 WIT berjalan lancar dan sukses. Pelantikan ini juga diwarnai demo antara pihak pro dan pihak kontra. Gubernur mengatakan pelantikan Bupati harus dipandang sebagai salah satu pilar dalam upaya besar pelayanan kepada rakyat supaya sampai ke pelosok-pelosok kampung.

Adanya tuduhan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan Pusat (BPK-P) menemukan indikasi keterlibatan Dinas Pendidikan dan Pengajaran (P dan P) Kota Jayapura menggelapkan dana sebesar Rp 3 miliar pada Anggaran 2005 untuk biaya rehabilitasi gedung sekolah dibantah oleh kepala Dinas P dan P Kota Jayapura WW. Kambuaya. "Isu bahwa kami gelapkan dana pendidikan sebesar Rp 3 miliar itu tidak benar. Isu itu diungkapkan oleh oknum-oknum tertentu untuk memperkeruh suasana oleh pusat melalui departemen keuangan (Depkeu) kepada pihaknya dan telah digunakan sesuai peruntukannya dan telah dipertanggungjawabkan". Katanya dana telah dipakai untuk merehabilitasi sekolah-sekolah (SD, SMP, SMA) bahkan ada beberapa ruang kelas, hanya pihaknya lambat memasukkan pertanggungjawaban itu, sehingga dari hasil audit yang dilakukan oleh BPK-P, hasil akhirnya mengatakan Rp 3 miliar itu tidak jelas.

20 Desember

Ketua KPUD Propinsi Papua Ferry Kareth mengatakan pendaftaran calon para kandidat bupati dan wakil bupati Kabupaten Puncak Jaya yang dilakukan melalui lembaga KPUD Puncak Jaya dinilai positif dan sesuai prosedur. Katanya bahwa pendaftaran melalui KPUD setempat dan bukan melalui Pansus DPRD Puncak Jaya tidak mengacu pada SK No. 01 tanggal 20 Oktober Tahun 2006 tentang jadwal dan tahapan Pilkada yang dibuatnya. Pendaftaran melalui KPUD sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 dan PP No. 6 Tahun 2005. Ferry menghimbau seluruh komponen tetap berpegang pada aturan yang berlaku sesuai dengan wewenang masing-masing baik DPRD, Parpol, para Kandidat, KPUD, dan sebagainya.

22 Desember

Pelantikan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Jayapura, Habel Melkias Suwae dan Zadrak Wamebu, berlangsung aman dan lancar. Ada isu bahwa sekelompok masyarakat akan mencegat Barnabas Suebu di eks Lapangan Sepak Bola, agar Gubernur tidak melantik pasangan tersebut. Menurut

Kapolres AKBP Jacob Kalemang seluruh personilnya dipusatkan di daerah pelantikan yakni di Gunung Merah dengan melakukan pengamanan terbuka dan tertutup, personil lainnya ditempatkan di luar lokasi.

23 Desember

Ketua Dewan pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Propinsi Papua M. Rifai Darus menilai bahwa upaya pemberantasan korupsi di Papua selama tahun 2006 belum maksimal sehingga untuk tahun 2007 upaya pemberantasan korupsi harus lebih digalakkan lagi. Selain itu juga penjelasan Sekretaris DPD KNPI Martinus. A. Werimon mengatakan masalah Otsus bukan uang, tetapi terkait kewenangan, sehingga daerah bisa berbuat sesuatu untuk kesejahteraannya. Terkait dengan kewenangan itu ada beberapa hal yang perlu segera diubah: perlu ada perubahan kebijakan, struktural dan perilaku birokrat.

27 Desember

Jumlah fraksi di DPRD Kota Jayapura bakal bertambah, hal itu menyusul adanya kemauan dari sejumlah partai yang ingin membentuk fraksi sendiri. Hal ini mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 53 Tahun 2005 tentang pedoman tata tertib (Tatib) dewan. Dalam PP tersebut ditegaskan dalam pasal 48 ayat 4 bahwa dewan yang beranggotakan 20 hingga 35 orang diperbolehkan hanya memiliki tiga komisi dan keanggotaan satu fraksi minimal sama atau lebih. Dengan demikian, partai yang memiliki 3 kursi atau lebih memungkinkan untuk membentuk fraksi tersendiri. Kemauan teman-teman untuk fraksi baru sudah dikemukakan dalam setiap pertemuan dan sudah ada yang secara resmi memasukkan surat itu, agar tata tertib dewan diubah hal ini dikatakan oleh ketua fraksi pembaharuan DPRD Kota Jayapura. Dari 11 partai politik yang ada di Kota Jayapura yang telah memasukkan surat secara resmi untuk pembentukan fraksi sendiri adalah PKS dan PKPI sedang partai lain yang belum memasukkan yakni Partai Golkar (8 kursi), PDI Perjuangan (3 kursi), PDS (3 kursi), Partai Demokrat (3 kursi), PPP (2 kursi), PKB (2 kursi), PNI Marhaenis (1 kursi), PNBK (1 kursi) dan PSI (1 kursi).

28 Desember

Direktur Eksekutif ICS Papua, Budi Setiyanto, dan Koordinator Papua Corruption Watch (PCW) M. Rifai Darus mengatakan bahwa KPK tidak hanya membidik koruptor kelas kakap tahun 2007. Di Papua KPK tidak hanya membidik jumlah uang yang dikorupsi, namun juga membidik para pejabat BUMN dan penegakan hukum yang terlibat dalam kasus korupsi. Keduanya menilai di Papua banyak indikasi koruptor kelas kakap, namun tak satu pun yang terungkap. Karena itu, kehadiran KPK di Papua sangat dibutuhkan, sebab BPK, Bawasda dan BPKP memiliki kewenangan yang terbatas. Budi mengatakan bahwa untuk menegakkan pemberantasan korupsi di Papua, maka peran BPKP, KPK dan Bawasda sebagai auditor harus dimaksimalkan dan menjalankan tugasnya dengan benar. Kemudian hasil audit itu harus ditindak lanjuti melalui proses hukum. Artinya pihak Kepolisian, Hakim dan Jaksa harus menjalankan fungsinya secara baik dan benar. Sementara itu, koordinator PCW M. Rifai Darus mengatakan pihaknya akan mengumumkan hasil audit yang dilakukan PCW tentang kasus korupsi di Papua tahun 2007, hasil-hasilnya akan diserahkan ke KPK, Polda Papua, Kejaksaan dan Gubernur.

29 Desember

Lebih kurang dua tahun pasca Pemilu legislatif tahun 2004, keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mimika periode 2004-2009, akhirnya diaktualisasikan (diaktifkan) melalui acara pengukuhan atau peresmian oleh Pemerintah Provinsi Papua melalui Wakil Gubernur Provinsi Papua, Alex Hesegem. Acara pelantikan di ruang sidang DPRD Kabupaten Mimika dihadiri 22 anggota DPRD Mimika, dari 24 nama yang tertera dalam lembaran kesepakatan bersama 14 pimpinan dan wakil pimpinan Partai politik (Parpol) di Kabupaten Mimika yang berlangsung pada Sabtu, di gedung negara Dok V atas Jayapura. Kegiatan ini dihadiri oleh PLTH Bupati Kabupaten Mimika, Drs. W. Haurissa, Muspida plus Kabupaten Mimika, TNI-Polri, anggota KPU Propinsi Papua, Pimpinan dan wakil Parpol, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh perempuan.

A.4 PENANGANAN KONFLIK

12 Oktober

Dalam konflik yang terjadi di Kwamki Lama, Kabupaten Mimika, Polda Papua telah menahan 5 orang yang diduga sebagai aktornya. Awalnya pihak Polisi mendapat informasi bahwa beberapa hari sebelumnya para aktor itu berada di Jayapura. Dari informasi itu akhirnya anggota Polisi sekitar pukul 03.30 WIT berhasil menangkap penanggung jawab perang Timika di Hotel Dafonso dan sebagian lagi di Hotel Mahkota. Awalnya berjumlah 10 orang, namun diselidiki hanya 5 orang saja. Kelima orang itu dijerat dengan pasal 160 dan pasal 170, jo pasal 55 dan KUHP, karena mereka diduga kuat melakukan penghasutan dan melakukan perlawanan antara satu dengan yang lain.

13 Oktober

Terjadi amuk massa di Mulia, ibu kota Kabupaten Puncak Jaya diduga akibat pembagian dana kompensasi Bahan Bakar Minyak (BBM) atau dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang tidak merata, sehingga banyak keluarga yang belum mendapat BLT. Akibatnya terjadi kecemburuan antar mereka dan berbuntut pada amukan massa.

Amukan masa itu mulai sekitar pukul 10.30 WIT dan mengakibatkan 3 anggota polisi terluka antara lain:

1. AKP Slamet Haryono [luka di kaki kanan akibat lemparan batu]
2. Ipda Hans Fairaaf [luka di kaki kanan akibat lemparan batu]
3. Bripda Yusuf Toding [luka di kaki kiri akibat lemparan batu].

Selain ketiga anggota Polisi di atas ada 6 orang mengalami luka yakni:

1. Mondip Tabuni [luka tembak]
2. Lele Telenggen [luka tembak]
3. Eterina Telenggen [luka tembak di kaki kanan]
4. Yondiron Wanimo [luka tembak]
5. Mekiton Wenda [terkena lemparan batu dari massa]
6. Libius Tabuni, PNS [meninggal diduga akibat overdosis- minum obat dextro metropam].

Sedangkan bangunan yang rusak adalah:

1. Kantor DPRD Puncak Jaya (hangus dibakar)
2. Kantor Bupati (dibakar, rusak berat)
3. Kantor Dinas P & P
4. Kantor DPU
5. Kantor Statistik (dibakar)
6. Mess Keuangan Pemda Puncak Jaya
7. Kantor Distrik Mulia (rusak berat)
8. Rumah Kadistrik Mulia (rusak berat)
9. Kantor Pos Mulia (rusak berat)
10. Puskesmas Mulia (rusak ringan)
11. Seluruh kios di sepanjang jalan di Pasar Inpres Mulia
12. Rumah Makan Parahyangan
13. Rumah Makan Mutiara
14. Rumah makan Puja Salera
15. Perumahan Dinas Kesehatan (rumah dokter)
16. Perumahan DPRD sebanyak 17 Unit
17. APMS ACP Mulia
18. APMS ACP Bustomi
19. SD Inpres Mulia
20. Perumahan di sepanjang Jalan Papua baik di sebelah kanan dan kiri
21. Kantor PDIP

22. Sekretariat Golkar
23. Rumah tingkat Yohanes Paliling
24. Konter HP (dirusak & dijarah)
25. Bengkel Adi
26. Kios Padang
27. Mobil Dinas PU (kaca hancur)
28. Rumah Kasubag Anggaran
29. Rumah Kasubag Pemerintahan
30. Rumah Kasubag Kepangkatan
31. Rumah dinas kepala BKD

Kerugian akibat amukan massa itu diperkirakan mencapai Rp 30 miliar.

Kerusuhan yang terjadi di Mulia, ditegaskan oleh Wakil Ketua MRP Frans Alex Wospakrik bahwa, seharusnya itu menjadi peristiwa yang terakhir di Papua. Cara-cara seperti ini tidak boleh terjadi lagi harus ditinggalkan jauh-jauh dan sama-sama menjaga Papua sebagai Tanah Damai.

Dalam kerusuhan di Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, dicurigai ada aktor intelektual yang menggerakkan. Demikian ditegaskan oleh Wakapolda Papua, Brigjen Pol. Drs. Max Donald Aer. Menurut saksi mata, kerusuhan itu bermula dari massa dalam kondisi yang dipengaruhi oleh miras. Untuk itu Kapolda, Max Donal Aer, mengingatkan Polres-polres yang memiliki bandara seperti Jayapura (Sentani), Timika, Nabire, dan Wamena supaya benar-benar mengawasi perdagangan dan distribusi miras.

15 Oktober

Menurut Koordinator Forum Komunikasi Cinta Damai Pemuda Kabupaten Puncak Jaya, Seldius Wonda, SH, Msi dalam jumpa pers di *House Kafe*, kerusuhan di Mulia, ibu kota Kabupaten Puncak Jaya sudah reda, namun peristiwa itu bukan murni akibat pembagian BLT yang tidak merata, tetapi karena ada kepentingan politik.

19 Oktober

Sekjen Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua Indonesia (AMPTPI), Hans Magal dan Tim Kemanusiaan Mimika, Diaz Gwijangge mendatangi Kantor Els-HAM Papua untuk memprotes penahanan tokoh yang diduga aktor perang saudara di Kwamki Lama, Timika oleh Polda Papua. Hans Magal mengatakan tindakan Polda Papua ini adalah suatu hal keliru, di mana para aktor pemicu konflik di Kwamki Lama Timika ini dipanggil ke Jayapura untuk bayar kepala setelah damai justru ditangkap secara diam-diam, padahal kedua belah pihak sudah menyatakan kesepakatan damai. Menurut Diaz Gwijangge para aktor yang diduga menjadi pemicu konflik dan ditahan di Polda Papua adalah; Elminus Mom, Alpius Kogoya, Negro Wanimbo, David Wandikbo, dan Aser Murip. Sekjen AMPTPI Hans Magal, mengatakan penyelesaian tumpang tindih yang kemudian diproses di polisi dan pengadilan tanpa memenuhi keadilan dan rasa damai dalam proses penyelesaian konflik adat justru dikhawatirkan akan memicu konflik horisontal dan vertikal di Timika.

21 Oktober

Penahanan 5 orang penanggung jawab perang (waimum) di Kwamki Lama Timika di Rutan Polda Papua, terhadap Negro Wanimbo (kelompok atas), YK dan Aser Murip (kelompok bawah), serta Elminus Mom dan David Wandikbo (dari kelompok tengah), membuat beberapa tokoh yang mewakili masyarakat Kwamki Lama (Biel Tinal) dan masyarakat Timika, menemui Direktur Reskrim Polda Papua, Kombes Pol. Drs. Paulus Waterpauw guna meminta supaya 5 orang yang ditahan itu ditanggguhkan penahanannya agar pertikaian yang terjadi di Kwamki Lama dapat terselesaikan. Karena penyelesaian secara adat harus berjalan supaya dendam antar warga dapat diselesaikan, proses hukum positif harus berjalan sama-sama dengan perdamaian secara adat.

29 Oktober

Kelima penanggungjawab perang saudara (waimum) di Kwamki Lama, Kabupaten Mimika, sudah diterbangkan ke Timika dan langsung ditahan di Rutan (Rumah Tahanan) Polres Mimika. Menurut Kapolresta Mimika, AKBP Tjantje Jimmy Tuilan, SE melalui Kasat Reskrim AKP Harley Silalahi, SH menjelaskan bahwa Polres Mimika akan terus melakukan penyidikan tambahan terhadap kelima tersangka tersebut.

30 Oktober

Polisi telah menetapkan lima tersangka kasus kerusakan Mulia. Dua orang telah ditahan yaitu ET (27) dan MT (30), sedangkan tiga orang lainnya masih dalam pengejaran yaitu YW, WK, dan LT. Akibat dari tindakan para tersangka ini, mereka dikenakan tuduhan pasal 170 KUHP jo pasal 55 KUHP karena bersama-sama mereka melakukan perusakan dan bahkan pembakaran, ungkap Kapolda Papua Irjen Pol. Drs. Tommy Trider Jacobus. Menurut fakta yang diperoleh orang-orang yang berhak mendapat BLT itu ada sekitar 34 ribu warga, tetapi nyatanya yang menerima BLT hanya sekitar 22 ribu warga.

10 November

Direskrim Kepolisian Daerah Papua (Polda) Kombes Paulus Waterpauw mengatakan akan memeriksa empat anggota DPRD Kabupaten Puncak Jaya terkait kasus kerusakan di Mulia, Puncak Jaya. Namun hal ini masih menunggu surat izin dari Gubernur Provinsi Papua.

12 November

Provinsi Papua, secara khusus Kota Jayapura yang memiliki keragaman budaya, suku dan agama, kini hidup dalam suasana rukun dan penuh toleransi. Kerukunan dan toleransi yang diciptakan oleh umat beragama perlu dipertahankan demi menciptakan Kota Jayapura yang Beriman dan menjadi contoh bagi daerah lain di Papua. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Badan Koordinasi Kerukunan Umat Beragama (BKKUA) Kota Jayapura, Pdt. Karel Maniani, S.Th

19 November

Gabungan Mahasiswa dan Masyarakat Paniai (Gemmpur) menyambut baik rencana persidangan sengketa Pilkada Kabupaten Paniai di Pengadilan Tinggi (PT) Jayapura. Laurensius Kadepa, koordinator GEMMPUR mengatakan kami sudah memberikan suara pada 16 Oktober 2006 dan sudah diplenokan di KPUD pada 30 Oktober, dan hasilnya sama dengan pleno KPUD yakni sah karena Pilkada sudah berjalan. Sementara itu, Yance Yogi koordinator Pemantau Independen Pilkada Kabupaten Paniai mengatakan gugatan yang dilakukan juga merupakan hambatan bagi pembangunan, karena itu proses hukum boleh berjalan tetapi pelantikan harus segera dilakukan.

A.5 Aspirasi 'M'(erdeka)

10 Oktober

"Masalah kematian seseorang adalah masalah kemanusiaan. Hendaknya jangan diputarbalikkan menjadi masalah politik". Demikian komentar Kapolda Papua Irjen Pol. Drs. Tommy Trider Jacobus tentang adanya informasi bahwa Dr. Willem Zonggonao yang meninggal di Australia dan rencananya akan dibawa ke Papua dan dimakamkan di dekat Makam Theys H. Eluay di Sentani.

Andy Ayamiseba, juru bicara OPM di tingkat internasional yang bermarkas di Port Vila, Ibukota Vanuatu, menyatakan bahwa pihaknya mungkin akan hadir dalam pertemuan Forum Pemimpin Negara Pasifik dan mengajak Dr. John Ondowame, rekan kerjanya, sebagai anggota delegasi resmi.

11 Oktober

Menyikapi rencana penguburan Dr Willem Zonggonao, anggota PDP yang meninggal di Australia, di dekat makam almarhum Theys Hiyo Eluay di Sentani, Kapolda Papua Irjen Pol. Drs. Tommy Trider Jacobus mengatakan perlu dilihat secara proporsional menyangkut masalah kewarganegaraan

karena Dr Willem Zonggonao telah keluar dari Papua dan tinggal di PNG sejak 1969 dan sudah menjadi warga negara PNG. Jenasah Dr Willem Zonggonao kalau disemayamkan di Papua berarti atas persetujuan keluarga korban sehingga harus diurus melalui KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia) di PNG karena masalah ini sudah menjadi masalah antar dua negara (RI & PNG).

12 Oktober

Boy Eluay anak dari almarhum Theys Eluay menyatakan keberatannya atas rencana penguburan Dr. Willem Zonggonao di Papua di samping makam Theys Eluay. Tentang hal itu Boy mengatakan, perlu adanya koordinasi terlebih dulu karena Dr Willem Zonggonao bukan lagi warga negara Indonesia. Boy juga menyarankan sebaiknya kalau Presidium Dewan Papua atau Dewan Adat melakukan koordinasi dengan menyikapi hal ini supaya tidak ada polemik di tengah masyarakat. Boy setuju kalau sejak awal tokoh-tokoh Papua ini disepakati untuk dimakamkan dekat kuburan Theys seperti almarhum Yusuf Tanawani yang dimakamkan di Serui.

13 Oktober

Meninggalnya Dr. Willem Zonggonao di Sydney (Australia), turut mengundang perhatian dari Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP). Anggota Fraksi Gabungan DPRP Ir. Weynand Watory menghimbau agar meninggalnya Dr. Willem Zonggonao itu jangan dipolitisir dan dipolemikkan karena UU No.21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua telah menjamin makna kemerdekaan itu sehingga kasus kematian salah satu tokoh Papua ini jangan dipolemikkan terus-menerus ungkap Waynand Watory. Almarhum Dr. Willem Zonggonao dikenal selalu mengkampanyekan HAM, ahli sejarah, dan aktivis kemerdekaan Papua, juga adalah seorang demokrat.

16 Oktober

Polisi Fiji telah menginterogasi Pemimpin Partai Nasional Tako Lavo dan terpidana kasus makar, Iliesa Duvuloco, sehubungan dengan aksi demo yang mendukung aspirasi kemerdekaan Papua. Duvuloco berdemo saat diadakan Festival Budaya Melanesia di Suva dan menyerukan dukungan kemerdekaan bagi Papua kepada para pengunjung festival.

10 November

Sekretaris Pemerintahan Adat, Sayid Fadhal Alhamid, mengumumkan bahwa DAP akan menganugerahkan penghargaan kepada Mantan Presiden Abdurrahman Wahid atas jasanya kepada orang Papua, khususnya saat menjabat presiden 1999-2001 dengan dukungan Rp. 2 milyar kepada Konggres Papua II tahun 2000. Penghargaan akan diberikan tgl. 14 November 2006.

Pemahaman Dewan Adat Paniai yang mengatakan Dewan Adat Papua menutup mata terhadap kematian Wim Zonggonao mendapat perhatian dari Ketua Pemerintahan Dewan Adat Papua, Forkorus Yaboisembut, SPd, yang mengatakan pihaknya tidak menutup mata terhadap kematian Wim Zonggonao. Hanya saja semuanya sesuai dengan aturan dan pesan dari Wim terhadap keluarganya sewaktu dirinya masih hidup.

18 November

Ketua Pemerintahan Adat Papua Fokorus Yaboisembut, S.Pd dipanggil pihak penyidik Polres Jayapura untuk dimintai keterangan terkait kematian Markus Kalem yang peti jenasahnya dibungkus dengan Bendera Bintang Kejora pada upacara pemakaman di Kampung Yobe. Fokorus mengatakan "Saya dipanggil sebagai saksi dan saya tidak setuju jika dijadikan tersangka, saya dinilai telah menodai Bendera RI, karena adanya Bendera Bintang Kejora di atas peti, dan saya minta kejadian seperti ini perlu ada ruang dialog".

27 November

Pangdam XII/Trikora, Mayjen TNI Zamroni,SE mengharapkan agar momen 1 Desember, tidak boleh ada pengibaran Bintang Kejora di seluruh wilayah hukum Republik Indonesia, termasuk di Provinsi

Papua, sebab kata Pangdam, pengibaran bendera Bintang Kejora tersebut adalah tindakan melanggar hukum. Hal itu ditegaskannya usai menghadiri upacara sertijab tiga pejabat di lingkungan Kodam XVII/Trikora yang berlangsung di Makodam XVII/Trikora. "Kalau memang ada rencana dari pihak-pihak tertentu yang akan mengibarkan bendera, saya harapkan jangan dilakukan, sebab hal tersebut, melawan hukum," tegasnya. Ditambahkan, bahwa perbuatan yang melanggar hukum akan ditindak tegas, sehingga dirinya mengharapkan kepada masyarakat di seluruh Provinsi Papua, agar bisa berpikir yang positif dan tidak terhanyut dalam provokasi yang sengaja dilakukan pihak-pihak tertentu, untuk mengacaukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). "Saya juga menilai masyarakat di Papua sudah dewasa dan bisa berpikir yang kritis, sehingga sudah bisa menilai apa yang baik, bagi mereka," kata Pangdam.

29 November

Dalam konferensi pers di Asrama Nabire, Waena, Wakil Ketua Front PEPERA Kota Numbay, Gunawan Inggeruhi, menegaskan bahwa [1] tanggal 1 Desember merupakan hari Kemerdekaan Bangsa Papua Barat yang tidak dapat diganggu gugat, [2] mendesak dunia internasional untuk mengakui tanpa syarat bahwa Bangsa Papua Barat sudah merdeka sejak 1 Desember 1961, [3] mendesak pemerintah Indonesia, Belanda, Amerika Serikat serta PBB untuk bertanggung jawab atas proses aneksasi dan manipulasi Pepera 1969, [4] menolak secara tegas produk hukum apapun yang mau mengatur Bendera Bintang Kejora, Lagu Hai Tanahku Papua sebagai lambang kultural.

30 November

Sehubungan dengan kegiatan 1 Desember yang akan digelar di pendopo rumah Alm. Theys Hiyo Eluay Sentani, Polres Jayapura melakukan gelar pasukan. Gelar Pasukan yang dipimpin Kapolres AKBP Jacob Kalembang BA, diikuti sekitar 500 pasukan gabungan, baik dari Polri, TNI-AD maupun TNI AU. Kapolres menegaskan terkait dengan 1 Desember, maka kewaspadaan anggota lebih ditingkatkan. Demikian sistem pengamanan daerah juga lebih diintensifkan dengan melakukan patroli rutin mengelilingi Sentani dan sekitarnya dan lebih mengedepankan cara-cara persuasif.

Kapolres Jayawijaya AKBP Drs. Yan F Kaiway meminta agar warga tetap tenang dan melakukan aktivitas sebagaimana hari-hari biasanya dan jangan terpengaruh melakukan hal-hal yang sifatnya melanggar hukum. Penegasan itu berkaitan dengan perayaan 1 Desember. "Konsekuensinya sudah jelas bagi mereka yang melanggar hukum yakni harus berhadapan dengan aparat dan akan diambil tindakan tegas", kata Kapolres Kaiway.

Boy Eluay, anak tertua Alm. Theys H. Eluay, menegaskan bahwa tidak ada kegiatan pengibaran Bendera Bintang Kejora pada perayaan 1 Desember dan hanya ada ibadah di pendopo rumahnya.

Polres Jayapura dipimpin oleh Wakapolres, Kompol John F. Uriager, menangkap anggota Komnas HAM Papua, Abhina Wasanggai, yang membawa kue tart berhias bintang kejora berukuran 30 x 60 cm di dalam mobilnya saat dilakukan *sweeping* sekitar pk. 22.00 di depan Mapolres Jayapura. Setelah dimintai keterangan, Ibu Abhina, mengaku bahwa dia hanya mengantarkan pesanan tanpa tahu isi bungkusan. Ibu Abhina tidak ditahan sedangkan kue tersebut disita polisi.

Yulianus Bole Gebze, selaku Tokoh Adat Marind dan juga staf SKP KAM, menegaskan kepada masyarakat adat Marinduntuk tidak mengibarkan Bendera Bintang Kejora pada 1 Desember "Karena jika itu dilakukan, maka kalian akan berhadapan dengan TNI dan Polri yang merupakan pengawal keutuhan NKRI".

1 Desember

Acara perayaan 1 Desember dalam bentuk ibadah diadakan di pendopo Theys yang dilanjutkan dengan ziarah bersama ke makam Alm. Theys Hiyo Eluay yang hanya berjarak sekitar 200 meter dari tempat kegiatan yang antara lain dihadiri oleh beberapa tokoh adat Papua seperti ketua pemerintahan adat Forkorus Yoboisembut, SPD, Sekjen PDP Thaha Al Hamid dan Sekretaris Umum Dewan Adat

Papua Leonard Imbiri serta sejumlah tokoh adat lainnya. Ibadah tersebut dipimpin oleh Pdt. Willem Rumbiak dan berjalan hikmat dan lancar serta dihadiri massa sekitar 400 orang.

Bendera Bintang Kejora berkibar di tiga kota: Jayapura, Timika, dan Manokwari. Kapolresta Jayapura, AKBP Roberth Djoenso, menjelaskan bahwa di Jayapura, bendera tersebut berkibar di Samping Kantor Samsat (Kali Acai, Abepura), Belakang Kantor Otonom Kotaraja, dan Belakang CV Menara Jaya, Tasangkapura. Di Timika bendera berkibar di Kampung Banti. Tidak ada pihak yang mengaku bertanggung jawab atau diidentifikasi oleh Polisi sebagai pengibarnya.

3 Desember

Ketua Komnas HAM Papua, Alberth Rumbekwan, menegaskan, "Kue tart tidak ada kaitan dengan Komnas HAM Papua sebab kami tidak pernah memerintahkan untuk membuat kue tersebut. Itu adalah masalah individu pelaku".

4 Desember

Bupati Keerom, Celsius Watae, menghimbau pers agar tidak menyebarkan informasi yang provokatif yang hanya merugikan masyarakat setempat. Hal ini disampaikannya sehubungan dengan berbagai pemberitaan media massa yang dinilai mengeksploitasi pengibaran Bendera Bintang Kejora pada 1 Desember 2006 oleh sekelompok orang di Papua Niugini.

A.6 PEMEKARAN VS OTSUS

2 Oktober

Revisi UU No 21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Otsus) harus datang dari masyarakat Papua. Tidak ada satu pun lembaga dalam negara ini, termasuk pemerintah pusat melakukan revisi dan sampai saat ini, belum ada usulan dari masyarakat Papua kepada Majelis Rakyat Papua (MRP) untuk merevisi UU Otsus. "Revisi itu bukan kewenangan siapa-siapa, tetapi kewenangan masyarakat Papua," kata Ketua MRP, Agus Alue Alua di Jayapura.

3 Oktober

Dalam diskusi tentang penguatan penyelenggaraan pemerintahan daerah di provinsi-provinsi Papua yang diselenggarakan di Jayapura Wakil Ketua MRP yang juga mantan Rektor Universitas Cendrawasih Jayapura, Frans A Wospakrik, mengatakan, "Tiga komponen penyelenggaraan otonomi khusus (Otsus) Papua, yakni Pemerintah Daerah Papua, Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), dan Majelis Rakyat Papua (MRP) saling menyalahkan dalam penyusunan peraturan daerah khusus (perdasus) dan peraturan daerah provinsi (perdas) sebagai aturan turunan dari UU No. 21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua".

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan. Karena itu, hendaknya UU itu dievaluasi untuk kemudian direvisi. Anggota Pokja Papua Frans Maniagasi dan Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Agus Alue Alua di Jayapura, mengungkapkan, "UU Otsus menyatakan bahwa revisi UU harus diusulkan oleh masyarakat Papua. Jadi oke saja kalau mau dievaluasi dulu, lalu disepakati apa yang akan direvisi. Kalau pun direvisi, paling tidak harus sama dengan UU Pemerintahan Aceh."

7 Oktober

Bupati Kabupaten Fakfak, Drs. Wahidin Puarada, M.Si mengatakan pada kesempatan Otsus ini pemeritahan kabupaten Fakfak memprioritaskan pembangunan rumah bagi semua warga, yang ditargetkan tahun 2008 semua warga sudah mempunyai rumah. Sumber dana dari alokasi dana Otsus dan Dana Alokasi Umum (DAU) di mana Rp. 4 Milyar untuk pengadaan bahan-bahan bangunan.

9 Oktober

Menko Polkam, Widodo AS, menyatakan bahwa pemerintah akan berusaha mempercepat pembangunan di Papua dengan memfokuskan perhatian pada pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ketahanan pangan, dan peningkatan SDM. "Dasar pemikirannya adalah bagaimana Otsus dapat dijalankan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat melalui lima perhatian tadi".

12 Oktober

Bertepatan dengan peringatan HUT Provinsi Irian Jaya Barat (IJB) ke-7, Gubernur AO Atururi menyerahkan surat keterangan (SK) pensiun kepada 6 orang pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Prov IJB. Salah satu dari ke-6 orang tersebut adalah Drs Rahimin Katjong yang kini menjabat Wakil Gubernur Prov IJB. Selain itu juga diserahkan SK kenaikan pangkat kepada 3 PNS. Gubernur menyampaikan ucapan terima kasih kepada PNS yang sudah menyelesaikan pengabdianya. Menurut dia, seorang PNS adalah abdi negara dan abdi masyarakat yang ditugaskan negara untuk memberikan pelayanan. "Saya mau ajak semua pegawai untuk bekerja melayani masyarakat dengan baik. Berikan sesuatu yang berharga," tandasnya.

Meskipun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bakal menolak usulan pembentukan Majelis Rakyat Papua berikut di Tanah Papua, Barindo Irian Jaya Barat tetap akan mengusulkan agar Undang-undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua direvisi kembali. "Barisan Indonesia tetap akan mengusulkan agar UU Otsus Provinsi Papua direvisi kembali, sehingga dapat mengakomodir semua kepentingan masyarakat asli Papua di Tanah Papua tanpa terkecuali," ujar Edison Parairaway, SH, Ketua DDP Barindo Provinsi Irian Jaya Barat.

13 Oktober

Dalam era Otonomi Khusus (Otsus) ini, Pemerintah Provinsi Papua mempunyai rencana program pembangunan daerah dimulai dari kampung-kampung. Program ini disambut baik oleh pihak legislatif (DPRP). Direncanakan program ini akan difokuskan pada perbaikan kesejahteraan rakyat melalui berbagai sektor. Sektor-sektor yang dimaksud adalah perbaikan makanan, gizi rakyat, peningkatan mutu pelayanan kesehatan, perbaikan mutu pendidikan dasar, pengembangan ekonomi rakyat, dan penyediaan infrastruktur. Program tersebut akan dilaksanakan pada tahun depan (2007). Program pemerintah daerah ini didukung oleh Ketua DPR Papua, Drs. John Ibo, MM yang menegaskan bahwa kebijakan pemerintah daerah ini bisa terwujud jika kebijakan tersebut didukung dengan adanya alokasi anggaran untuk kepentingan rakyat harus diprioritaskan (lebih besar) ketimbang alokasi dana untuk belanja aparatur.

19 Oktober

Ketua MRP, Agus Alue Alua, mengatakan dalam waktu dekat ini para anggota MRP akan melakukan studi banding ke Selandia Baru. Tujuannya adalah mempelajari bagaimana kebijakan pemerintah terhadap kedua suku pemilik hak ulayat di sana yaitu Suku Maori. Kedua suku ini adalah pemilik ulayat Benua Australia, karena perkembangan zaman dan modernisasi akhirnya Selandia Baru telah membawa kedua suku ini menjadi minoritas, namun kebijakan negara sehingga ada perlindungan dan perhatian secara khusus kepada mereka. Keberhasilan yang dibuat oleh negara New Zealand ini yang akan dipelajari oleh para anggota MRP untuk menyusun Perdasus kependudukan, sehingga hak-hak dasar rakyat Papua (orang asli Papua) dapat diatur dengan baik pada masa-masa yang akan datang.

30 Oktober

Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika, Drs. Wilhelmus Haurissa menyerahkan dana bantuan Otonomi Khusus (Otsus) secara simbolis kepada Kepala Kampung, Kelurahan, dan Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam) di 12 Distrik se-Kabupaten Mimika. Dana tersebut merupakan dana Otonomi Khusus (Otsus) yang disalurkan oleh Pemerintah Kabupaten Mimika untuk pembangunan kampung. Dana itu sebesar Rp. 4,1 miliar dengan perincian, masing-masing distrik menerima Rp. 25 Juta.

31 Oktober

Pengamat Politik Papua, yang juga Pokja Papua di Jakarta, Frans Maniagasi mengkritik kinerja MRP yang sudah genap satu tahun, bahwa ada hal yang menyebabkan belum optimalnya MRP melaksanakan fungsinya. Kinerja MRP belum memahami semangat, makna, dan cita-cita dari undang-undang Otonomi Khusus (Otsus). Majelis Rakyat Papua (MRP) dinilai belum berpihak secara jelas pada hak-hak dasar orang asli Papua, hal ini dapat dibuktikan karena belum ada suatu Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) yang dibuat MRP; sedangkan menurut Majelis Rakyat Papua (MRP) sendiri bahwa mereka (MRP) sudah membuat dan mengajukan 6 draft Perdasus ke Gubernur (pemerintah) namun sampai saat ini belum satu pun draft itu ditindak lanjuti.

13 November

Rencana penetapan Raperdasus Penggunaan Dana Otsus Papua perlu dikaji ulang karena belum memuat tata cara pengajuan hingga penetapannya. Salah seorang anggota DPR Papua Ir. Weynand Watori mengatakan "Harusnya ada Perdasi atau tata cara pengajuan dengan penetapannya. Kalau tidak kita tidak mengerti bagaimana pengajuan dan alurnya supaya sampai pada penetapannya".

14 November

Otonomi Khusus di Provinsi Papua sudah berjalan lima tahun. Untuk memantapkan pelaksanaan Otsus berbagai reformasi birokrasi dilakukan oleh Gubernur Papua; menanggapi hal ini Ketua Democratic Center Uncen yang juga salah seorang perancang UU Otsus Papua Drs. M Musaad, Msi mengatakan hal ini harus sejalan dengan perangkat hukum yang ada dalam UU No. 21 tentang Otsus Papua melalui Perdasi dan Perdasus. Selain itu, program pembangunan bisa berjalan efektif jika ada perangkat hukum yang jelas yakni Perdasi dan Perdasus, sehingga tidak mengikuti kemauan masing-masing.

16 November

Dalam waktu 2 hari DPRD Provinsi Irian Jaya Barat berhasil melakukan pembahasan terhadap perhitungan APBD 2005 dan perubahan perhitungan APBD 2006 kemudian dua raperda itu ditetapkan sebagai Perda tentang perhitungan APBD 2005 dan perda perubahan 2006. Sidang Paripurna ke-3 masa Persidangan ke-2 DPRD IJB ditutup, tetapi sebelum itu didengar pendapat akhir fraksi. Ketua DPRD IJB tampak menyadari itu. Fraksi rakyat berdaulat yang pendapat akhirnya dibacakan salah satu anggotanya Suyanto memaklumi nilai surplus APBD 2005 yang begitu besar Rp 97,35 miliar.

20 November

Wakil Ketua DPR Papua Komarudin Watubun, SH mengatakan walaupun Provinsi Irian Jaya Barat sudah resmi menjadi Provinsi dan memiliki Gubernur, tetapi wilayah Kota dan Kabupaten tetap mendapat dana Otsus, hal ini sesuai UU Otsus Papua, di mana Kabupaten dan Kota yang masuk wilayah Irian Jaya (sebelum IJB) tetap mendapat dana.

22 November

Ketua MRP Drs. Agus Alue Alua mengatakan faktor mendasarkan diberlakukannya UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus di Provinsi Papua karena perbedaan kultur orang Papua yang mesti dilindungi dan dilestarikan oleh masyarakat dan pemerintah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. "Pengalaman masa lalu etnis tertentu memandang etnisnya yang terbaik dan memaksakannya kepada etnis lain. Akibatnya berdampak buruk bagi identitas etnis lain", kata Agus A. Alua di hadapan peserta Kongres PMKRI XXV di LPMP Kotaraja.

23 November

Ketua MRP Drs. Agus Alue Alua mengatakan status hukum Irian Jaya Barat harus diselesaikan, karena itu perlu ada pertemuan antara Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Irian Jaya Barat untuk mengambil langkah yang jelas mengenai status hukum Irian Jaya Barat, sebelum penetapan Tahun Anggaran (TA) 2007. Ia menambahkan kalau status hukum belum jelas penyaluran dana Otsus untuk IJB akan sulit karena terkait kontrol dan pertanggungjawaban.

1 Desember

Di Pendopo Alm. They H. Eluay, Ketua Pemerintahan Adat, Forkorus Yaboisembut, menyetujui raperdasi Bintang Kejora untuk disahkan. "Draf perdasi dan perdasusnya masih dibuat hanya menunggu disahkan saja. Sebab hal itu tersebut termuat dalam salah satu pasal di UU No. 21/2001. Maka dari itu, pada perayaan 1 Desember kali ini tidak perlu melakukan pengibaran bendera sebab perihal pengibaran masih dalam pertentangan. Bendera kultural adalah hak masyarakat Papua. Saya sendiri setuju untuk disahkan Bintang Kejora itu".

Sekjend PDP, Thaha Alhamid, mendesak pemerintah supaya membasmi para koruptor agar Otsus bisa jalan. "Warga Kampung mana yang sudah pernah merasakan Otsus? Jika saja Otsus tidak berjalan di Tanah Papua ini, yang patut dipersalahkan adalah pemerintah sebab pemerintah yang jelas-jelas menjalankan seluruh dana Otsus. Untuk menjalankan dana Otsus dengan baik hingga turun ke kampung-kampung terlebih dahulu harus dilakukan pemangkasan terhadap pejabat kotor."

3 Desember

Lima kampung di Wasior, yakni Sanderawoi, Uremi, Tandia, Sasirei, dan Webi, menerima pembagian dana Otsus Pemberdayaan Kampung tahap II masing-masing sebesar Rp. 20 juta. Dana tersebut diserahkan oleh Bupati Teluk Wondama, Alberth Torey, dan digunakan untuk pelaksanaan program pendidikan, kesehatan, pengembangan ekonomi kerakyatan. Dana Tahap I sudah diserahkan pada pertengahan tahun ini.

5 Desember

Usai bertemu dengan Asisten I Tatapraja Sekretaris Provinsi NAD, Yusuf Sulaiman, Ketua MRP, Agus Alue Alua, memberikan komentar bahwa UUPA lebih maju daripada UU No. 18/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Aceh. "Kami juga berkeinginan, kemajuan yang dicapai di Aceh itu akan menjadi contoh untuk kami bawa ke Papua". Sebanyak 36 orang anggota MRP mengadakan studi banding ke Aceh untuk memperoleh masukan terkait dengan implementasi UU Pemerintahan Aceh.

Berkaitan dengan rencana pemekaran 4 kabupaten baru di Jayawijaya (Nduga, Yalimo, Lani Jaya, dan Mamberamo Tengah), salah satu anggota DPRD Jayawijaya, Yarius Gwijangge, menjelaskan bahwa surat usulan pemekaran yang sudah dimajukan sejak 2004 akan segera keluar. "Surat usulan itu sudah masuk ke meja Presiden pada tanggal 19 November lalu sehingga kalau tidak ada halangan dalam empat bulan ke depan surat usulan itu sudah keluar".

12 Desember

Banyak wacana tentang pemekaran Irian Jaya Tengah (IJT) menjadi perhatian dari Forum Peduli Pemerintahan, Pembangunan dan Rakyat Papua melalui ketuanya Melky Dogopia pihaknya berharap untuk pemekaran IJT ditunda dulu, katanya bagi pihak-pihak yang menginginkan pemekaran hendaknya dapat menahan keinginan sebab pada umumnya tidak seratus persen keinginan rakyat.

13 Desember

Wakil Ketua Komisi A (bidang Politik) DPRP Ramses Walli mengharapkan MRP bersikap lebih proaktif dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat Papua dengan melihat latar belakang terbentuknya MRP. Jika tugas MRP untuk memproteksi hak-hak dasar Papua sebagaimana amanat UU No. 21 Tahun 2001, maka hendaknya MRP lebih proaktif.

B. HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA

B.1 HAK ATAS PENDIDIKAN

5 Oktober

Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Jayapura, Dra. Maria Bano mengatakan bahwa minat kaum perempuan masih rendah untuk menempatkan diri di bidang politik maupun duduk sebagai anggota legislatif. Untuk itu dalam waktu dekat ini Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Jayapura mempunyai rencana untuk mengadakan latihan menjadi pemimpin bagi kaum perempuan supaya bisa duduk di lembaga legislatif.

6 Oktober

Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Papua, Drs. James Modouw, MM mengatakan ke depan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang diberikan oleh pemerintah bukan saja diberikan kepada sekolah pemerintah saja tetapi juga kepada sekolah-sekolah swasta. Dana BOS ini bukan diberikan kepada sekolah-sekolah di kota saja melainkan sekolah-sekolah di kampung-kampung baik pendidikan formal maupun pendidikan non formal.

7 Oktober

Wakil Gubernur Provinsi Papua, Alex Hesegem, SE dalam acara wisuda I STIH Umel Mandiri, meminta supaya setiap mahasiswa/siswi yang lulus perguruan tinggi yang setiap tahun bertambah, diharapkan supaya tidak tergantung saja pada pemerintah (menjadi pegawai negeri sipil/PNS). Setiap mahasiswa harus benar-benar menuntut ilmu dengan baik supaya bisa menerapkannya di tengah-tengah masyarakat dan mampu menciptakan lapangan kerja sendiri.

Wali Kota Jayapura, Drs. M.R. Kambu, M.Si dalam profil pendidikan di tanah Papua di aula STT GKI I.S. Kijne, meminta supaya penyelenggara pendidikan termasuk yayasan agar benar-benar memahami dengan baik apa tujuan dari pendidikan itu sendiri. Secara khusus bagi Yayasan Pendidikan Kristen (YPK) sudah menciptakan mutu pendidikan yang tinggi, mengajarkan tentang perwujudan kehidupan bermoral dan menekankan pendidikan pada segi agama. Akhirnya diharapkan orang-orangnya ketika terjun ke lapangan mempunyai kemampuan/ketrampilan dasar serta moral yang baik supaya ditampilkan di tengah-tengah masyarakat.

11 Oktober

Weynand. S, salah seorang pegawai Sekolah Tinggi Seni Papua (STSP) mengatakan Pemda telah membantu dengan dana sebesar Rp. 200 juta setiap tahun, tetapi fasilitas pendidikan dan operasional sekolah seni ini tidak menunjukkan perubahan berarti. Pada 30 Desember 2005 dana sebanyak Rp. 800 juta dicairkan Biro keuangan kepada Yayasan Bina Seni Budaya (YBSB), namun uang jutaan rupiah itu hilang tanpa jejak, padahal dana tersebut dimaksudkan untuk mengembangkan bakat-bakat dan ketrampilan generasi muda untuk mengembangkan budaya asli Papua.

Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Papua, M.A. Pogolamun, BSw, melaporkan bahwa Perhatian Pemerintah Provinsi Papua (Pemprov) untuk meningkatkan kualitas pendidikan bagi mahasiswa. Untuk itu disediakan bantuan biaya akhir studi bagi 4.266 mahasiswa sebesar Rp. 4.405.500.000. Dari 4.266 mahasiswa ini 3.766 belajar di 15 perguruan tinggi di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, sedangkan selebihnya sekitar 500 orang belajar di 12 perguruan tinggi di luar Papua. Perincian dana bagi masing-masing mahasiswa, untuk program S-1 Rp. 750.000 – 1.000.000, sedangkan untuk mahasiswa S-2 masing-masing Rp. 5.000.000. Bantuan dana tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Bupati Alex Hesegem, SE secara simbolis dan disaksikan oleh perwakilan mahasiswa dari 15 perguruan tinggi yang ada di Papua.

20 Oktober

Sosialisasi bantuan akhir bagi mahasiswa Port Numbay di Kantor Dinas Sosial Kota Jayapura APO, dihadiri oleh ketua LMA, Dinas P & P, Dinas Bappeda, tokoh masyarakat dan ketua Forum Komunikasi Port Numbay. Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Jayapura, Gayus Manupapami, mengatakan jumlah mahasiswa Port Numbay yang telah terdaftar sebanyak 400 orang. Setiap mahasiswa akan menerima Rp 750.000.

13 November

Menanggapi kebijakan Gubernur Barnabas Suebu, SH yang tertuang dalam Rencana Program Jangka Menengah (RPJM), Ketua Pokja Agama MRP, H. Arobi A. Aituaraw mengatakan Dana Otsus yang diberikan kepada Provinsi Papua diprioritaskan pada bidang pendidikan (30%) dan kesehatan (15%) serta daerah-daerah terpencil. Karena itu, mestinya anak-anak asli Papua diberikan pendidikan gratis sejak SD hingga Perguruan Tinggi.

16 November

Masyarakat dari Dusun Hokolekma dan Scgasio Distrik Mugi, Kabupaten Yahukimo kecewa terhadap kepala sekolah dan guru-guru di kedua dusun tersebut, karena sudah dua tahun mereka tidak masuk mengajar dan murid-murid dibiarkan begitu saja", demikian ungkap Yoram Matuan S.Sos. Sementara itu, Bupati Yahukimo, Ones Pahabol mengatakan akan menindak tegas para guru yang meninggalkan tempat tugas.

31 November

Kepala Dinas P dan P Kabupaten Jayapura Dr. Jack Ayamiseba menyambut baik rencana pemerintah yang akan mengalokasikan tunjangan bagi guru di kota sebesar Rp 500 ribu dan guru di daerah pedalaman diberikan tunjangan 9 kali lipat dari gaji pokok. Tapi menurut Jack, pemberian tunjangan yang tinggi tersebut belum tentu menjamin bahwa guru di pedalaman tidak meninggalkan tempat tugas, seperti terjadi di beberapa distrik di Kabupaten Jayapura. Menurutnya tunjangan itu perlu apalagi guru-guru yang di pedalaman tapi juga fasilitas pendukung di tempat tugas juga perlu mendapat perhatian di antaranya; rumah dinas dan fasilitas yang diperlukan lainnya. Untuk orang yang bukan asli akan sulit bertahan, untuk tetap bertahan dalam menjalankan tugasnya mengajar, perlu didukung dengan fasilitas yang memadai.

1 Desember

Pemerintah Provinsi Papua akan mengalokasikan tunjangan bagi guru di kota sebesar Rp.500 ribu dan guru di daerah pedalaman diberikan tunjangan 9 kali lipat dari gaji pokok dengan fasilitas pendukung lain seperti rumah dinas dan fasilitas lainnya. Tunjangan ini perlu apalagi bagi para guru di daerah pedalaman supaya tidak meninggalkan tugas.

2 Desember

Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) sampai saat ini belum menunjuk perguruan tinggi yang akan melaksanakan uji sertifikat guru. Namun Depdiknas telah melaksanakan uji coba sertifikat terhadap 20 ribu guru, pelaksanaannya telah dilakukan oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK). Saat ini memang sedang berjalan proses tersebut dikatakan Bambang Wasito Adi, Kepala Pusat Informasi dan Humas Depdiknas belum ditunjuknya perguruan tinggi yang akan melaksanakan uji tersebut disebabkan masih menunggu disahkannya Peraturan Pemerintah (PP) tentang sertifikasi guru oleh Presiden. Saat ini PP sedang berada di Departemen Hukum dan HAM (Depkumham) untuk diharmonisasikan dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

3 Desember

Aksi pemalangan masyarakat dari Keluarga Besar Yarosabra terhadap lokasi SMA Negeri 2 Maribu yang sudah berlangsung 2 minggu lebih, nampaknya masih terus berlanjut. Masyarakat menuntut ganti rugi atas lokasi tanah tersebut dan sampai saat ini masih menuntut dialog langsung dengan pihak Dinas P & P Provinsi Papua. Pihak DPRD Kabupaten Jayapura telah berupaya menyelesaikan kasus ini dengan memfasilitasi masyarakat adat untuk bertemu dengan Dinas P & P Kabupaten Jayapura pertemuan itu belum mendapatkan kesepakatan yang memuaskan. Menurut Ely Yarosabra salah satu anggota keluarga besar Yarosabra mengatakan bahwa pihaknya akan tetap melakukan aksi pemalangan di lokasi SMA 2 Maribu tersebut. Dikatakan juga bahwa pertemuan dengan P & P yang difasilitasi oleh DPRD Kabupaten Jayapura tidak ada penyelesaian yang jelas karena Dinas P & P Kabupaten Jayapura mengatakan pembangunan sekolah tersebut dilakukan dari Provinsi.

Sementara itu Kepala Dinas P dan P Kabupaten Jayapura Dr. Jack Ayamiseba mengatakan bahwa pihaknya tidak mengetahui dengan pasti proses pembangunan SMA 2 Maribu yang dilakukan oleh Dinas P dan P Provinsi Papua.

Ketua Himpunan Mahasiswa dan Pelajar Jayawijaya, Melkias Yeke Gombo, mempertanyakan realisasi dana studi akhir mahasiswa Kabupaten Jayawijaya sebesar Rp. 6 milyar. Pihaknya menjelaskan mahasiswa yang belajar di luar Papua sudah mendapatkannya sedangkan mereka yang belajar di dalam Papua justru belum mendapat apa-apa.

4 Desember

Aksi Pemalangan yang dilakukan oleh keluarga besar Yarosabra terhadap lokasi SMA Negeri 2 Maribu, mendapat perhatian serius dari Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Jayapura Achmad Paito, harapan bahwa proses belajar mengajar tetap berjalan, ditengah proses penyelesaian dari tuntutan dari warga tersebut. Apalagi sudah menjelang ujian semester.

5 Desember

Bupati Teluk Wondama Alberth H. Torey memberikan perhatian serius terhadap pengembangan sektor pendidikan. Dengan salah satunya tidak memberikan beban biaya kepada setiap anak sekolah mulai dari tingkat TK, SD, SMP dan SMA. Program ini akan berlanjut selama kepemimpinannya di Kabupaten yang memang dikenal sebagai berdirinya sekolah pertama di Tanah Papua. Program sekolah gratis bagi setiap sekolah ini sudah menjadi komitmen saya saat masih calon Bupati. Bukan hanya sekolah gratis tetapi Bupati juga memberikan perhatian serius terhadap setiap mahasiswa yang menuntut ilmu di daerah lain.

12 Desember

Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran (P dan P) Provinsi Papua James Modouw mengatakan pendidikan kampung merupakan perluasan dan pemerataan akses pendidikan yang selama ini masih belum terjangkau secara merata dan bermutu sehingga terjadi kesenjangan pendidikan antara kota dan kampung-kampung. Dikatakan juga bahwa sesuai amanat Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) No. 21 Tahun 2001 bahwa pembangunan diharapkan berpihak pada masyarakat kecil melalui pembangunan pendidikan. Program ini diarahkan ke kampung-kampung atau daerah terpencil yang masih sulit terjangkau. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) semua kampung di Papua harus menyelenggarakan pendidikan baik formal maupun non formal. Katanya strategi pembangunan bertumpu pada manusia sebagai titik sentral pembangunan yang mengutamakan kepentingan rakyat, yang sesuai dengan RPJM tahun 2007-2011.

15 Desember

Anggota Komisi E DPRD, Beatrix Pekei, menegaskan untuk memajukan pembangunan pendidikan di daerah ini ke depan selain tetap mengacu pada kurikulum nasional yang diberlakukan tentunya sistem pendidikan berpola asrama juga harus terus dikembangkan. Katanya pendidikan akan maju dan sejajar dengan daerah lainnya di Indonesia jika pemerintah mampu mendorong dan meningkatkan sistem pendidikan berpola asrama. Tujuan dari sistem ini adalah bagaimana menanamkan pola kedisiplinan terhadap setiap peserta didik dalam berbagai hal baik itu disiplin dalam mengikuti proses belajar, disiplin dalam membagi waktu dan lebih penting lagi peserta didik memiliki moral yang baik.

16 Desember

Kepala bagian perencanaan Direktur Jendral Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Depdiknas Faisal M mengatakan akhir 2006 pemerintah akan memperkuat program PLS melalui satuan pelayanan yang ada di Kabupaten/Kota. Penguatan ini dibuktikan dengan memberikan sarana dan prasarana pembelajaran yang ada di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) sehingga nantinya SKB maupun Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) mempunyai standar yang jelas dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

Kegunaan	Dana
Dana dekonsentrasi pendidikan berkelanjutan 2007 Provinsi Papua sebesar	Rp : 69.319.309.000 (69 Miliar)
g. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
h. Wajib belajar Dikdas	Rp : 6.170.095.000
i. Pendidikan Non Formal (PNF)	Rp : 21.215.690.000
	Rp : 38.715.265.000
B. Budaya baca	
	Rp : 2.190.150.000
A. Manajemen Pengendalian Program (MPP)	Rp. 1.028.109.000

Tetapi dibanding 2006 mendapat dana Rp.35.681.435.000 berarti 2007 dana itu naik menjadi 94 persen ini membuktikan bahwa pemerintah Papua sangat mempedulikan pendidikan, ia mengatakan dengan kenaikan ini kinerja kerja ditingkatkan lagi.

18 Desember

Kapala Dinas Pendidikan dan Pengajaran (P dan P) Propinsi Papua James Modouw mengatakan bahwa Database pendidikan khususnya Pendidikan Luar Sekolah (PLS) merupakan sederetan angka-angka yang menunjukkan kondisi pendidikan yang dapat diketahui baik bagi pemerhati PLS maupun untuk masyarakat luas. Hal itu diungkapkan saat pelatihan Paket A, B dan C dan data pemetaan PLS provinsi Papua tahun 2006 di Hotel Ermashinta Jayapura. Menurutnya pengelolaan PLS Provinsi Papua tidak terlepas dari standarisasi jenis data yang berasal dari tingkat pusat karena sistem pengelolaan seluruh Indonesia. Data standar kelulusan merupakan salah satu contoh data base yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat perkembangan pengelolaan.

19 Desember

Ratusan guru dari berbagai distrik di Kabupaten Jayawijaya melakukan demo. Mereka meminta insentif dan tunjangan hari raya natal segera dibayarkan. Demo ini dilakukan di kantor Dinas P dan P Jayawijaya, Menurut Simon salah seorang guru mengatakan bahwa kami dituntut untuk melaksanakan tugas dengan baik namun di sisi lain hak-hak kami tidak pernah dibayar. Mereka melakukan demo ini tidak menemukan kepala Dinas P dan P maka mereka kembali.

Ketua Wanita dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (WIPTEK) Ir. Anike Monim mengatakan perbedaan tingkat pendidikan formal dan non formal di daerah pedalaman antara pria dan wanita sangat mencolok. Masih banyak wanita yang belum mendapatkan haknya untuk belajar dan menerima pendidikan dengan baik. Menurutnya di pedalaman wanita tidak pergi sekolah bukan hanya karena permasalahan ekonomi tetapi menyangkut sosial budaya di tempat tinggal. Misalnya orang tua berminggu-minggu ke kebun mereka juga ambil bagian dalam hal itu, akhirnya mereka tidak berkesempatan untuk bersekolah. Wanita yang pubertas diketahui berpacaran langsung dinikahkan, sehingga banyak wanita menikah di usia muda. Hal ini diungkapkan saat pemaparan hasil penelitian data tampilan gender di Propinsi Papua di Aula Kantor Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Dinas Pendidikan dan Pengajaran (P dan P) Provinsi Papua.

23 Desember

Kekurangan guru khususnya di daerah terpencil yang sulit dijangkau sepertinya memang sulit dipenuhi. Sebab kebanyakan guru yang baru diangkat enggan ke pedalaman sedangkan guru yang diangkat di Kabupaten atau Kota apabila bertugas di pedalaman tidak dapat bertahan lama di lingkungan barunya. Hal ini dikatakan oleh Direktur Eksekutif dan Badan Pengkajian dan Pengendalian Mutu Pendidikan (BPPMP) Propinsi Papua Jan Tethool. Hal ini disampaikan saat Pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis Kolose Pendidikan Guru (KPG) Khas Papua di Aula Kantor

Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Dinas P dan P Provinsi Papua, untuk kebutuhan guru khususnya guru Sekolah Dasar maka perlu dibina di daerah perkotaan maupun di pedalaman melalui UU Otonomi Khusus pemerintah Propinsi Papua dengan disepakati Pemerintah Kabupaten dan Kota sejak 2002 membina lulusan SMP yang bercita-cita menjadi pengajar (guru). Program ini hanya khusus di Papua. KPG khas Papua mempunyai visi untuk mendidik tenaga-tenaga guru baru Sekolah Dasar di seluruh pelosok Papua. KPG ini ada di 3 Kabupaten: Timika, Merauke dan Nabire, lalu 1 di Kabupaten Sorong (IJB), lama belajar 5 tahun 1-3 setara pendidikan SMA dan kelas 4-5 setara dengan Diploma II. Tahun 2007 diharapkan lulusan pertama KPG mengabdikan dirinya kepada masyarakat khususnya yang tinggal di daerah pedalaman.

B.2 HAK ATAS KESEHATAN

5 Oktober

Suster Chatrin Renwarin, mengatakan saat ini di Biak terdapat 5 orang anak yang menderita gizi buruk. Mereka adalah Tirza (9 bulan), Paulina (3 tahun), Miander (1 tahun), Sipora (1 tahun 5 bulan), dan Wasani (15 tahun), sedangkan Enia dilaporkan meninggal dunia. Kelima pasien di atas ini sedang dirawat di RSUD Biak Numfor, selain itu diberikan makanan yang berkalori, protein dan tambahan gizi yaitu modeska terbuat dari sari buah dan susu.

12 Oktober

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya, Verry Jigibalom membuka pelatihan Kader Posyandu yang diikuti oleh 60 peserta dari 18 distrik. Pelatihan kader ini bertujuan untuk memberikan ilmu bagi peserta agar mampu melayani masyarakat dilingkungannya masing-masing. Pelatihan ini juga merupakan program gizi dan kesehatan bagi ibu dan anak di Kabupaten Jayawijaya.

15 Oktober

Wali Kota Jayapura Drs. M.R. Kambu, MSi, mengatakan kita sekarang menghadapi penyakit musiman yang membahayakan seperti diare dan muntaber. Menurut M.R. Kambu bahwa penyakit ini timbul karena pola hidup yang tidak seimbang, pengetahuan yang rendah, faktor kebersihan yang kurang, rumah yang kurang bersih, kebersihan diri, kebersihan lingkungan yang kurang diperhatikan, air minum dan makanan yang kurang bersih serta wc yang tidak teratur. Untuk itu perlu diperlihatkan oleh masyarakat adalah Dinas Kesehatan perlu melakukan promosi melalui penyuluhan kesehatan kepada masyarakat lewat Puskesmas, Pustu (puskesmas pembantu) dan Polindes di kampung-kampung agar masyarakat mengerti.

17 Oktober

Didimus Waray selaku pihak yang dirugikan melaporkan dugaan penggelapan dana kesehatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nabire pimpinan Jiwayasa dengan dana sebesar 3 M. Kasat Reserse dan Kriminal Polres Nabire AKP Heni Agus Sunandar, membenarkan laporan dari DPRD tersebut. Uang tersebut dicairkan dalam 3 tahap yaitu tahun 2004 cair Rp 1 miliar, tahun 2005 cair 1 miliar dan bulan April tahun 2006 cair 1 miliar; sedangkan dana yang belum jelas senilai Rp 2 miliar.

Kasus dugaan penggelapan uang dilaporkan terjadi juga di Puskesmas Warmare (Manokwari) senilai Rp 23.523.000. Dugaan kasus tersebut diketahui berdasarkan laporan dari Alfianus Warom (53 tahun) mengatakan yang bersangkutan menerima uang tersebut dari bendahara Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari. Dana sebesar itu adalah untuk puskesmas Warmare sebagai penerima dana Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin (JPKMM) yang sampai saat ini belum menerima dana tersebut.

23 Oktober

Penyakit HIV/AIDS di Papua dari data terakhir sudah tercatat 2.703 kasus. Kasus HIV/AIDS di Papua

begitu besar sampai 20 kali dibanding penduduk lain di Indonesia, ungkapan Gubernur Barnabas Suebu, SH di Gedung Negara. Menurut Suebu kalau tidak segera dihentikan akan menyebabkan kematian massal di Papua. Gubernur menghimbau satu-satunya mencegah kematian massal ini adalah melalui pertobatan massal (semua orang Papua, baik laki-laki maupun perempuan). Perlu adanya perubahan perilaku setiap individu dari para pemimpin sampai pada rakyat.

1 November

SKP Jayapura bersama dengan Gereja-gereja di Jayawijaya mengadakan pelatihan penelitian sistem pelayanan kesehatan di Kabupaten Jayawijaya bertempat di Sanggar Kegiatan Belajar Bethesda, Wamena. Kegiatan ini dilanjutkan dengan penelitian lapangan yang memusatkan perhatian ke RSUD Wamena dan 8 distrik di wilayah tersebut: Wamena Kota, Kurulu, Asologaima, Asolokobal, Bolakme, Tiom, Kwiyawage, dan Balingga.

16 November

Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) Distrik Abepura melakukan rapat koordinasi guna menyusun program kerja penanggulangan HIV-AIDS di Distrik Abepura. Sekretaris KPA Distrik Abepura Agus Setiawan, SH mengatakan hal ini dimaksudkan untuk membekali semua anggota dengan pengetahuan tentang HIV-AIDS dan upaya menanggulangi penularan penyakit HIV-AIDS di Distrik Abepura.

20 November

Kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura drg. Sujono mengatakan jumlah kasus HIV-AIDS di Kota Jayapura berkembang pesat, saat ini sudah mencapai 236 kasus data per Septembar 2006. Hal ini perlu mendapat perhatian serius semua pihak, jika tidak jumlah HIV-AIDS akan terus bertambah di Kota Jayapura.

30 November

Bupati Pegunungan Bintang Drs. Wellington L. Wenda mengatakan bahwa dirinya sangat prihatin dengan kinerja tenaga medis dan tenaga pendidik yang ada di wilayahnya. Menurutnya tenaga ini kebanyakan putra asli Papua ditugaskan di Pegunungan Bintang tidak melaksanakan tugasnya dan tanggungjawabnya secara baik; padahal gaji tetap berjalan dengan normal.

1 Desember

Kasus HIV-AIDS pada 30 September 2006 di Provinsi Papua sudah menembus angka 2770 dan 318 diantaranya telah meninggal dunia. Untuk itu menurut Gubernur Bas Suebu pada hari HIV-AIDS sedunia kita membutuhkan pertobatan total untuk mencegah kematian total. Papua telah mencapai suatu tingkat yang benar-benar memprihatinkan karena jumlah yang terus bertambah. 94% penularan terjadi melalui hubungan seks antara laki-laki dengan cara yang tidak aman, melalui hubungan homoseks, transfusi darah, penggunaan alat suntik yang tidak steril, penularan dari ibu ke bayi dan jenis penularan lain yang rendah prosentasenya.

Kasus HIV-AIDS pertama kali ditemukan di Papua pada 1996 dalam jangka waktu 10 tahun meningkat dengan sangat tajam menjadi 1.226 penderita HIV dan 973 AIDS dengan kelompok umur 15-45 tahun dan pelanggan seks bebas paling banyak adalah PNS, sedangkan ibu rumah tangga yang menderita HIV/AIDS hampir sebanding dengan perempuan pekerja seks dan dilihat dari etnis penderitanya orang asli Papua yang lebih banyak jika dibanding dengan pendatang. Untuk itu disarankan tidak berganti-ganti pasangan dan berperilaku seks bebas karena sangat berisiko tinggi sehingga bisa menekan 90% resiko tertular. Hal lain yang perlu diperhatikan juga adalah kesadaran untuk memeriksakan diri secara suka rela ke pusat-pusat kesehatan yang memiliki fasilitas pemeriksaan yang lengkap.

Jayapura merupakan urutan ke tiga dengan 236 kasus HIV-AIDS di bawah Timika yaitu 1019 kasus dan Merauke dengan 834 kasus. Bukan berarti Jayapura aman dari virus yang mematikan sejak

Januari 2005 hingga Desember 2006 di VCT (*Voluntary Counseling and Testing Centre*) Rumah Sakit Daerah Abepura telah ditemukan 77 pasien dinyatakan positif HIV. Data itu sesuai hasil pemeriksaan pihak VCT terhadap delapan ribu warga yang melakukan testing darah lengkap. Data ini dikatakan oleh Ewa Nyoman Arisan, Ketua Panitia pelaksana peringatan hari AIDS se-sedunia di RSUD Abepura.

Dr. Tigor Silaban Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua mengungkapkan bahwa upaya penanggulangan HIV/AIDS di Papua harus lebih gencar lagi dilakukan, dikarenakan jumlah kasus yang terus meningkat, juga ternyata bahwa hampir 30 persen penderita TBC (*Tuberculosis*) penyakit saluran pernapasan akut disinyalir terinfeksi HIV/AIDS.

Koordinator Pelayanan Baru HIV/AIDS di Puskesmas se-Provinsi Papua dr. Beeri Wopari mengatakan dengan adanya pola pelayanan baru diharapkan dapat menjadi deteksi dini terhadap laju pertumbuhan penyakit yang mematikan. Orang yang memeriksakan diri melalui satu alur layanan dengan mendapat konseling atau arahan, kemudian apabila orang itu tidak keberatan dilakukan tes darah untuk HIV dilakukan pengambilan sampel darah untuk diperiksa sebagai langkah awal yang kemudian akan dikirim ke rumah sakit yang dirujuk. Puskesmas juga dapat memberikan ARV kepada pasien HIV/AIDS. Yang membedakan pola baru dan pola yang sebelumnya adalah dahulu Puskesmas belum dapat mengetahui adanya kasus HIV pada orang yang datang berobat. Pola ini sangat membantu puskesmas lebih luas dalam menjangkit secara dini kasus HIV/AIDS di masyarakat dan mengurangi jatuhnya korban karena sudah banyak pasien yang meninggal, apabila ditemukan lebih awal pada stadium ringan, pasien tersebut dapat dipulihkan lebih baik. Dikatakan baru 6 Puskesmas yang menjadi *pilot project* pola baru, yaitu Puskesmas Jayapura Utara, Puskesmas Hamadi, Puskesmas Padang Bulan, Puskesmas Kampung Harapan, Puskesmas Koya Barat dan Puskesmas Demta yang ini disebabkan masih terbatasnya tenaga pelatih dan dana.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura, dr. Soyuno Angkasa, mengatakan pada Desember 2006 jumlah penyakit malaria di Kota Jayapura berjumlah 11. 234 ribu orang yang tersebar di empat distrik di Kota Jayapura yakni Abepura, Muara Tami, Jayapura Selatan dan Jayapura Utara. Paling banyak terdapat dikampung-kampung daerah Distrik Muara Tami.

Kepala Bidang Bina Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Provinsi Papua dr. Suwardi Redjo, M.PH mengatakan sampai saat ini penyakit yang paling dominan menyerang masyarakat adalah penyakit malaria. Hampir semua orang yang ada di Papua terserang penyakit malaria yang awalnya dimulai dengan gigitan nyamuk. Menurutnya penyakit ini masih dikategorikan sebagai berbahaya dan mematikan. Pasalnya jika daya tahan tubuh makin lemah dan lambat penanganannya bisa membuat penderita gila atau meninggal, apalagi jika stadiumnya sudah cukup tinggi. Penyakit ini adalah penyakit yang mematikan, sekitar 5% dari total masyarakat yang menderita penyakit yang cukup populer di Papua. Untuk itu perlu supaya menjaga secara baik kondisi tubuh yang lemah, mudah terserang penyakit malaria, dan disarankan juga untuk menggunakan kelambu dan menjaga supaya rumahnya tidak menjadi sarang nyamuk hal ini merupakan cara pencegahannya.

Ketua Komisi B DPRD Kota Sorong Laurantius Ren Ek SE mengatakan seharusnya instansi teknis terkait baik Dinas Kesehatan maupun Dinas Peternakan agar lebih menyikapi dan mengantisipasi dengan serius dengan koordinasi dan kerja sama, jangan tunggu hingga jatuh korban nyawa manusia dulu baru mengambil tindakan. Hal ini terkait dengan ditemukan kasus flu burung maka Pemkot pro aktif mensosialisasikan cara-cara penularan, penanganan, antisipasi flu burung kepada warga masyarakat sehingga mengetahui dengan jelas dan tidak menimbulkan keresahan di dalam masyarakat.

2 Desember

Meski hari AIDS se-Dunia (HAS) sudah lewat satu hari, namun perkumpulan Keluarga Berencana

Indonesia (PKBI) Papua terus melakukan kampanye HIV-AIDS, maksud kegiatan ini juga untuk menyampaikan informasi dasar tentang HIV-AIDS kepada masyarakat di halaman UPTD (Unit Pelaksana Teknik Dinas) Museum Negeri Waena. Kampanye ini digelar dalam bentuk pameran dan goyang bersama waria, juga memberikan pemahaman dasar dengan memamerkan sejumlah buku, kaset dan CD yang isinya memberikan informasi, pemahaman dan ajakan untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang beresiko penularan HIV-AIDS. Untuk memberikan informasi banyak cara dapat dilakukan demikian penyampaian Direktur Pelaksana PKBI Papua, Drs. John Rahail. Hal lain juga dikatakan oleh Dosen FKIP Universitas Cenderawasih bahwa HAS yang diperingati hari ini memberikan dorongan kepada semua pihak untuk saling kenal, memahami peranan dan tanggung jawab terhadap HIV-AIDS di Papua, khususnya di Kota Jayapura.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura drg. Suyono Angkasa, Mph mengatakan bahwa Desember 2006 jumlah penderita penyakit malaria di Kota Jayapura berjumlah 11.234 ribu yang tersebar di 4 distrik yakni Abepura, Muara Tami, Jayapura Selatan dan Jayapura Utara. Yang paling banyak terdapat dikampung-kampung di Distrik Muara Tami. Selain Malaria sebagai penyakit yang paling banyak kedua setelah penyakit Ispa (Infeksi saluran pernapasan) hal ini diketahui berdasarkan hasil pengambilan sampel darah dari masyarakat di Distrik Muara Tami seperti Kampung Skouw Yambe, Skouw Mabo, Skouw Say dan Kampung Moso (satu kampung yang dekat dengan perbatasan PNG-RI). Hal-hal yang membuat masyarakat dapat terjangkit penyakit ini adalah disebabkan oleh kurang pengertian tentang hidup bersih, serta tidak teraturnya mengkonsumsi obat-obatan sehingga mudah terserang malaria.

5 Desember

Balai karantina Kelas II Sentani bekerja sama dengan Dinas Pertanian dan Pertenakan Kabupaten Nabire mengadakan sosialisasi pencegahan masuknya penyakit flu burung dan rabies di Papua. Kegiatan ini diadakan di Hotel Mahavira Nabire. Kegiatan ini diikuti oleh instansi terkait seperti Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire, Perhubungan Laut, Perhubungan Udara, KP3 Laut, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan undangan lainnya. Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Ir. Wellem R. Rumbiak atas nama Kepala Balai Karantina Hewan Kelas II Sentani. Dalam sambutannya Rumbiak mengatakan bahwa Propinsi Papua dan Irian Jaya Barat merupakan daerah terancam rabies dan flu burung, maka dua hal penting yang menjadi masalah di Papua dan Irian Jaya Barat yakni penyakit flu burung dan rabies. Dirinya berharap dengan adanya kegiatan sosialisasi ini dapat memberikan masukan yang berarti dan berguna dalam rangka pencegahan masuk dan penyebaran penyakit flu burung dan rabies di Kabupaten Nabire. Selain itu kegiatan sosialisasi ini juga diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan peternakan pada masyarakat luas sehingga dapat menghentikan kegelisahan, rumor berkaitan dengan flu burung dan rabies.

5 Desember

Konsultan UNICEF dr. Sabrina Prasetyo mengatakan HIV-AIDS di Papua terus meningkat, bahkan Juni 2006 mencapai 2.702 Kasus. Ironisnya 98% peningkatan itu melalui hubungan seks yang tidak aman. Dari data yang dikeluarkan Dinas Kesehatan Provinsi Papua, kaum muda di SMP mencapai 12% dan di luar sekolah 40%. Menurutnya untuk menekan laju peningkatan kasus HIV-AIDS khususnya di Papua UNICEF mempunyai dua program: program yang dilakukan di sekolah (Life Skill Education – LSE) dan program yang dilakukan di luar sekolah. Pekerjaan ini sudah dilakukan dua fase: fase pertama tahun 2003 – 2006 dan fase kedua 2006 – 2009. Awalnya 6 Kabupaten menjadi pilot project: Kabupaten Jayapura, Jayawijaya, Manokwari, Sorong dan Biak. Kemudian ditambah lagi 6 kota: Kabupaten Supiori, Merauke, Mimika dan Kota Jayapura serta Kota Sorong. Semuanya ada 11 kabupaten dan kota.

Direktur Yayasan Pengembangan Kesehatan Masyarakat (YPKM) Provinsi Papua Drs. T.G. Butar-Butar mengatakan sejauh ini pihaknya belum melihat adanya kepedulian para pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi, Kota/Kabupaten di Papua terhadap masalah HIV-AIDS. Jika dilihat perkembangan HIV-AIDS di wilayah Provinsi Papua semakin memprihatinkan, sebab virus tersebut

sudah menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

9 Desember

Direktur Yayasan Persekutuan Pelayanan Masirey (YPPM) Provinsi Papua Pdt. Ester Wanda mengatakan dari 30 anak jalanan (Anjal) yang ditangani pihaknya, 60% di antaranya menderita penyakit infeksi menular seksual (IMS). Hal itu dikarenakan pola hidup para Anjal tersebut merupakan kelompok yang mempunyai perilaku menyimpang. Di antaranya suka mengisap lem aibon, kebiasaan mengkonsumsi minuman keras (Miras) serta seks bebas baik dengan teman sendiri maupun dengan orang lain di luar kumpulannya. Dari hasil pemeriksaan yang ada, dari 30 orang yang kami tangani itu 60% telah tertular IMS, pihaknya berharap pemerintah Kota atau Provinsi memperhatikan permasalahan ini sebab bila tidak mereka sangat berbahaya bagi HIV-AIDS. Sekarang buat program yang tepat mengenai sasaran bila pemerinah tidak punya tenaga bisa bermitra dengan LSM untuk membina para anak jalanan.

Kasus HIV/AIDS di Kota Jayapura sudah sangat mengkhawatirkan. Data terbaru ditemukan 3 ibu hamil positif HIV. Menurut direktur YKPM Papua Drs. Tahi G Butar-Butar ketiga ibu hamil tersebut selanjutnya diberikan pendampingan oleh pihak Puskesmas serta beberapa LSM yang bergerak di bidang pencegahan virus HIV-AIDS seperti layanan konseling serta antiretroviral (ARV). Ketiga ibu tersebut walaupun positif namun bayi mereka bisa tertolong dengan terapi antiretroviral (ARV), serta persalinan dengan bedah sesar sehingga kelak anaknya tidak tertular. Para ahli menyimpulkan bahwa frekwensi tertularnya bayi dari ibunya yang positif HIV adalah pada masa kehamilan diperkirakan 5-20% sementara untuk saat persalinan 10-20% lalu masa saat ibu sedang menyusui 10-20%. Dengan demikian peran kader kesehatan, tenaga pendamping sangat diperlukan demi memberikan pertolongan kepada ibu yang positif HIV.

Sementara itu wakil Walikota H Sujarwo, BE menghimbau agar pencegahan HIV-AIDS dapat dilakukan oleh semua pihak termasuk ibu-ibu rumah tangga (IRT) sehingga ke depan virus yang mematikan tersebut dapat dicegah penyebarannya. Dalam sosialisasi program pencegahan dari ibu ke anak ini diikuti oleh 60 peserta yang terdiri dari LSM, kader PKK/Posyandu, dan para petugas kesehatan seperti petugas VCT.

11 Desember

Pernyataan Pdt. Yose Hilka dari GIDI Kabupaten Pegunungan Bintang beberapa waktu lalu bahwa banyak warga Pegunungan Bintang yang meninggal akibat terserang kelaparan, malaria, muntaber dan ISPA dibantah oleh Sekda Kabupaten Pegunungan Bintang John Zine Tjuwale, mengatakan, "Jumlah kematian akibat dari muntaber, kelaparan dan Ispa itu yang dilaporkan oleh pihak geraja adalah mengulang kembali bukan sesuatu yang baru. Hal itu kami *push* ke menteri Kesehatan dan Menteri Sosial".

SKP Jayapura meluncurkan laporan penelitian sistem pelayanan kesehatan di Kabupaten Jayawijaya dalam sebuah lokakarya yang bertema "Sehat itu Sa Pu Hak"¹. Dari temuan SKP disimpulkan bahwa kondisi layanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Jayawijaya amat rendah. Anggaran Pemkab yang tersedia hanyalah 4% dari APBD 2006. Kondisi geografis dan keterbatasan infrastruktur menghalangi pelayanan ini sekaligus segi konflik politis yang melanda sebagian wilayah yang menjadi sasaran penelitian. Rasio tenaga medis dengan populasi penduduk juga menunjukkan tingkat yang sulit untuk dapat menjangkau layanan kesehatan di tingkat kampung. Dalam presentasi tersebut, Sekda dan Staf Bappeda Kabupaten Jayawijaya berjanji akan menindaklanjuti temuan ini.

15 Desember

Ketua DPRD Kota Jayapura, Theofilus Bonay mengungkapkan keberadaan posyandu harus mendapatkan perhatian khusus anggaran sebab minimnya dana menyebabkan posyandu belum berfungsi dengan baik.

1 Diterbitkan dalam bentuk buku oleh Tim SKP Jayapura, 2008. *Sehat itu Sa Pu Hak*, Jakarta: LSPP dan SKP Jayapura.

Wakil Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua dr. Bagus Sukaswara mengatakan meski sudah banyak pihak yang mau peduli terhadap penanggulangan HIV-AIDS, namun tantangan yang dihadapi semakin berat dan kompleks. Katanya orang banyak yang terlibat dalam penanganan tetapi jumlah penderita HIV-AIDS semakin meningkat. Selain itu medan tantangan yang kita hadapi juga semakin luas, misalnya bagaimana mencegah agar anak yang baru lahir itu terhindar dari HIV-AIDS.

16 Desember

dr. Ketut Martayasa mengatakan bahwa penularan HIV dari ibu hamil yang positif mengidap HIV terhadap bayinya bisa dicegah. Menurutnya salah satu kendala dalam upaya pencegahan HIV adalah ibu yang diketahui terinfeksi HIV terkadang enggan mendapatkan perawatan seperti halnya yang dialami oleh Puskesmas Jayapura Utara. Petugas sudah membimbing tetapi kadang-kadang ibunya menghindar, oleh sebab itu dikatakan bahwa proses konseling supaya ada kesadaran dan tidak ada rasa takut untuk mendapatkan perawatan, yang terpenting saat menyampaikan konseling itu adalah segala biaya perawatan itu gratis. "Agar anak tidak tertular penyakit-penyakit lain yang harus disembuhkan dan kemungkinan penularan HIV 5-10%; kemudian pada saat lahir penularannya 10-20%, maka operasi perlu direncanakan bukan darurat sebab air tuban pecah atau ada darah mengenai bayi maka kemungkinan besar tertular HIV", kata dokter Ketut.

18 Desember

Kebijakan harus menyediakan tenaga perawat 225 orang untuk rumah sakit di Timika karena setiap tempat tidur harus dibutuhkan satu tenaga perawat. Kepala SPK Timika H. Ibrahim Iba mengatakan persiapan Sumber Daya Manusia (SDM) menjelang beroperasinya RSUD sangat kurang. Yang penting bahwa setiap rumah sakit tipe A dan D harus memiliki tenaga medis dan para medis. Sampai sekarang SPK Timika belum mempersiapkan semua itu hanya sebatas mantri dan perawat pada hal kami sudah usulkan kalau bisa sampai D3 atau seperti Akademi Perawat (Akper).

"Mencoba untuk melayani lebih optimal lagi, sementara anggaran yang tersedia sangat jauh dari memadai," kata Direktur RSUD Dok II Jayapura dr. Paulina Watopa. Harapannya adalah anggaran yang akan dialokasikan bagi RSUD Jayapura tahun 2007 bisa berjalan sesuai dengan visi dan misi Gubernur di mana tidak mengacu pada penggunaan anggaran namun semua sangat bergantung dengan visi misi yang ada. Dijelaskan sebagai RSUD rujukan dan RSUD pendidikan, semua kebutuhan harus lebih optimal dan semua kebutuhan pelayanan bisa terpenuhi, tentu saja hal ini bisa didukung dengan tersedianya fasilitas dan anggaran yang memadai untuk RSUD.

Sampai saat ini penyakit yang menonjol di Papua adalah penyakit Malaria dan TBC hal itu diungkapkan oleh Kasubdin Bina Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Papua, dr. Suwardi Redjo. Untuk setiap penduduk Papua penyakit Malaria merupakan epidemik dan tersebar merata. Dijelaskan bahwa prevalensi penyakit Malaria di Papua mencapai 45 kasus per 1000 penduduk, artinya dari 1000 orang dalam satu tahun ada 45 orang yang terkena penyakit Malaria. Semua diharapkan waspada, juga pihaknya berusaha untuk melakukan pemutusan rantai penularan dengan cara penderita yang sekarang akan menjadi penderita yang terakhir. Katanya bahwa malaria sangat epidemik karena lingkungan yang kurang bersih. Juga penyakit lain yang menonjol yaitu TBC paru, penyebabnya karena lingkungan. Penyakit ini di Papua cukup banyak mencapai 21 orang per 1000, penanganannya membutuhkan pemahaman yang menyeluruh salah satunya dengan cara penguatan pelayanan Puskesmas dalam melakukan diagnosa, perawatan penderita dan penyediaan obat anti TBC juga peran masyarakat.

19 Desember

Walikota Jayapura, M.R. Kambu, di saat peresmian Klinik Kesehatan Reproduksi Puskesmas Hamadi mengharapkan setiap Puskesmas untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Pemerintah Kota Jayapura telah mengupayakan berbagai fasilitas kesehatan baik gedung maupun fasilitas lainnya. Termasuk biaya operasional bagi setiap Puskesmas yang ada. Bidang Kesehatan merupakan salah

satu program prioritas Pemkot Lima Tahun ke depan.

20 Desember

Peningkatan angka penderita HIV-AIDS di Jayapura menjadi keprihatinan WaliKota Jayapura M.R. Kambu. Menurutnya virus tersebut sudah memasuki lampu merah sehingga harus diwaspadai. Dijelaskannya bahwa sesuai perkiraan terdapat 11 ribu pengidap HIV-AIDS di Provinsi Papua (data Dinkes Propinsi Papua) sehingga bila dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada, hal tersebut telah menjadi ancaman besar bagi masyarakat Papua. Walikota juga mengatakan bahwa karena penyebarannya semakin tajam maka semua pihak harus menyiapkan langkah-langkah penanganannya, salah satunya terus melakukan sosialisasi bagi seluruh komponen masyarakat tanpa terkecuali. Penyebarannya melalui cairan maka perlu setia pada pasangan, jauhi minuman beralkohol sebagai pemicu hubungan seksual, pakailah kondom bila keadaan terpaksa. Juga dalam penyampaiannya tidak mendiskriminasi para ODHA, karena belum tentu ODHA bersangkutan tertular virus itu karena perilakunya tetapi bisa melalui orang lain. Misalnya seorang ibu yang baik tertular karena suaminya, kita punya tanggung jawab untuk melindungi ODHA.

22 Desember

Kasus HIV-AIDS di Jayawijaya dengan 38 kasus menjadi perhatian serius, Pemkab bertekad menekan penyebaran tersebut. Kata Plt. Bupati Jayawijaya Nicolas Jigibalom selesai peresmian penggunaan gedung KPAD bahwa kita harus menghentikan penyebaran penyakit yang disebabkan virus HIV itu. Bila hal itu dibiarkan saja dirinya khawatir dengan satu generasi Jayawijaya khususnya generasi muda yang akan melanjutkan pimpinan dan tugas daerah ini akan punah. Ini tidak boleh terjadi dan harus diperangi oleh seluruh komponen bangsa di daerah ini. Untuk menghindari penyakit ini kunci terletak pada diri seseorang, meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan dan hanya melakukan hubungan dengan istri di rumah. Jayawijaya merupakan peringkat ke-5 di Papua setelah Sorong, Merauke, Timika dan Nabire. Dengan masalah ini pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar 500 juta guna mengawali program penanggulangan HIV-AIDS, dana akan dipakai untuk menunjang sekretariat KPAD, pembahasan Perda Program Penanggulangan HIV-AIDS, dan Talk Show melalui media masa.

22 Desember

Ketua Bhayangkari Polda Papua Ny. Evie T Jacobus membacakan sambutan Menteri Pemberdayaan Perempuan Prof. Dr. Meutia Hatta Swasono pada peringatan Hari Ibu ke-28 sebagai momentum untuk memperingati 10 tahun pelaksanaan Gerakan Sayang Ibu (GSI) yang diluncurkan pemerintah bertepatan dengan peringatan hari ibu tahun 1996 lalu. Gerakan sayang ibu bertujuan untuk mendorong dan menggalang partisipasi di dalam menurunkan angka kematian ibu hamil, bersalin, nifas serta bayi yang baru lahir. Perayaan hari ibu ini berlangsung di dua tempat untuk tingkat Provinsi di Sasana Krida dan untuk Kota Jayapura di lapangan upacara Kantor WaliKota Jayapura. Menurut Ibu Evie angka kematian Ibu di Indonesia semakin tinggi yakni 307/100.000 kelahiran hidup, mencerminkan masih memprihatinkan kualitas SDM Indonesia khususnya perempuan.

Menurut Sekda Kota Jayapura Drs. Yesaya Udam bahwa peringatan hari Ibu ke-28, tahun 2006 merupakan momentum yang memiliki nilai strategis sebab selain memperingati hari Ibu juga memperingati pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan tindak kekerasan dalam rumah tangga serta sosialisasi Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarus utamaan gender. Menurut Penasehat Organisasi Wanita (GOW) Kota Jayapura W.W. Kambuaya berharap momentum ini dapat dihayati, dan terus meningkatkan presentasinya yang cukup berat, baik dalam keluarga, berbangsa dan bernegara.

23 Desember

Direktur penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan Departemen Kesehatan RI Nyoman Ngadung menilai, "Penularan HIV-AIDS di Merauke sudah pada tingkat yang membahayakan kalau lampu sudah pada posisi merah, jadi kita tidak main-main tapi harus serius". Hal itu

disampaikan oleh Nyoman Ngandung setelah melakukan peninjauan RSUD Merauke dan data kumulatif yang HIV-AIDS yang dikeluarkan Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke. Pada kesempatan itu, Nyoman menjanjikan akan mengirim 500 buah kelambu sehubungan dengan masalah malaria yang masih sering menyerang masyarakat.

28 Desember

Ibu Rumah Tangga (IRT) dan perempuan usia produktif sangat rentan terhadap penularan penyakit HIV-AIDS. Oleh karena itu, mereka diharapkan bisa memahami dengan baik tentang cara-cara pencegahan dan penularan dari penyakit HIV-AIDS. Hal ini dikatakan Direktur Yayasan Pengembangan Kesehatan Masyarakat (YPKM) Papua, Drs. Tahi G. Butarbutar saat sosialisasi program PMCT (pencegahan HIV dari ibu hamil ke bayi) di aula Kantor DPRD Kota Jayapura. Seorang ibu harus mengetahui cara-cara pencegahan atau penularan HIV-AIDS dengan baik sebab kalau tidak dirinya bisa terinfeksi penyakit tersebut. Kasus ini terus bertambah di Papua, di mana bayi yang dinyatakan terinfeksi HIV karena tertular dari ibunya sebanyak 45 orang. Kegiatan-kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman tentang HIV. Kegiatan sosialisasi program PMCT ini diikuti oleh 100 orang, mereka adalah ibu rumah tangga, dan perempuan usia produktif mulai dari umur 15-35 tahun.

B.3 KESEJAHTERAAN UMUM

6 Oktober

Beberapa warga yang mengaku diri pendukung Gubernur pasangan Barnabas Suebu, SH dan Wagub Alex Hesegem, SE menuju ke Kantor Gubernur Papua di Dok II, hendak membawa proposal untuk meminta dana bantuan sudah masuk sekitar 14 proposal dari kelompok nelayan dengan dana yang diminta sebesar Rp. 30 juta per orang. Dari 14 proposal nelayan itu sama yaitu sampul luar proposal, bentuk hingga isi proposal, redaksi kalimat, bahkan jumlah dananya juga sama yaitu Rp. 30 juta. Karena itu diduga dibuat oleh orang yang sama.

8 Oktober

Sekretaris perwakilan Komnas HAM Papua, Frits Ramandey, S.Sos, mengatakan di Kabupaten Biak Numfor terjadi pelanggaran HAM di Bidang Kesehatan dan Pendidikan masih menjadi persoalan yang utama. Misalnya masyarakat ingin berobat/mendapatkan obat masih sangat sulit, sementara obatnya cukup mahal. Padahal kalau dilihat dana Otonomi Khusus (Otsus) sudah berjalan lima tahun. Selain itu hak ulayat dan pengelolaan hutan masyarakat Biak Numfor masih dirugikan, disebabkan karena belum ada aturan yang jelas.

9 Oktober

Proposal kali ini lebih banyak, yaitu mencapai ribuan proposal dari warga yang mengaku pendukung Gubernur Barnabas Suebu, SH. Proposal-proposal tersebut rupanya bukan dibuat sendiri melainkan dibeli dengan harga Rp.100.000 hingga Rp.150.000 dibeli dari Ny BT (bukan nama aslinya). Proposal-proposal itu dijawab Gubernur dengan sebuah surat. Adapun isi surat dari Gubernur bernomor 900/2305/SET perihal jawaban proposal tertanggal 5 Oktober ungkap Dra. Anna Jumaenah adalah tidak tersedianya dana untuk menjawab proposal dari masyarakat, karena program anggaran tahun 2006 tidak mungkin digeser untuk program lain. Surat tersebut ditandatangani oleh Wakil Gubernur Papua Alex Hesegem, SE. Keinginan masyarakat bisa terjawab di tahun 2007 mendatang, karena akan diturunkan dana langsung ke kampung-kampung untuk kepentingan bersama di kampung.

10 Oktober

Frans Maniagasi (anggota Pokja Papua di Jakarta) melihat kondisi yang terjadi di Papua ini mengenai ribuan warga yang memasukkan proposal kepada Gubernur untuk meminta bantuan dana dinilainya sebagai salah satu kelemahan terbesar yang dilakukan pemerintah selama ini.

19 Oktober

Gubernur Papua Barnabas Suebu, membeberkan hasil-hasilnya. Menurut Gubernur Suebu, dari Musrenbang tersebut, telah disepakati bahwa pelaksanaan pembangunan di tahun 2007 nanti, Pemerintah Provinsi Papua bersama Pemerintah Kota dan Kabupaten, akan konsentrasi pada empat point penting. "Ada 4 agenda penting yang merupakan hasil Musrenbang yang akan kita laksanakan pada tahun 2007 nanti," kata Gubernur kepada wartawan di Sasana Krida Kantor Gubernur Papua, Dok II. Empat agenda penting tersebut antara lain, pertama terciptanya good government di Papua yang dicapai melalui reformasi birokrasi, reformasi anggaran belanja, pengembangan sistem baru dalam anggaran belanja dan jasa, serta peningkatan capacity pada titik lemah mulai dari tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, hingga Distrik. "Dengan demikian diharapkan pemerintahan yang ada nanti akan semakin cerdas melayani rakyat dengan sebaik-baiknya," ujarnya. Agenda kedua adalah perbaikan kesejahteraan rakyat yang difokuskan pada perbaikan kesejahteraan rakyat di kampung-kampung melalui program perbaikan makanan dan gizi rakyat, perbaikan dan peningkatan mutu kesehatan dan pendidikan. Untuk menuju kearah tersebut akan diadakan program pengembangan ekonomi rakyat melalui perumahan dan infrastruktur. "Untuk program ini, kami akan sediakan uang sebesar Rp 100 juta dalam bentuk *block grant* yang langsung diserahkan ke kampung-kampung," ungkapnya.

13 Desember

Desakan dari sejumlah elemen untuk menaikkan UMP (Upah Minimum Provinsi) dinaikan menjadi Rp 1 juta rupanya sulit direalisasikan karena keputusan dewan pengupahan yang menaikkan UMP sekitar 10-20% dari UMP sebelumnya sebesar Rp. 971.000, sudah merupakan keputusan final sulit bagi kami untuk mengubah keputusan dewan pengupahan Provinsi Papua WD Ochabair katanya juga bahwa apa yang sudah ditetapkan itu melalui proses pengkajian dan telah dikaitkan berbagai sektor yang ada mulai dari pangan, papan dan sampai pada transportasi

14 Desember

Harga beras mulai naik khususnya beras antarpulau di Kabupaten Biak Numfor saat ini mulai mengalami kenaikan yang rata-rata 500/kg. Menurut Syamsir salah seorang pedagang, kenaikan itu sudah berlangsung sejak seminggu. Untuk beras Cap Jempol harganya sekarang Rp. 6000 per kilogram sebelumnya 5.500 per kilogram, yang paling mahal adalah beras Cap Tawon sebelumnya Rp. 6.500, sekarang sudah Rp. 7.000 per kilogram. Katanya beras ini naik dikarenakan beras yang kami beli dari distributor juga telah naik. Sementara itu Kepala Bulog Sub Divre Biak Numfor Lubis Husainy mengaku bahwa harga beras naik itu dikarenakan produksi dari Jawa juga naik, selain itu permintaan yang besar apalagi menjelang hari raya.

18 Desember

Empat Menteri akan kunjungi Papua tiga di antaranya akan ke Yahukimo mereka adalah Menko Kesra Aburizal Bakri, Menteri Pertanian Anton Apriantono dan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari bersama pejabat kementerian PU. Sedangkan Menteri Kehutanan MS Ka'ban rencana akan melakukan penanaman 1000 pohon lindung bersama KNPI Papua di Bumi Perkemahan (Buper) Waena Kota Jayapura. Sedangkan ke-3 Menteri yang ke Yahukimo direncanakan akan mengunjungi Kurima dan Tangma untuk melakukan evaluasi dari program yang dilakukan sebagai upaya antisipasi bencana setahun yang lalu.

19 Desember

Masyarakat kecewa dengan batalnya kedatangan Menko Kesra Abdulrizal Bakri bersama menteri lainnya ke di Distrik Tangma, Kabupaten Yahukimo, kekecewaan ini bertambah besar apalagi sebelumnya Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono akan datang berkunjung pada Juni 2006 lalu namun tidak jadi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Desa Induk Tangma Tobias Elopere. Karena masyarakat rela turun gunung dan menyiapkan babi 24 ekor belum lagi saat Presiden masyarakat sudah memotong babi 54 ekor, kata Bapak Tobias bahwa jika pemerintah tidak mau datang berkunjung ke Tangma jangan mengobral janji saja akan mengunjungi Tangma. Kami ingin Menko

Kesra datang supaya kami ingin menyampaikan aspirasi agar kami mendapat perhatian yang serius dalam pembangunan di daerah kami yang ada di pedalaman ini. Kekecewaan ini juga disampaikan oleh Kepala Suku Tangma Ohena Elopere, "Kami seluruh lapisan masyarakat sangat kecewa dengan batalnya kunjungan Menteri ini karena sudah 2 kali kunjungan ke Tangma batal". Namun Bupati Pahabol mengatakan, "Kami akan menseriusi program-program yang telah dilaksanakan dan akan terus dilaksanakan di Tangma".

20 Desember

Akibat THR (Tunjangan Hari Raya) tidak dibayar, ratusan guru di Wamena melakukan demonstrasi guna mempertanyakan hak mereka, ditanggapi oleh Plt. Bupati Jayawijaya Nocolas Jigibalom akan dibayar oleh Pemerintah Kabupaten Jayawijaya melalui Dinas Pendidikan dan Pengajaran selaku instansi teknis. Katanya bahwa semua hak para guru sudah kami bayarkan termasuk THR baik untuk yang Muslim maupun Kristen melalui dinas P dan P. Tuntutan para pendemo juga berkaitan dengan penggantian Kepala Dinas P dan P tapi itu bukan urusan para pendemo itu merupakan kewenangan Bupati Jayawijaya selaku Pimpinan Daerah. Pergantian itu sudah sesuai prosedurnya.

26 Desember

Dikarenakan natal berdampak pada kenaikan harga barang kebutuhan pokok dan tarif angkutan umum jurusan Wamena ke beberapa daerah. Kenaikannya antara 50% sampai 100% dari harga normal. Hal ini dikatakan oleh Ketua DPD Partai Golkar Amos Kenelak bahwa ia menyayangkan kenaikan ini. Dengan demikian, Ketua DPD ini mendesak pemerintah Kabupaten Jayawijaya menyikapi hal ini dan menentukan harga pokoknya. Ia mencotohkan beras yang harganya Rp 300 ribu kini menjadi 365 ribu.

27 Desember

Pendataan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Jayapura 2006 tercatat 22.000 kepala keluarga (KK) masuk dalam kategori miskin. Data ini dipakai untuk memperoleh jata beras miskin (Raskin) dan bantuan lainnya. Kepala BPS Kota Jayapura, Drs. Johanis Lahilatu mengatakan jumlah ini masih akan diseleksi untuk diajukan ke pemerintah sebagai acuan dalam pengalokasian Raskin atau keperluan lainnya dalam mengambil kebijakan pembangunan. Kepala BPS ini mengatakan bahwa kategori miskin ini diseleksi lagi kemudian akan dibagi dalam tiga kelompok yakni kategori sangat miskin, miskin dan hampir miskin. Hal ini dilakukan supaya data tersebut benar-benar akurat sehingga ketika ada bantuan maka yang berhak adalah masyarakat yang sangat miskin. Proses ini dilakukan sangat ketat karena ada masyarakat yang sangat miskin tetapi tidak memperoleh bantuan

28 Desember

Adanya perhatian dari BPMD Provinsi Papua yang pada anggaran 2007 nanti masih tetap akan memberikan perhatian terhadap pengembangan masyarakat terisolir disambut positif Sekretaris Komisi E DPRD Yosephine Pigai, S.Sos. Katanya bahwa program pengembangan masyarakat terisolir sangatlah wajar dan harus terus didorong untuk dimasukkan sebagai salah satu program prioritas pembangunan di daerah ini. Katanya sebagian besar penduduk berdomisili di daerah perkampungan dan daerah-daerah terisolir maka program ini sangat tepat untuk dilakukan. Bentuk paket bantuan maupun pembangunan sarana prasarana infrastruktur kampung, terutama air bersih jalan dan jembatan sangat tepat terealisasikan dan kami di dewan akan mendukungnya. Program akan berjalan dengan baik bila kemitraan yang selama ini telah dibangun oleh pemerintah dengan LSM, tokoh masyarakat, agama, dan adat tetap dipertahankan.

Bencana banjir yang sering melanda sejumlah wilayah atau titik di Kota Jayapura nampaknya akan menjadi perhatian serius Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Jayapura pada anggaran 2007. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Jayapura (PU) Malkidin Soltief mengatakan pada 2007 nanti pihaknya akan membuat perencanaan terhadap penanganan banjir, salah satunya dengan memperlebar saluran pembuangan di wilayah yang sering mengalami banjir tersebut. Hal lain juga dikatakan bahwa

penanganan banjir secara menyeluruh yakni melakukan penanganan mulai dari hilir atau saluran-saluran air disepanjang jalan.

B.4 PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM

3 Oktober

Sekitar 100 orang bersenjata panah dan parang membobol pagar areal pengolahan tembaga PT Freeport Indonesia di Kabupaten Mimika, Papua. Mereka memasuki unit pengolahan konsentrat tembaga dan menuntut PT Freeport Indonesia menghentikan produksinya. Belum diketahui apa faktor pemicu aksi pembobolan yang terjadi sekitar pukul 16.30 WP itu. Para warga tersebut diduga bagian dari kelompok pendulang tradisional di aliran tailing PT Freeport Indonesia di Desa Banti, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika.

10 Oktober

Bupati Keerom, Celcius Watae, mengungkapkan pihaknya menemukan daerah yang memiliki kandungan emas cukup besar. Kawasan yang memiliki kandungan emas ini terdapat di Kali Kai dan Kali Mafi, yang terletak di Distrik Senggi, Kabupaten Keerom, Papua. "Sebenarnya eksplorasi sudah dilakukan sejak 1997," kata Celcius Watae di Jayapura kemarin. Daerah yang dieksplorasi membentang dari Distrik Kaureh Lereh, Kabupaten Jayapura, sampai Kesna Kundu di Distrik Senggi, Kabupaten Keerom.

11 Oktober

Lembaga Musyawarah Adat Amungme dan Lembaga Musyawarah Adat Kamoro meminta PT Freeport Indonesia menghentikan dana kemitraan atau dana satu persen. Dana itu dinilai gagal menyejahterakan masyarakat dan sebaliknya menimbulkan berbagai masalah sosial dan konflik di Kabupaten Mimika, Papua. Hal itu disampaikan Ketua Badan Musyawarah Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMAM), Andreas Anggaibak.

17 Oktober

Freeport-McMoRan Copper and Gold Inc. Yang memiliki tambang emas terbesar di dunia meraih keuntungan lebih dari dua kali lipat karena kenaikan tajam harga emas dari tembaga dalam kuartal ketiga tahun ini. Pada 30 September 2007, perusahaan tersebut meraup keuntungan senilai \$350,7 juta, atau \$1,67 per saham, dengan pendapatan \$1,64 milyar. Padahal pada tahun sebelumnya, perusahaan tersebut hanya meraih \$165,8 juta, atau 86 sen per saham, dengan pendapatan \$383,3 juta. Para analisis sebelumnya meramalkan pendapatan \$1,59 per saham berdasarkan penjualan saham senilai \$1,31 milyar.

Freeport-McMoRan menjelaskan bahwa harga emas rata-rata mencapai \$608,79 per ons pada kuartal tersebut, dibandingkan dengan \$445,57 per ons tahun lalu; sementara harga tambang rata-rata \$3,43 per pon dibandingkan dengan harga tahun lalu yang hanya sebesar \$1,73 per pon. Total penjualan 323,6 juta pon tembaga dan 478.000 ons emas, dibandingkan dengan 346,3 juta pon tembaga dan 475.000 emas pada kuartal ketiga 2005.

29 November

Tugboat milik PT Wapoga yang baru saja memuat 362 batang atau 24.114 m³ kayu gelondongan meledak. Menurut anak buah kapalnya, John Yansen, ledakan tidak mungkin berasal dari mesin kapal karena pada saat itu mesin mati dan hanya generator yang menyala. Delapan ABK, termasuk dua warganegara Malaysia, selamat, tetapi tug-boat rusak dan tenggelam.

2 Desember

Setelah terjadi ledakan di logpond areal HPH PT WMT Bonggo pada 29 November 2006 dan PT WMT Biak pada 1 Desember 2006, Kapolda Papua, Tommy Yakobus, memerintahkan Tim Detasemen 88

Polda Papua yang dipimpin Kombes Fachruddin dan Tim Gegana Polri serta Direskrim Polda untuk mengusut tuntas hal tersebut.

4 Desember

Wakapolda, Max Donald Aer, mengatakan hingga kini pihak kepolisian belum menemukan hubungan kedua kasus peledakan tersebut. Tim Penyidik Polda Papua, Densus 88, tim forensik Polda Sulsel sudah melakukan olah TKP namun hingga kini belum diketahui hasilnya.

18 Desember

Kejahatan pembalakan liar di Indonesia khususnya di Papua merupakan salah satu masalah kehutanan yang menjadi perhatian pemerintah hingga 2009. Kata Menteri Kehutanan M.S. Ka'ban pada acara pencaanangan rehabilitasi di Rinawen, Buper-Waena, "Cukong-cukong kayu akan terus dikejar karena telah merugikan negara dan masyarakat. Kegiatan pembalakan akan terus harus dibasmi dan sama sekali tidak diperkenankan karena ini menjadi program prioritas kami". Juga bahwa menjadi prioritas pemerintah adalah pembagian kewenangan pengelolaan hutan yang masih terus dipersoalkan selama ini. Meskipun tidak mudah namun pihaknya melihat itu sebagai penyelesaian konflik tentang kewenangan. Batas-batas kewenangan antara pusat, daerah dan masyarakat harus diperjelas sehingga pengelolaan hutan ini benar-benar memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

BAGIAN II

ANALISIS LINTASAN PERISTIWA

PENGANTAR

Secara umum sepanjang penghujung tahun 2006 ini dinamika sosial budaya di Papua masih diwarnai dengan lanjutan berbagai peristiwa penting pada pertengahan tahun. Beberapa peristiwa konflik pada tengah tahun 2006 masih terus berlanjut dan ada juga yang terulang kembali di akhir tahun ini. Situasi keamanan dan pertahanan di wilayah Kabupaten Puncak Jaya berada pada tensi yang cukup tinggi untuk 3 bulan terakhir ini dan sangat menyita perhatian pihak aparat keamanan baik Polisi dan TNI AD.

Di bidang pemerintahan, sengketa seputar Pilkada Bupati di Paniai, Mappi dan Puncak Jaya mengakibatkan terganggunya roda pemerintahan. Sementara itu masyarakat kita dibingungkan dengan adanya sikap saling lempar tanggungjawab antara pihak penyelenggara pemerintahan terhadap kemacetan implementasi Otsus di Papua.

Pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya diwarnai dengan berbagai persoalan yang seakan tak pernah habis. Hak pendidikan digerogeti oleh korupsi, sengketa tanah adat, serta lemahnya niat politik pemerintah untuk memenuhi hak-hak warganya. Pola yang sama terjadi pula dalam pemenuhan hak atas kesehatan yang masih sebatas unsur pengobatan.

Di tengah situasi yang tidak menentu ini, masyarakat kita harus berhadapan dengan pemodal besar yang terus menghisap kekayaan sumberdaya alam Papua, baik hutan, hasil tambang dan hasil laut, tanpa ada niat baik untuk memberdayakan masyarakat.

Gambaran situasi hak asasi manusia di akhir tahun ini seakan memberitahukan kepada kita masih banyak hal yang belum beres dan belum selesai di tahun 2006 ini. Kita menutup tahun ini dengan penuh kecemasan. Apakah akan ada perubahan yang lebih baik di tahun mendatang?

A. Analisis Hak-Hak Sipil dan Politik

oleh : A.F.Sari Rosa Moiwend

1. ANCAMAN TERHADAP KEBEBASAN WARGA

Penghujung tahun 2006 ini masih diwarnai dengan kelanjutan penanganan kasus insiden 16 Maret awal tahun ini dan penanganan kasus Mile 62 Timika. Proses hukum kasus 16 Maret yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jayapura dirasakan tidak adil oleh para tersangka, terutama oleh pihak keluarga. Mereka merasa apa yang dituduhkan kepada mereka itu tidak terbukti karena mereka sama sekali tidak melakukan tindak pidana, apalagi sampai menewaskan lima anggota aparat keamanan. Sebagian besar dari mereka yang menjadi tersangka adalah korban 'salah tangkap' pihak keamanan yang melakukan penyisiran pasca peristiwa 16 Maret.

Di bagian lain, penanganan kasus Mile 62 Timika sampai pada tahap tuntutan jaksa untuk menghukum terdakwa Anton Wamang dengan tuntutan 20 tahun penjara. Namun demikian sepertinya pihak kepolisian masih sulit untuk mengungkapkan motif dibalik penyerangan Mile 62 tersebut ; padahal kasus ini sendiri telah terjadi pada Agustus 2002.

Pada bulan November perhatian masyarakat Papua tertuju pada peringatan wafatnya Theys Hiyo Eluay yang diproklamirkan oleh Dewan Adat Papua (DAP) sebagai hari Kejahatan Kemanusiaan di Papua dan diperingati pada tanggal 11 November. Masih terus melekat di ingatan rakyat Papua bahwa pada tanggal 10 November 2001 Theys Hiyo Eluay diculik dan kemudian ditemukan telah tidak bernyawa pada tanggal 11 November 2001. Sebuah tragedi bagi masyarakat Papua yang hingga kini terus menuntut pengungkapan kebenaran atas kasus tersebut.

Dalam kaitan dengan itu Dewan Adat Papua (DAP) menyelenggarakan sebuah kegiatan yang berlangsung di GOR Cenderawasih Jayapura pada tanggal 14 November. Sebuah momen yang istimewa karena hadir pula tokoh nasional Indonesia, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mantan Presiden Republik Indonesia yang secara khusus mendapatkan penghargaan dari DAP atas jasa-jasanya bagi rakyat Papua ketika menjabat sebagai Presiden RI pada periode 1999 – 2001. Gus Dur telah memberikan dukungan dana sebesar Rp. 2 Milyar untuk penyelenggaraan Konggres Papua II tahun 2000.

Peristiwa tersebut mau mengingatkan kita kepada semua momen amat penting dalam sejarah Bangsa Papua ketika seluruh komponen rakyat Papua berkumpul untuk menyatukan aspirasi, menyatukan sebuah visi, misi bagi penegakan hak-hak orang asli Papua di atas tanah ini yang bermuara pada tuntutan kemerdekaan. Momen bersejarah yang akhirnya melahirkan sebuah Otonomi Khusus setelah sebelumnya terjadi tawar-menawar politik antara Jakarta dan Papua. Pilihannya adalah antara "M" atau "O", dimana akhirnya Otonomi Khusus dianggap merupakan solusi terbaik bagi penyelesaian seluruh persoalan di Papua.

Kebijakan Gus Dur saat menjabat presiden menunjukkan bahwa di era tersebut ada ruang yang lebih luas bagi orang Papua untuk berekspresi dan berbicara bebas tentang jati dirinya. Kesempatan lebih terbuka bagi orang asli Papua untuk mengangkat persoalan yang menyangkut hak-hak hidup mereka setelah sekian puluh tahun terkungkung dalam belenggu otoritas Soeharto pada masa kepemimpinannya. Akhirnya situasi menjadi lebih buruk ketika Megawati mengambil alih kekuasaan dengan menimbulkan berbagai polemik pemekaran yang isunya masih tetap dihidupkan sampai pada akhir tahun ini.

Di bulan Desember, seperti biasanya peringatan hari Hak Asasi Manusia (HAM) diselenggarakan oleh berbagai kelompok masyarakat dan aktivis HAM di seluruh dunia, termasuk juga di Jayapura dan beberapa kota lain di Papua. Bentuk peringatan bermacam-macam, namun sederhana dengan maksud untuk menyadarkan kembali pentingnya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM dalam rangka memberikan rasa keadilan kepada korban guna penegakan HAM.

Di Jayapura Peringatan hari HAM Internasional ini diselenggarakan dalam berbagai bentuk oleh berbagai kelompok. Koalisi Perjuangan hak-hak Asasi Rakyat Sipil Papua juga mengadakan demo damai untuk menolak cara-cara kekerasan, mendorong peradilan yang adil dan bermartabat dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

Sementara itu Komunitas Survivor Abepura (KSA) yang merupakan komunitas korban pelanggaran HAM Peristiwa Abepura 7 Desember 2000 kembali memperingati secara khusus peristiwa tersebut dengan melakukan ibadah bersama dan kunjungan penghormatan ke makam para korban Abepura 7 Desember 2000. Peringatan ini menjadi momen yang mengingatkan kita semua bahwa masih ada pekerjaan besar untuk penegakan keadilan yang seadil-adilnya terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM yang telah terjadi di Indonesia, secara khusus di Papua.

Ketika berbagai komponen masyarakat di Indonesia dan juga di Papua memperingati hari HAM sedunia sebagai tanda untuk terus berjuang menegakkan HAM, Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto justru meminta masyarakat mewaspadaai LSM yang mengatasnamakan penegakan HAM di Papua karena dianggap mempunyai kepentingan yang tidak jelas dan melindungi aksi garis keras OPM yang bergerak di Bumi Cenderawasih. Dikatakan juga bahwa TNI selama ini masih menggunakan tindakan persuasif bagi gerakan separatis, tetapi bukan tidak mungkin akan mengambil tindakan tegas.

Hal ini mendapat tanggapan Ketua Divisi Bidang Ekosob Komnas HAM perwakilan Papua, Frits Ramandey yang mengatakan bahwa pernyataan Panglima TNI tersebut bukanlah hal yang baru. LSM HAM tidak hanya ada di Papua tetapi di seluruh Indonesia dan seharusnya dapat disebutkan dengan jelas LSM yang dimaksud, bukan hanya menuding saja.

Sikap panglima TNI ini seakan mau menunjukkan bahwa apapun gerakan sosial rakyat yang bertujuan menegakkan HAM di Tanah Papua dianggap sebagai separatis. Ketika korban ketidakadilan angkat bicara soal haknya untuk mendapatkan keadilan, mereka akan dicap sebagai separatis juga. Ketika LSM atau organisasi masyarakat yang lain bicara soal penegakan hak-hak hidup orang asli Papua sebagai salah satu bentuk penegakan HAM, maka akan dicap sebagai organisasi yang mendukung OPM dan dianggap separatis. Bahkan mungkin saja ketika seorang pejabat pemerintah di Papua bicara soal pemberdayaan hak-hak hidup orang asli Papua pun akan dicap sebagai separatis.

Pernyataan Panglima Djoko Suyanto ini jelas menerangkan kepada kita betapa tidak ada ruang yang cukup luas bagi komponen masyarakat sipil di Papua untuk bebas berekspresi, bebas melakukan apa yang dianggap baik bagi kepentingan penegakan keadilan guna mewujudkan suatu kehidupan yang damai di Tanah Papua ini. Hal ini juga menunjukkan sikap tidak profesional Panglima TNI karena tidak mampu mengidentifikasi secara jelas LSM mana yang bertindak separatis sehingga hal ini sebenarnya hanya ancaman saja.

2. PERTAHANAN DAN KEAMANAN

Di bidang pertahanan dan keamanan, upaya pihak pemerintah Indonesia, secara khusus TNI dan Polri untuk menjaga keutuhan NKRI semakin ditingkatkan. Fokus perhatian jatuh pada pertahanan wilayah laut, wilayah udara dan wilayah perbatasan negara seperti di Kalimantan, Sulawesi dan secara khusus di Papua semakin ditingkatkan.

Di Papua secara khusus Pangdam XVII/Trikora Mayjen TNI Zamroni mengatakan perlunya mengatasi kelompok separatis dengan melakukan pembinaan kepada kelompok-kelompok separatis (TPN/OPM) dengan mengedepankan pendekatan kemanusiaan. Tidak terlalu jelas

bentuk pembinaan seperti apa yang akan dilakukan oleh pihak TNI (Kodam) sehingga kelompok-kelompok seperti TPN/OPM tidak lagi mengganggu keamanan negara. Pernyataan ini akan kita konfrontasikan dengan operasi TNI yang terjadi di Mulia dalam uraian lebih lanjut dibagian ini.

Pertahanan wilayah laut di Papua sebagai wilayah laut NKRI juga mendapat perhatian serius dari TNI Angkatan Laut. Maraknya *illegal fishing* yang terjadi wilayah perairan bagian utara dan selatan Papua tetap menjadi sasaran berbagai patroli pengamanan yang dilakukan oleh TNI Angkatan Laut. Dengan peningkatan patroli seperti ini diharapkan praktek *illegal fishing* di wilayah perairan Papua dapat semakin berkurang.

Sementara itu sekitar 200 orang nelayan asal Indonesia (Papua) juga ditangkap oleh pihak Australia karena melintasi wilayah perairan negara itu. Sebagian besar di antaranya adalah nelayan asli Papua asal Merauke. Berkaitan dengan maraknya peristiwa seperti ini, maka Pihak pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Australia akan bekerja sama memberantas *illegal fishing*. Sekda Drs. Andi Baso Basaleng mengatakan niat baik kerjasama ini akan dituangkan dalam kesepakatan kerjasama antara kedua pemerintah.

Masih dalam kaitan dengan pertahanan wilayah laut, TNI Angkatan Laut akan segera meningkatkan status Lanal Merauke menjadi Pangkalan Utama (Lantamal) XI Merauke pada tahun 2007 mendatang. Hal ini mendapat dukungan penuh dari DPR Papua yang disampaikan oleh Ketua Komisi A, Yance Kayame, yang membidangi Pertahanan dan Keamanan. DPRP menilai bahwa rencana ini merupakan suatu langkah maju dari pemerintah dalam meningkatkan sistem pertahanan dan keamanan daerah Papua sebagai bagian integral dari NKRI.

Sementara itu, TNI Angkatan Udara sibuk menambah radar di berbagai tempat di Indonesia, termasuk memasang radar baru di Merauke untuk memantau pesawat-pesawat yang melintas di wilayah Indonesia. Dengan demikian segala aktivitas penerbangan di wilayah udara akan selalu terpantau.

Melihat berbagai upaya yang dilakukan oleh TNI dalam rangka mempertahankan keutuhan dan keamanan wilayah negara Republik Indonesia ini, kita menjadi sadar bahwa wilayah Tanah Papua ini menjadi suatu wilayah yang sangat penting dan berharga bagi Indonesia. Betapa tidak, berbagai upaya dilakukan TNI sebagai pembela negara untuk mempertahankan dan menjaga keutuhan Tanah Papua sebagai bagian dari NKRI. Apakah memang begitu besar ancaman terhadap pertahanan negara di wilayah Papua?

Ketika berbagai kekuatan TNI diarahkan untuk mempertahankan wilayah laut, darat dan udara, di bagian tengah wilayah Papua, terjadi rentetan peristiwa di Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Pada bulan Oktober telah terjadi konflik antar warga dan amuk massa yang akhirnya menghancurkan sejumlah aset vital di Mulia. Di saat yang bersamaan, proses awal Pilkada Bupati Puncak Jaya memicu konflik antar warga.

Belum lagi selesai konflik pada bulan Oktober, perhatian kita dikejutkan dengan peristiwa penaikan bendera Bintang Kejora di Mulia oleh sekelompok orang yang disinyalir sebagai anggota TPN/OPM. Dua orang anggota TNI yaitu Serda Joko Susanto, seorang anggota Kopassus dan Tobias Sirken, seorang purnawirawan dari Koramil Mulia saat itu berupaya melakukan negosiasi dengan kelompok tersebut agar bendera diturunkan. Namun akhirnya

keduanya mengalami nasib naas. Pada tanggal 9 Desember kedua anggota TNI ini ditemukan tewas di Gunung Pomo. Pelaku pembunuhan oleh pihak TNI AD disebut-sebut berasal dari kelompok TPN/OPM pimpinan Goliat Tabuni. Pihak TNI kemudian mengadakan penyelidikan yang mendalam dan proses itu di *back up* oleh Polda Papua dengan mengirimkan tambahan pasukan ke Mulia.

Penambahan pasukan ini menyebabkan situasi di Mulia mencekam. Patroli dan jam malam diberlakukan. Namun selang beberapa hari, tanggal 13 Desember, terjadi penyerangan terhadap seorang anggota Brimob yang sedang berpatroli. Senjata api yang dibawanya dirampas oleh oknum-oknum yang disebut juga sebagai anggota TPN/OPM. Setelah peristiwa ini, pengamanan di Kota Mulia semakin ditingkatkan, termasuk dengan melakukan *sweeping* KTP.

Situasi yang semakin mencekam ini mendapat tanggapan Gubernur Papua Barnabas Suebu. Gubernur mengharapkan persoalan ini segera ditangani dan pelaku ditindak secara hukum. Sementara itu Bupati Puncak Jaya Frans Kristantus mengharapkan proses persuasiflah yang dilakukan dan tidak perlu ada lagi penambahan pasukan baik dari TNI maupun Polri. Dirinya khawatir masyarakat akan semakin takut terjadi perang apalagi dengan berbagai *sweeping* yang dilakukan di Mulia.

Dalam situasi tegang di Mulia, sebuah pesawat milik Trigana Air pada tanggal 21 Desember dikabarkan nyaris terkena peluru saat terbang rendah untuk melakukan pendaratan di Bandara Mulia. Peristiwa ini membuat Kapolres Puncak Jaya AKBP Yakobus Marjuki memerintahkan pengamanan ketat di daerah Bandara Mulia dan mengeluarkan peringatan kepada pihak penerbangan untuk berhati-hati saat akan mendarat atau ketika melintasi celah gunung. Menurutnya bukan tidak mungkin anggota TPN/OPM akan mudah menembak pesawat dengan jarak terbang yang dekat.

Peningkatan status keamanan di Mulia, Puncak Jaya ini mempengaruhi dinamika dan aktifitas warga Mulia. Orang tidak terlalu bebas pergi ke kebun atau sekedar bertemu dengan kerabat dan sanak saudara. Apalagi ada pemeriksaan ketat kepada orang-orang yang datang dari luar Mulia. Siapapun mereka, pasti diawasi aktivitasnya, sehingga tidak ada ruang yang cukup bagi warga sipil di Mulia untuk bebas melakukan aktivitasnya.

Di tengah situasi penuh kecemasan dan ketakutan yang dialami warga sipil, terkesan kedua institusi TNI maupun Polri baku tunggu dalam mengambil langkah pemulihan kondisi keamanan di Mulia. Yang lebih mengherankan, pihak polisi melalui Kapolres menyatakan pada tanggal 24 Desember TNI melakukan penembakan terhadap kerumunan massa yang sedang mengibarkan bendera Bintang Kejora dan mereka diduga sebagai TPN/OPM. Akibatnya massa bubar dan TNI tetap melakukan pengejaran. Sedikitnya 2 atau 4 orang dari kelompok itu tertembak. Pernyataan ini ditentang oleh Danrem 173/Praja Vira Braja, Kolonel Inf. Herman tedez. Menurutnya hal itu tidak benar. Kelompok yang mengibarkan bendera bukan kelompok Goliat Tabuni, pelaku pembunuhan 2 aparat TNI, sehingga tidak mungkin pihaknya tetap melakukan pengejaran, apalagi sampai menembak. Kapendam XVII/Trikora Letkol Inf. Imam Santosa mengatakan TNI hanya membackup Polisi jika diperlukan sedangkan urusan ketertiban sipil adalah urusan Polisi.

Kesan saling lempar tanggungjawab terlihat dengan pernyataan yang kontradiktif ini. Betapa tidak, dalam situasi seperti itu, kedua pihak yang diharapkan dapat memulihkan situasi

keamanan di Mulia justru berbeda pendapat. Meskipun sudah ada penambahan pasukan dari kedua unsur institusi ini, tetap saja tidak ada langkah nyata yang menunjukkan upaya pemulihan kondisi keamanan. Justru yang terlihat adalah situasi semakin mencekam dan tegang antar kedua institusi TNI dan Polri ini. Akibatnya masyarakatlah yang menjadi cemas dan bingung.

Di tengah kecemasan ini, satu peristiwa penting juga sedang berlangsung di Mulia yaitu pemilihan bakal calon Bupati Puncak Jaya. Terjadi persaingan yang cukup kuat antara para kandidat pasangan Bupati dan Wakil Bupati. Persaingan politik ini menimbulkan berbagai spekulasi di kalangan masyarakat tentang adanya kaitan antara beberapa peristiwa tersebut dengan persaingan kandidat Bupati dan Wakil Bupati. Banyak pihak menduganya sebagai sebuah rekayasa yang sedang dibuat oleh pihak-pihak tertentu untuk mengacaukan situasi keamanan guna mengganggu kelancaran proses Pilkada Bupati di Puncak Jaya.

Apa sebenarnya yang sedang terjadi dibalik berbagai kekacauan di Mulia ini? Peningkatan pengamanan yang berlebihan ini rupanya tidak juga menyelesaikan persoalan. Situasi keamanan di Mulia bukannya semakin membaik tetapi justru semakin tidak jelas dan mencemaskan. Meskipun pengamanan dilakukan berlapis oleh TNI dan Polisi namun sampai saat ini belum terungkap siapa pelakunya karena pihak keamanan belum dapat menangkap pelakunya.

3. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, akhir tahun ini penuh dengan hiruk - pikuk seputar Pilkada Bupati di beberapa kabupaten yaitu Puncak Jaya, Paniai, Jayapura dan Mappi. Mari kita melihat bagaimana dinamika seputar Pilkada Bupati dan Wakil Bupati di beberapa wilayah ini.

Perseteruan antara pasangan yang kalah dan pasangan yang menang dalam Pilkada Bupati Paniai masih terus berlanjut sampai akhir tahun ini. Pihak yang kalah tetap menganggap bahwa hasil Pilkada Bupati Paniai itu tidak *fair* meskipun KPUD dalam sidang plenonya telah memutuskan bahwa pasangan Naftali Yogi – Derek Pakage menang secara sah. Pihak yang kalah kemudian menggugat KPUD Kabupaten di Pengadilan Negeri namun akhirnya Pengadilan juga memenangkan KPUD. Dukungan kepada pasangan ini diberikan oleh banyak pihak. Mereka meminta agar Gubernur Papua segera melantik Bupati dan Wakil Bupati Paniai. Salah satunya adalah Gerakan Mahasiswa dan Masyarakat Paniai (GEMPUR). Mereka mendorong hal ini dengan dasar agar penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kabupaten ini tidak tertunda-tunda dan masyarakat tidak menjadi korban dari perseteruan ini.

Sementara itu di kabupaten Puncak Jaya, persiapan Pilkada Bupati menjadi agenda paling penting di akhir tahun ini dan akan terus berlangsung sampai tahun mendatang. Ada 4 pasang calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya dan masing-masing berupaya keras untuk memenangkan Pilkada tersebut. Persaingan hebat juga sudah mulai terlihat bahkan pada awal pencalonan pasangan kandidat. Keempat pasang, masing-masing Elvis Tabuni – Pdt. Paul Tabuni, Yakob Yikwa – Drs. Jason Muabuay, Lukas Enembe S, IP – Drs. Henock Ibo, Elieser Renmaur – Drs. Baharudin Wakerkwa.

Proses pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya rupanya tidak berjalan sesuai

dengan aturan semestinya. KPUD Kabupaten yang semestinya menjalankan proses pencalonan justru tidak berfungsi. Anehnya DPRD Kabupaten Puncak Jaya yang membentuk Panitia Khusus (Pansus) Pilkada dan menetapkan syarat khusus bahwa yang berhak mencalonkan diri dalam pertarungan politik ini adalah putera daerah. Dengan dasar UU. No. 21 tahun 2001, pasal 20, ayat 1, huruf s, Ketua DPRD Puncak Jaya, Timotius Murib mengatakan Pilkada Puncak Jaya adalah yang pertama menggunakan dasar hukum tersebut. Meskipun belum ada Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) dan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) yang mengaturnya, Timotius mengatakan sudah mendapat rekomendasi dari MRP.

Hal ini tentu membuat geram pihak calon lainnya seperti pasangan Elieser Renmaur dan Baharudin Wakerkwa. Melalui tim kuasa hukumnya, mereka mengajukan gugatan hukum terhadap KPUD Puncak Jaya yang tidak menjalankan tugasnya sesuai PP No. 6 Tahun 2006 dan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Gugatan ini membuahkan hasil, karena akhirnya KPUD Puncak Jaya kembali menjalankan fungsinya dan memproses semua berkas-berkas pencalonan.

Apa sebenarnya yang menjadi tujuan DPRD membentuk Pansus Pilkada Bupati tidaklah begitu jelas. Meskipun DPRD menggunakan alasan keamanan, tetapi mestinya sebagai lembaga negara, DPRD lebih paham dengan aturan-aturan hukum yang berlaku di negara ini. DPRD Kabupaten Puncak Jaya jelas-jelas telah melakukan kekeliruan dengan membentuk Pansus sebagai pelaksana Pilkada karena DPRD tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan Pilkada. Ketua KPUD Provinsi Papua Ferry Kareth menegaskan agar semua pihak berpegang kepada aturan yang berlaku yaitu UU. NO. 32 Tahun 2004 dan PP No. 6 tahun 2005 dan melakukan tugas sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Momen persiapan Pilkada Puncak Jaya yang berlangsung di tengah situasi mencekam di ibukota Mulia menimbulkan berbagai spekulasi. Berbagai pihak mengait-ngaitkan persaingan politik dalam Pilkada Bupati Puncak Jaya dengan kasus penyerangan yang mengakibatkan terbunuhnya anggota Kopasus dan pensiunan anggota Koramil yang diikuti dengan serentetan aksi teror terhadap warga sipil. Sulit memang untuk dibuktikan keterkaitan langsung antara sederetan peristiwa tersebut. Apalagi belum ada kejelasan pelaku dan motif berbagai peristiwa yang mencemaskan ini. Pihak TNI dan Polri sampai saat ini belum dapat menangkap pelakunya.

Jika di Puncak Jaya, proses pencalonan diwarnai dengan gugat menggugat, di kabupaten Mappi, bagian selatan Tanah Papua, proses pelantikan Bupati dan Wakil Bupati masih saja tertunda cukup lama. Sejak tahun 2005 sampai sekarang, belum ada kepastian kapan Bupati yang sah akan dilantik. Proses hukum dan gugatan yang dijalankan selama 1 tahun lebih, tetap tidak memberikan kelegaan bagi warga masyarakat yang protes tentang Bupati dan Wakil Bupati Mappi yang haruslah orang asli Mappi. Meski sudah ada keputusan final dari Mahkamah Agung tetapi para pendukung pihak yang kalah tetap ngotot. Namun sikap ngotot ini tidak berpengaruh apa-apa. Pasangan Aminadap Yumame dan Stevanus Kaisma akhirnya resmi dilantik oleh Gubernur Barnabas Suebu pada tanggal 14 Desember 2006 sebagai Bupati dan Wakil Bupati Mappi untuk periode 2006 – 2011. Pelantikan ini berlangsung di gedung DPRD Mappi dan diwarnai juga dengan demonstrasi oleh warga masyarakat dan pihak yang kontra.

Setelah melantik Bupati dan Wakil Bupati Mappi, Gubernur Barnabas Suebu kemudian

melantik Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura, Habel Melkias Suwae dan Zadrak Wamebu. Meskipun sebelumnya muncul isu yang mengatakan akan ada usaha untuk menggagalkan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Jayapura ini oleh pihak yang kontra, namun hal tersebut tidak terbukti. Pelantikan berlangsung dengan lancar meski dengan pengawasan ketat dari pihak Kepolisian. Dengan demikian Bupati dan wakil Bupati tersebut secara resmi harus mulai menjalankan pemerintahan di wilayah ini.

Akhirnya untuk menutup tahun 2006 ini, Pemerintah Provinsi Papua melakukan pelantikan terhadap 22 orang dari 24 orang anggota DPRD Kabupaten Mimika periode 2004 – 2009. Setelah tertunda hampir 2 tahun. Seperti kita ketahui bersama bahwa telah terjadi sengketa yang cukup hebat dalam proses pemilihan anggota DPRD kabupaten Mimika yang telah berlangsung sejak tahun 2004 lalu. Semoga dengan pelantikan anggota DPRD Mimika ini, tugas dan fungsi wakil rakyat di lembaga kunci ini dapat segera berfungsi, demi kepentingan rakyat di Mimika.

Di akhir seluruh rentetan hiruk pikuk ini, seperti ada kelegaan bahwa pelan tapi pasti persoalan-persoalan seputar pemerintahan di tanah ini semakin terselesaikan di ujung tahun ini. Satu hal yang terus menjadi pertanyaan adalah bagaimana dengan tuntutan rakyat bahwa kepala daerah haruslah orang asli Papua dan asli daerah setempat. Apakah kriteria ini dapat segera dipenuhi pada tahun mendatang sehingga tidak lagi terjadi polemik dalam proses Pilkada Bupati atau Walikota ?

4. PENANGANAN KONFLIK

Mengawali tiga bulan penghujung tahun 2006 ini Kota Mulia, Puncak Jaya memanas. Hanya karena pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai kompensasi Bahan Bakar Minyak (BBM), ratusan warga yang mengantri dalam pembagian dana tersebut harus baku hantam dan akhirnya pecah menjadi kerusuhan besar. Karena persoalan kecemburuan sosial disebabkan sebagian warga mendapat dana sedangkan sebagian lagi tidak, amuk massa pun terjadi.

Bentrokan itu mengakibatkan 3 orang anggota polisi mengalami luka-luka, sementara di pihak warga sipil, sekitar 5 orang mengalami luka-luka di antaranya karena terkena tembakan. Selain korban luka-luka, belasan bangunan milik pemerintah, rumah-rumah pegawai serta kios dan warung makan milik warga pendatang juga hancur, bahkan Kantor DPRD Puncak Jaya hangus terbakar.

Meski peristiwa ini dapat ditangani secara hukum, tetapi kerugian fisik akibat amukan massa ini sangat besar. Diperkirakan kerugian sekitar Rp. 30 Milyar. Banyak pihak mensinyalir adanya keterlibatan oknum yang disebut-sebut sebagai aktor intelektual di balik peristiwa ini dan alasan utama adalah kepentingan politik tetapi hingga kini pihak Polisi sebenarnya belum mampu mengungkap siapa pelaku sebenarnya dan motif politik apa yang melatarbelakangi hal itu.

Kejadian ini seakan mengingatkan kita betapa keadaan kemiskinan masyarakat kita selalu menjadi "rumput kering" yang setiap kali mudah terbakar jika ada api kecil saja. Orang miskin dan kemiskinannya selalu menjadi "senjata" yang ampuh untuk mencapai kepentingan pihak-pihak tertentu. Kemiskinan memang menjadi salah satu sumber konflik, bukan saja di negeri ini tetapi di Indonesia bahkan di belahan bumi yang lain.

Kekerasan horisontal serupa juga terjadi di Timika. Penanganan secara hukum akhirnya dilakukan terhadap sejumlah orang yang diduga terlibat sebagai aktor dalam pertikaian antar marga di Kwamki Lama yang berlangsung selama hampir 3 bulan sejak Juli – September lalu. Beberapa orang akhirnya ditangkap di Timika dan juga di Jayapura oleh pihak kepolisian. Mereka dikenai pasal 160, 170 dan pasal 55 KUHP karena dinilai melakukan penghasutan dan melakukan perlawanan antara satu dengan yang lainnya. Peristiwa pertikaian ini merupakan pengulangan peristiwa-peristiwa serupa yang sudah terjadi sebelumnya.

Sementara itu pihak Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua (AMPTPI) melalui Sekjennya Hans Magal mengatakan bahwa penangkapan yang dilakukan oleh kepolisian di Jayapura terhadap sejumlah orang yang dianggap menjadi aktor konflik di Kwamki dinilai keliru. Hans mengatakan bahwa beberapa warga tersebut datang ke Jayapura karena dipanggil kepolisian untuk urusan bayar kepala dan upaya damai. Dengan demikian upaya yang dilakukan pihak Kepolisian justru hanya akan menambah konflik baru.

Peristiwa penahanan ini akhirnya mendapat tanggapan dari berbagai pihak tokoh adat dan tokoh masyarakat di Timika sehingga Direskrim Polda Papua Kombes Pol Paulus Waterpauw melakukan penagguhan penahanan agar penyelesaian secara adat dapat berjalan dan proses hukum positif juga berjalan seiring dengan proses perdamaian adat.

Jika melihat fenomena konflik yang terjadi di Timika, secara khusus di Kwamki Lama, perlu menjadi pertanyaan kita semua, sebenarnya apa yang sedang terjadi? Mengapa Kwamki Lama selalu menjadi daerah konflik antar warga sipil yang selalu disebut-sebut sebagai "perang suku", padahal senyatanya perang suku yang kita ketahui sebagai orang Papua tidak seperti yang terjadi di Kwamki Lama. Sebaiknya berbagai pihak, terutama tokoh masyarakat atau tokoh adat dari kelompok-kelompok yang bertikai dapat mengambil sikap yang jelas. Sikap jelas artinya tidak mudah terprovokasi atau mudah dimanfaatkan oleh pihak-pihak elit tertentu yang ingin mengacaukan situasi keamanan demi terwujudnya kepentingan pribadi atau golongannya.

Selanjutnya apakah upaya damai dengan cara adat dan penanganan hukum positif yang dilakukan terhadap konflik Kwamki Lama akan menjamin bahwa konflik seperti ini tidak akan terjadi lagi? Ataukah hal ini hanya berupa upaya 'memadamkan api yang sedang menyala dirumput kering' kemudian rumput tersebut akan menyala ketika dibakar lagi? Sudah saatnya masyarakat adat kita dibantu untuk tidak mudah terpengaruh terhadap hasutan demi kepentingan golongan tertentu.

5. ASPIRASI 'M'(erdeka)

Warga Papua berduka di ujung tahun 2006 ini dengan meninggalnya seorang tokoh Papua yaitu Dr. Willem Zonggonao di Sydney, Australia. Satu lagi tokoh Papua atau lebih tepatnya tokoh perjuangan kemerdekaan Papua yang berpulang ke hadirat yang Maha Kuasa menyusul tokoh-tokoh lain seperti Arnold Ap, Thomas Wanggai, John Mambor dan Theys H. Eluay.

Dalam suasana duka itu, pro dan kontra muncul mengenai di mana Bapak Willem ini akan

dikuburkan; bahkan pro dan kontra ini cenderung diwarnai unsur politik. Beberapa pihak di Papua mengharapkan agar jenazah Bapak Willem dapat dikuburkan di sebelah kuburan Bapak Theys; namun hal ini juga mendapat penolakan dari keluarga Theys dengan alasan akan menjadi polemik karena status kewarganegaraan Bapak Willem dan tidak ada kesepakatan sejak awal Konggres Papua bahwa semua tokoh perjuangan kemerdekaan Papua yang meninggal akan dimakamkan di satu lokasi yang sama.

Reaksi warga Papua sewaktu mendengar kabar duka ini juga tidak terlalu kuat. Hanya pernyataan duka dan sedih, tetapi tidak ada suatu reaksi yang besar, seperti ketika Theys Eluay terbunuh. Hal ini mungkin saja karena Bapak Willem Zonggonao tidak hidup lama di Papua melainkan menghabiskan hidupnya di negara lain sehingga secara emosional tidak terkait kuat dengan ingatan orang Papua, terutama generasi muda Papua. Tetapi dapat juga dikatakan mungkin saja ada ketakutan masyarakat Papua untuk bereaksi terhadap peristiwa kematian tokoh Papua ini sebagai ungkapan berduka.

Perayaan 1 Desember tahun ini juga tidak dilakukan dengan bentuk yang khusus, hanya berupa ibadah dan ziarah ke Makam Theys. Momen 1 Desember seperti menjadi ingatan saja bagi setiap warga Papua. Peringatan 1 Desember menjadi momen penting untuk mengenang kembali semangat kebangsaan dan nasionalisme Papua walaupun dengan cara yang sederhana.

Jika melihat reaksi masyarakat Papua tentang kabar duka meninggalnya tokoh Papua dan juga peringatan 1 Desember yang seakan menjadi milik sekelompok orang Papua yang punya keinginan untuk merdeka, maka kita patut bertanya apakah aspirasi "M" yang dulu begitu keras diteriakkan itu masih tetap hidup didalam setiap insan di Tanah ini, atautkah sudah mulai luntur?

6. PEMEKARAN VS OTSUS ; Saling Lempar Tanggungjawab

Polemik seputar Otonomi Khusus (Otsus) masih bernada saling menyalahkan antara berbagai komponen tentang siapa yang paling bertanggungjawab untuk menjalankan UU. No. 21 tahun 2001 ini dengan baik. Pemerintah Daerah Papua, MRP dan DPRP saling melempar bola tanggungjawab untuk lahirnya Perdatus dan Perdasi yang akan dipakai sebagai acuan untuk menjalankan Otsus.

Sementara itu wacana untuk evaluasi terhadap Otsus juga terus digulirkan. Ada yang berpendapat yang perlu dievaluasi adalah kinerja pemerintahan kita berkaitan dengan pelaksanaan Otsus, tetapi ada pula yang berpendapat UU Otsus itu sudah tidak sesuai dengan kebutuhan jaman sehingga harus dievaluasi, bahkan direvisi, seperti yang diperjuangkan oleh Barindo Irian Jaya Barat dibawah pimpinan Edison Parairaway, SH.

Di tengah-tengah perdebatan ini, pelaksanaan pembangunan dengan sumber dari dana Otsus tetap dijalankan. Menko Polkam Widodo AS mengatakan akan berusaha mempercepat pembangunan dengan fokus pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ketahanan pangan dan peningkatan SDM dengan maksud agar Otsus dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat.

Kritik terhadap jalannya Otsus juga ditujukan secara khusus kepada MRP yang dinilai tidak mampu menjalankan fungsinya sebagai representasi orang asli Papua di pemerintahan.

Frans Maniagasi dari Pokja Papua di Jakarta mengatakan MRP belum memahami semangat dan cita-cita UU Otsus. Menanggapi hal ini, MRP mengatakan sudah membuat 6 draf perdasus dan telah diajukan ke Gubernur namun belum satupun yang ditindaklanjuti. Di tengah polemik Otsus yang tidak berjalan baik, pihak-pihak lain sibuk dengan mengupayakan pemekaran provinsi di Tanah Papua ini. Wacana tentang provinsi Irian Jaya Tengah masih terus dihidupkan. Entah apa yang diharapkan lagi dari sebuah pemekaran sementara kenyataan pemekaran hanya menimbulkan ketidakjelasan dan kebingungan bagi masyarakat.

Dalam situasi seperti ini, seharusnya para elit politik kita dapat memilah-milah persoalan mana yang menjadi kepentingan rakyat Papua dan mana yang menjadi kepentingan sekelompok orang yang ingin kekuasaan dan nama. Kalau tidak, rakyat Papua lah yang akan menderita, mengalami segala bentuk ketidakjelasan.

B. Catatan Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

oleh Toni Nuwa Wonga, ofm

1. SUBSTANSI PENDIDIKAN BELUM TERSENTUH

Upaya mencerdaskan rakyat Papua kiranya masih jauh dari yang diharapkan seperti telah kita ikuti dalam catatan peristiwa di atas. Berbagai sektor vital yang mendukung terselenggaranya proses mencerdaskan kehidupan bangsa masih berjalan pincang; padahal Bidang Pendidikan merupakan salah satu prioritas perhatian dari Otsus yang sudah berjalan kurang lebih 5 tahun.

Catatan peristiwa di atas merangkum pokok-pokok masalah yang dapat disadari dan diperhatikan bersama sebagai insan-insan yang peduli akan pembangunan di tanah air khususnya di Tanah Papua seperti kurangnya akses pendidikan bagi perempuan, terungkapnya kasus korupsi di tingkat perguruan tinggi, pemalangan sekolah, demo para guru, dan kekurangan guru di daerah pedalaman.

Selain sisi negatif terdapat juga berbagai terobosan baru yang ingin dimaksimalkan oleh pemerintah supaya pendidikan dapat berjalan baik, antara lain, lulusan dari Perguruan Tinggi tidak hanya menjadi PNS, adanya dana biaya akhir studi, tunjangan untuk guru di pedalaman, program sekolah gratis, pendidikan berpola asrama, dan PLS. Marilah kita simak satu demi satu.

Dua unsur tak terpisahkan dalam dunia belajar mengajar adalah guru dan murid. Kesejahteraan para guru menjadi salah satu faktor penentu komitmen mereka dalam proses mencerdaskan anak didik. Usaha meningkatkan kesejahteraan para guru coba dilakukan oleh pemerintah melalui dinas P & P. Misalnya, Kepala Dinas P & P Kabupaten Jayapura, Jack Ayamiseba, mengatakan guru-guru di daerah pedalaman diberi tunjangan 9 kali lipat dari gaji pokok. Janji ini kiranya patut dicermati tidak hanya dari segi pelaksanaan tetapi juga dari segi sumber dananya karena persentase dana jauh lebih menentukan letak prioritas daripada sekedar jumlah nominalnya.

Meski tunjangan guru coba dinaikkan, senyatanya kekurangan guru tetap menjadi masalah yang belum teratasi, khususnya di wilayah pedalaman. Kekurangan guru di daerah-daerah pedalaman saat ini disikapi oleh pemerintah Provinsi Papua dengan membuat suatu Kolose Pendidikan Guru yang khas Papua. Kolese ini membina lulusan SMP yang bercita-cita menjadi guru dan mereka mengabdikan di pedalaman. KPG ini ada di 4 Kabupaten, yaitu Timika, Nabire, Merauke dan Sorong. Pendidikannya selama 5 tahun. Kelas 1-3 setara dengan SMA dan kelas 4-5 setara dengan Diploma II. Hingga kini belum ada evaluasi sejauh mana pengaruh KPG terhadap proses belajar

dan mengajar.

Hambatan birokrasi yang sungguh merusak dunia pendidikan adalah korupsi. Di akhir tahun ini diungkapkan satu kasus dugaan korupsi sebesar Rp. 800 juta di Sekolah Tinggi Seni Papua, Jayapura. Dana tersebut seharusnya digunakan untuk mengembangkan bakat dan minat orang-orang muda dalam mengembangkan budaya Papua. Indikasi yang sama terlihat dari demo para guru yang menuntut hak-hak mereka. Sangat ironis bahwa kampanye Otsus dengan pendidikan sebagai salah satu prioritas belum mendarat di tanah ini. Guru-guru yang sudah bersusah payah mengajar masih harus bersusah payah merebut gaji yang menjadi hak mereka.

Kasus-kasus ini boleh jadi merupakan puncak dari gunung es dunia birokrasi pendidikan di Tanah Papua yang seperti dunia lainnya tidak luput dari jaring-jaring korupsi. Jika anggaran pendidikan sudah minimal, tenaga pendidik tidak digaji dengan baik, dan dana pendidikan dikorupsi, tak banyak yang dapat diharapkan dari sistem pendidikan seperti ini selain melahirkan generasi "seadanya" yang ketinggalan kereta karena dunia sains, teknologi, keilmuan, dan keterampilan berkembang amat cepat sesuai dengan tuntutan pasar tenaga kerja.

Selain faktor guru, kita perlu mencermati faktor murid. Pemerintah Provinsi Papua, misalnya, memperhatikan pendidikan dengan memberi sumbangan insidental kepada mahasiswa yang berprestasi dan ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Hal itu terbukti dengan disediakannya bantuan biaya akhir studi oleh Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Papua, kepada 4.266 mahasiswa sebesar Rp. 4.405.500.000,- Perincian dana untuk mahasiswa program S-1 sebesar Rp. 750.000,- sampai Rp. 1.000.000, sedangkan untuk mahasiswa S-2 sebesar Rp. 5.000.000,- per orang. Langkah ini patut dipuji dan didukung agar bantuan seperti ini bersifat struktural sehingga tidak bergantung pada "kemauan baik" pejabat tetapi menjadi sistem kerja.

Contoh lain adalah tindakan Bupati Kabupaten Teluk Wondama, Albert Torey, yang mencoba melakukan terobosan dengan membebaskan biaya pendidikan kepada setiap anak sekolah mulai dari tingkat TK, SD, SMP, dan SMA. Hal ini merupakan contoh yang penting dilakukan oleh pemerintah di daerah lain di Papua sesuai dengan amanat pasal 36 ayat (2) UU No. 21/ 2001 karena pendidikan adalah faktor utama dalam pembangunan SDM yang bermutu dan handal.

Sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) penerimaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf b angka 4) dan angka 5) dialokasikan untuk biaya pendidikan, dan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) untuk kesehatan dan perbaikan gizi.

Selain pendidikan formal, dikembangkan pula sistem PLS yang informal. Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah Depdiknas Faisal M mengatakan akhir tahun 2006 pemerintah akan memperkuat program PLS melalui satuan pelayanan yang ada di Kabupaten/Kota. Buktinya dengan memberikan sarana dan prasarana pembelajaran yang ada di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB),³ sehingga SKB mempunyai standar belajar yang jelas. Pemerintah mengalokasikan dana untuk PLS sebagai berikut

Kegunaan	Dana
Dana dekonsentrasi pendidikan berkelanjutan 2007 Provinsi Papua	Rp. 69.319.309.000
Pendidikan anak usia dini	Rp. 6.170.095.000
Wajib belajar Dikdas	Rp. 21.215.690.000
Pendidikan Non Formal	Rp. 38.715.265.000
Budaya baca	Rp. 2.190.150.000
Manajemen pengendalian Program	Rp. 1.028.109.000

Dalam proses belajar mengajar faktor masyarakat mendapat tempat setara dengan guru dan murid. Faktor ini mencakup dukungan masyarakat dalam proses tersebut di segala tingkat karena pada hakikatnya pendidikan adalah kewajiban asasi orang tua. Dalam catatan kita di atas, kembali muncul halangan dan gangguan serius dari pihak masyarakat terhadap proses belajar mengajar dengan dalih adat.

Dalam pemaparan hasil penelitian data tampilan gender di Provinsi Papua, yang bertempat di aula Kantor PLS, ketua Wanita Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Ir. Anike Monim, mengatakan bahwa pendidikan bagi perempuan di daerah pedalaman Papua kurang mendapat perhatian. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: karena masih melekatnya sistem patriarkal, di mana kaum perempuan masih mendapat posisi nomor dua dalam keluarga. Akibatnya, menurut Ir. Anike Monim, masih banyak perempuan yang belum mendapatkan haknya untuk belajar dan menerima pendidikan dengan baik.

Selain faktor adat, unsur kemiskinan merupakan penghalang besar bagi perempuan dalam mendapatkan akses terhadap pendidikan. Perempuan dianggap tidak perlu berpendidikan setara dengan laki-laki karena mereka akan mengurus rumah tangga. Karena itu tak heran bahwa anak perempuan menikah pada usia dini karena tekanan ekonomis sedemikian.

Jika ditelaah lebih jauh, dampak praktik ini langsung berpengaruh pada generasi yang dilahirkan oleh perempuan karena pendidikan di rumah akan sangat ditentukan oleh tingkat kecerdasan perempuan yang bersangkutan. Kiranya masyarakat perlu secara kritis mawas diri sejauh mana akses terhadap pendidikan diberikan secara sama bagi anak laki-laki dan perempuan dalam keluarga. Apakah adat patriarki yang membelenggu kecerdasan orang Papua hendak dipertahankan?

Selain terhadap perempuan, halangan adat juga terjadi dalam wujud pemalangan. Contoh kali ini diambil dari wilayah Sentani, Kabupaten Jayapura. Pemalangan sekolah terjadi di SMA Negeri 2 Maribu berlangsung selama 2 minggu, yang dilakukan oleh Keluarga Yarosabra. Pemalangan ini telah mengganggu kelancaran proses belajar mengajar, apalagi berlangsung selama 2 minggu. Apakah argumen ganti rugi tanah dapat mengalahkan pelanggaran hak atas pendidikan? Kasus ini sudah sering terjadi dan umumnya terjadi di wilayah perkotaan di tanah Papua karena tanah telah menjadi komoditi yang amat komersial. Fakta ini menunjukkan dengan tegas bahwa boleh jadi pendidikan bukan faktor penting bagi masyarakat pemilik tanah entah karena mereka melihat bahwa pendidikan ternyata tidak mencerdaskan anak-anak mereka entah karena semata-mata tuntutan uang yang membelenggu mereka. Apakah sekali lagi ini karena faktor kemiskinan?

Namun dari catatan peristiwa baik yang menjanjikan maupun yang pincang, kita dapat menarik kesimpulan bahwa substansi pendidikan sebagai upaya mencerdaskan masyarakat belum menjadi pokok pembahasan. Yang diperkarakan barulah bersifat unsur penunjang yang meliputi: fasilitas, kebijakan, perilaku masyarakat, tenaga pendidik sedangkan materi dan sistem pendidikan sendiri belum sempat tersentuh.

Apakah pernah dikaji secara mendalam bagaimana mengajarkan sejarah Papua, antropologi Papua, demografi Papua, geografi Papua, dsb. dalam kerangka pendidikan dasar di Papua sehingga semua orang memiliki pemahaman yang sama mengenai identitas Papua? Bukankah sebuah kenyataan harian bahwa peta Papua dan nama-nama tempat di pedalaman tidak dipahami baik oleh siswa dan gurunya? Belum lagi di tingkat perguruan tinggi, ilmu arkeologi dan antropologi Papua kiranya tidak berkembang padahal dua ilmu inilah yang memastikan asal usul suatu bangsa berdasarkan bukti sains dan sejarah komunalnya.

Kenyataan ini kiranya dapat dimaklumi karena selama unsur penunjang belum dibereskan, materi pembelajaran pastilah masih jauh dari jangkauan. Sampai kapan Dinas P dan P, lembaga-lembaga

pendidikan, kalangan media massa, dan masyarakat adat mampu bekerjasama dalam mencerdaskan bangsa kita ini?

2. ANGAN-ANGAN HIDUP SEHAT

Sehat adalah hak asasi dan bukan hak warganegara. Artinya hak untuk sehat melekat pada diri manusia karena dia manusia dan bukan karena dia memiliki KTP. Paham ini kiranya penting untuk diulangi di sini karena paradigma ini belum terlalu biasa di negara ini, apalagi di Papua, karena sehat hanya dilihat sebagai perkara medis dan lebih buruk lagi, pengobatan penyakit; padahal, sehat menyangkut kebijakan pemerintah, perilaku warga, gizi, fasilitas kesehatan (termasuk air bersih, sanitasi, pengelolaan sampah), tenaga kesehatan, dan barulah, pengobatan.

Dalam catatan peristiwa penghujung tahun 2006 ini, di tataran kebijakan, masyarakat menyaksikan kembali tersingkapnya kasus-kasus penggelapan dana di puskesmas-puskesmas. Contoh kasus yang terungkap di Manokwari dan Nabire menjadi petunjuk bahwa penyakit korupsi telah menggurita dan membelit juga bidang kesehatan selain pendidikan. Korupsi terhadap dana puskesmas langsung berdampak pada fasilitas ini karena ini merupakan ujung tombak layanan kesehatan masyarakat.

Fakta lain seperti diutarakan oleh Ketua DPRD Kota Jayapura adalah minimnya anggaran bagi sektor kesehatan. Pernyataan ini mengejutkan di tengah segala retorika prioritas Bidang Kesehatan dan Perbaikan gizi seperti amanat pasal 36 UU No. 21/2001 tentang Otsus. Pernyataan ini penting disimak karena dikeluarkan oleh pejabat negara di pusat provinsi Papua sehingga kita dapat membayangkan bagaimana kenyataan di wilayah-wilayah luar Kota Jayapura yang tidak hanya jauh dari pengamatan publik tetapi juga dari sistem pemantauan pemerintah.

Hasil penelitian SKP Jayapura di Kabupaten Jayawijaya, misalnya, menunjukkan bahwa anggaran kesehatan dalam APBD 2006 hanya sebesar 4% dibandingkan anggaran Setda yang mencapai 20% (lima kali lebih tinggi). Anggaran yang amat kecil dengan tantangan geografis yang amat sulit, terbatasnya tenaga medis, dan masih tersebarnya penyakit-penyakit dasar menjadikan wajah Jayawijaya terpuruk selain peringkat kemiskinan yang paling tinggi di seluruh kabupaten di Indonesia.

Tanpa adanya kesehatan yang baik, maka segala aktivitas akan lumpuh total. Anak-anak yang adalah generasi muda, harapan bangsa, kesehatannya tidak diperhatikan. Masih ada ratusan anak Papua yang mengalami gizi buruk dan busung lapar. Ditambah lagi dengan angka kematian ibu yang sangat tinggi. Apakah ini yang dinamakan sejahtera, di mana anak-anak Papua mengalami gizi buruk di Tanah yang kaya akan sumber daya alam ini? Siapa yang disalahkan pemerintah, masyarakat, atau masing-masing individu? Untuk itu perlu kembali mengintensifkan atau menghidupkan kegiatan Posyandu di Puskesmas maupun Pustu-Pustu yang ada di daerah-daerah pedalaman. Selain itu perlu diberikan pelatihan bagi kader-kader kesehatan dengan tujuan agar mereka mampu memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di lingkungannya masing-masing terutama di daerah pedalaman.

Sepanjang tahun kita juga mencatat pengobatan merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya membangun masyarakat yang sehat. Di tengah keterbatasan sarana, tenaga, dana, dan kebijakan kesehatan, rakyat Papua harus berjuang melawan berbagai penyakit massal dan penyakit modern.

Virus HIV-AIDS makin meluas. Saat ini sudah tercatat sebanyak 2.770 kasus dan 318 di antaranya meninggal dunia. Jika setiap tahun hampir 3.000 orang terinfeksi dan lebih dari 300 orang meninggal karena penyakit ini, apa yang akan terjadi 10 tahun mendatang? Apakah masih ada rakyat Papua yang dapat hidup sehat di negeri ini? Fakta yang makin mengejutkan adalah bahwa makin banyak ibu hamil dan karena penanganan yang tidak memadai, bayi-bayi yang dilahirkanpun langsung terinfeksi. Hal yang lebih memprihatinkan lagi, yaitu para penderita yang terbanyak adalah masyarakat asli Papua yang pada umumnya penderita HIV-AIDS tertular melalui hubungan seks.

Fakta ini mengindikasikan beberapa hal mendasar: [1] sebaran HIV dan AIDS telah menginfeksi ibu-ibu rumah tangga di kalangan orang asli Papua yang nota bene memiliki mobilitas amat rendah. Jadi hampir dipastikan bahwa mereka terinfeksi dari suami-suami mereka sendiri. [2] Saat mereka mengandung dan hampir melahirkan, mereka umumnya tidak tahu jika mereka telah terinfeksi karena tidak memeriksakan diri ke VCT, entah karena fasilitas VCT tidak tersedia, entah karena tabu. Akibatnya saat melahirkan, persalinan tidak dijalankan dengan bedah sesar sehingga bayi-bayi langsung terinfeksi. [3] Pemahaman yang amat rendah di kalangan pejabat pemerintah di tingkat kabupaten, distrik, dan desa mengenai penyakit ini menyebabkan upaya mengatasi penyebaran virus ini makin lemah.

Selain virus HIV-AIDS modern yang mematikan, Papua tetap belum bebas dari penyakit-penyakit massal, seperti diare, malaria, TBC, ISPA, dan rabies. Penyakit-penyakit ini seharusnya dapat diatasi karena sudah tersedia obat. Selain itu penyakit-penyakit tersebut terkait dengan perilaku hidup yang tidak sehat dan sarana-sarana kesehatan yang tidak memadai. Tidak tersedianya sistem pengolahan sampah di semua wilayah Papua, sistem air bersih yang tidak memadai, sistem kebersihan lingkungan yang tidak terpelihara—merupakan beberapa contoh pendukung maraknya penyakit-penyakit dasar tersebut.

Kiranya pada akhir tahun ini kita perlu secara serius mengukur diri sejauh mana pemenuhan hak atas kesehatan berupa realitas atau angan-angan belaka. Sehat sejauh ini masih berupa soal pengobatan dan belum dilihat kaitannya dengan problem kemiskinan. Mutu kesehatan yang rendah tentunya akan menghambat orang untuk bekerja. Keterbatasan ini akan bermuara pada rendahnya produktivitas masyarakat dan pada gilirannya berpengaruh pada tingginya tingkat kemiskinan. Selama penanganan problem kesehatan masih bersifat sektoral, kiranya baik problem kemiskinan maupun kesehatan sendiri tetap sebuah angan-angan muluk.

3. KESEJAHTERAAN UMUM

Di akhir tahun ini, kita menyaksikan munculnya kembali musim proposal. Misalnya, pada tanggal 6 Oktober, sebanyak 14 nelayan yang mengaku pendukung Gubernur dan wakil Gubernur, datang membawa proposal untuk meminta dana sebesar Rp. 30 juta per orang. Tiga hari kemudian, yaitu tanggal 9 Oktober, proposal yang masuk jauh lebih banyak lagi hingga mencapai ribuan proposal. Untuk mendapatkan proposal yang bentuk dan isinya sama itu, setiap nelayan dan orang yang ingin mendapatkan proposal tersebut harus merogoh koceknya sebesar Rp. 100.000,- hingga Rp. 150.000. Siapa yang salah dalam menghadapi kenyataan ini? Apakah karena janji-janji yang di kampanyekan oleh gubernur dan wakil gubernur terpilih? Janji adalah utang. Itulah konsep yang selalu ada ketika seseorang atau sekelompok orang membuat janji kepada orang atau kelompok orang lainnya.

Kenyataan sedemikian ditanggapi oleh Gubernur dengan mengeluarkan sebuah surat bernomor 900/2305/SET yang mengatakan bahwa tidak tersedianya dana karena program anggaran tahun 2006 tidak mungkin digeser untuk program lain. Keinginan masyarakat akan terjawab pada tahun 2007 karena akan diturunkan dana ke kampung-kampung untuk kepentingan bersama di kampung.

Di penghujung tahun yang selalu diwarnai dengan hari raya Natal dan Tahun Baru, kesejahteraan hidup semakin tak menentu dikarenakan harga beras di pasar naik, harga kebutuhan pokok dan tarif angkutan naik, sedangkan UMP tidak dinaikan dan THR tidak dibayar. Itulah kenyataan hidup yang terus membuat rakyat Papua tidak merasakan arti sejahtera. Himpitan ekonomi ini makin terasa di daerah seperti Wamena dimana seluruh bama harus diangkut dengan pesawat. Untuk menyikapi kenaikan harga bahan kebutuhan pokok dan transportasi, Ketua DPD Jayawijaya, meminta kepada pemerintah Kabupaten Jayawijaya untuk segera mengontrol standar harga. Hal ini merupakan tanggung jawab pemerintah untuk menjamin ketersediaan sembako bagi semua warganegara.

Selain masalah di atas, ada masalah yang sangat mengganggu aktivitas masyarakat ketika memasuki musim hujan, yaitu banjir. Hal ini menjadi perhatian dari DPU Kota Jayapura. Dalam anggaran tahun 2007, kepala DPU, Malkidin Soltief mengatakan akan menangani banjir dengan memperbesar saluran pembuangan. Selain saluran pembuangan yang terlalu sempit, banjir juga dipengaruhi karena saluran-saluran air tersumbat akibat ditutupi oleh sampah-sampah yang dibuang sembarangan oleh warga masyarakat. Kita dapat melihat bahwa hampir di setiap selokan yang kita jumpai di kota penuh dengan sampah botol dan plastik. Tak lupa pula banjir diakibatkan oleh karena saluran-saluran air sudah ditutupi oleh perumahan warga. Walaupun pemerintah telah berusaha untuk memperbesar saluran air, namun apabila tidak ada kesadaran dari masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya dan lebih penting lagi, jika tidak ada sistem pengelolaan sampah yang memadai, banjir tetap akan terjadi.

Semua masalah yang dihadapi masyarakat berhubungan dengan kesejahteraan rakyat umum di tahun 2006 ini akan dijawab dan diperhatikan oleh pemerintah daerah Provinsi Papua di tahun 2007 nanti. Harapan inilah yang menjadi suatu harapan besar dan bersama dari seluruh masyarakat Papua, yang selalu mendambakan kesejahteraan di atas Tanahnya sendiri. Hal itu diungkapkan oleh Gubernur dalam Musrenbang Provinsi Papua tahun 2006. Gubernur Papua, Barnabas Suebu, mengatakan ada dua hal pokok yang menjadi hasil dan fokus perhatian dari Musrenbang, yaitu **pertama**, terciptanya *good governance* di Papua yang akan dicapai melalui reformasi birokrasi, reformasi anggaran belanja, pengembangan sistem baru dalam anggaran belanja dan jasa, serta peningkatan kapasitas pada titik-titik lemah, mulai dari tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota, hingga ke Distrik-Distrik. **Kedua**, adanya perbaikan kesejahteraan rakyat yang difokuskan pada perbaikan kesejahteraan rakyat di kampung-kampung melalui program perbaikan gizi rakyat, perbaikan dan peningkatan mutu kesehatan dan pendidikan. Untuk menunjang hal itu, diperlukan program pengembangan ekonomi rakyat melalui perumahan dan infrastruktur.

Masyarakat kiranya akan memantau pelaksanaan tekad pemerintah tersebut pada tahun-tahun berikut bagaimana pemerintah menyediakan fasilitas-fasilitas umum, sembako dan prasarana yang memadai bagi kesejahteraan masyarakat masyarakat.

4. PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM

Catatan kita di bidang pengelolaan SDA di penghujung tahun ini diwarnai dengan dampak operasi tambang PTFI yang di satu sisi mendatangkan keuntungan berlipat ganda bagi ekonomi nasional tetapi di sisi lain mengakibatkan kerusakan alam dan manusia yang tak tergantikan.

PTFI mengumumkan kenaikan keuntungan lebih dari dua kali lipat pada akhir tahun ini sebagai akibat dari kenaikan harga emas dan tembaga. Perusahaan meraup keuntungan senilai \$350,7 juta dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai \$165,8 juta. Kenaikan sedemikian akan langsung berdampak pada sumbangan pada pendapatan nasional baik melalui pajak maupun royalti. Namun dibandingkan dengan nilai total keuntungan perusahaan, jumlah yang diterima oleh negara sebenarnya lebih kecil daripada nilai keuntungan tersebut. Karenanya tak heran jika kehadiran tambang ini, dirasakan sebagai candu bagi masyarakat Papua, terutama masyarakat pemilik hak ulayat.

Aksi penolakan PT Freeport terjadi di mana-mana, baik itu di Papua (Timika dan Jayapura), maupun di luar Papua seperti di Jawa dan Bali dari waktu ke waktu. Bahkan penolakan atas kehadiran PT Freeport telah berbuntut kerusuhan yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa, baik itu dari aparat keamanan maupun dari masyarakat pada 16 Maret 2006 yang lalu. Dana yang diberikan oleh PT Freeport yang merupakan jaminan hidup bagi masyarakat yang hak ulayatnya diambil, senyatanya terus mendatangkan konflik horisontal dalam masyarakat. Untuk itu, Bamus LMPAK pada tanggal 11

Oktober 2006 meminta agar PT Freeport Indonesia menghentikan dana kemitraan atau dana satu persen karena dana itu dinilai gagal menyejahterakan masyarakat dan bahkan menimbulkan berbagai masalah sosial dan konflik di Kabupaten Mimika.

Bukan pertama kalinya uang hasil keuntungan PTFI mendatangkan petaka. Sekitar 10 tahun lalu saat dibentuk dana perwalian, tujuh suku sudah berebut hebat hingga jatuh korban jiwa. Kini konflik horisontal terjadi lagi dan bahkan konflik vertikal karena aparat negara terlibat menghantam warganya setelah aparat kepolisian dan intel AU tewas dalam bentrokan dengan mahasiswa. Karenanya tak heran masyarakat Amungme dan Kamoro berkeputusan seperti di atas.

Selain pertambangan, pembalakan kayu liar juga marak terjadi di Papua seperti virus yang mematikan tetapi kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Para tersangka yang terlibat di dalamnya tidak mendapatkan hukuman yang membuat jera baik bagi dirinya maupun bagi orang lain yang seprofesi dengannya. Hal ini kalau tidak ditangani secara baik dan bijaksana oleh pemerintah dan aparaturnya, maka boleh jadi sumber daya alam yang dihasilkan dari hutan Papua akan musnah. Akibat yang lebih fatal, yaitu masyarakat akan mengalami krisis pangan dan kematian karena hutan yang adalah sumber kehidupan mereka dimusnahkan, khususnya bagi masyarakat yang masih hidup dalam sistem meramu. Untuk mengatasi hal ini, Menteri Kehutanan MS Ka'ban mengatakan bahwa masalah kehutanan khususnya di Papua menjadi perhatian pemerintah hingga tahun 2009, dan para cukong kayu akan terus dikejar karena telah merugikan negara dan masyarakat. Kegiatan pembalakan akan terus dikejar dan dibasmi.

Tapi ada hal yang perlu dipertanyakan, mengapa target hanya dipatok sampai tahun 2009? Mengapa tidak setiap tahun? Apakah dalam jangka waktu 3 tahun itu, praktek *illegal logging* dijamin akan hilang? Karena dengan demikian kalau penanganannya hanya sampai tahun 2009, maka setelah tahun 2009 masalah ini tidak diperhatikan lagi. Tentunya *illegal logging* akan marak lagi. Pemerintah tidak bisa menjamin bahwa masalah itu tidak akan terjadi lagi karena perlu diingat bahwa hutan di Papua masih sangat luas. Atau jangan-jangan pemerintah setuju akan adanya masalah *illegal logging* ini?

PENUTUP

Bagaimana perasaan dan pikiran kita saat membaca catatan-catatan di atas? Kiranya dengan jelas tergambar suasana kecemasan di akhir tahun 2006 yang membayangi situasi hak dan sosio-politis di Tanah Papua. Ruang gerak bagi masyarakat kita sempit dan tidak nyaman.

Kedudukan masyarakat begitu rapuh sehingga kapan saja bisa menjadi korban kekerasan, kebijakan pemerintah yang simpang siur, sengketa politisi yang berebut jabatan, rendahnya mutu pelayanan kesehatan dan pendidikan, atau pemodal yang mencari deposit tambang dan hasil hutan.

Banyak pertanyaan tak terjawab hingga akhir tahun dan boleh jadi tetap menjadi pertanyaan di tahun-tahun berikutnya.
